



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI  
JAWA BARAT TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019-2039.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi yang mempunyai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
7. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
8. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
9. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
10. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
11. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
12. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
13. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
14. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
15. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu dan ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
16. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor

kegiatan.

17. Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
18. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
19. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
20. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
21. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
22. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
23. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
24. Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
25. Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan.
26. Wilayah Pengoperasian Pelabuhan yang selanjutnya disebut WOPP adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional

kepelabuhanan perikanan.

27. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
28. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
29. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang selanjutnya disebut SBNP adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
30. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
31. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
32. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan biota perairan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
33. Industri adalah tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
34. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang selanjutnya disebut KKP3K adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk melaksanakan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
35. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disebut KKP adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
36. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

37. Alur Laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
38. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat dilayari kapal angkutan laut.
39. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur lainnya.
40. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya.
41. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
42. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
43. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
44. Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
45. Izin Pengelolaan Perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
46. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
47. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan

mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

48. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
49. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
50. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat Perikanan Tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum tradisional.
51. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat.
52. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
53. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## Bagian Kedua

### Fungsi

#### Pasal 2

RZWP-3-K berfungsi sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan/atau Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. instrumen penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah Provinsi;
- d. dasar pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan dalam melakukan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil;
- e. acuan dalam penyelesaian konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- g. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## Bagian Ketiga

## Ruang Lingkup dan Jangka Waktu

### Paragraf 1

### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup RZWP-3-K meliputi:
  - a. ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan
  - b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, khususnya meliputi wilayah perairan.
- (2) Pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang.

#### Pasal 4

Ruang lingkup RZWP-3-K Daerah Provinsi meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi
- b. rencana alokasi ruang;
- c. pengaturan pemanfaatan ruang;
- d. indikasi program;
- e. mitigasi bencana;
- f. kelembagaan;
- g. rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. hak dan kewajiban masyarakat;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. partisipasi dunia usaha;
- k. pemberdayaan masyarakat;
- l. sistem informasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- m. insentif dan disinsentif;
- n. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- o. larangan;
- p. penyelesaian sengketa;
  
- q. gugatan perwakilan;
- r. sanksi administrasi;
- s. ketentuan pidana;
- t. pendanaan;
- u. ketentuan lain-lain;
- v. ketentuan peralihan; dan
- w. ketentuan penutup.

Paragraf 2  
Jangka Waktu  
Pasal 5

- (1) Jangka waktu RZWP-3-K adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3-K dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Peninjauan kembali RZWP-3-K dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.
- (5) Mekanisme peninjauan kembali RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR  
DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

Tujuan dari RZWP-3-K Daerah Provinsi adalah:

- a. menciptakan harmonisasi dan sinergi perencanaan dan pemanfaatan ruang laut antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. menciptakan harmonisasi dan sinergi perencanaan dan pemanfaatan ruang laut dan ruang darat;
- c. mewujudkan kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan;
- d. mewujudkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 7

Kebijakan pemanfaatan dan pengembangan alokasi ruang, meliputi:

- a. pengelolaan Kawasan Konservasi, terdiri atas:
  1. menambah luasan Kawasan Konservasi;
  2. mencegah alih fungsi dalam Kawasan Konservasi;
  3. meminimalisasi kerusakan Kawasan Konservasi akibat kegiatan manusia dan alam;
  4. mengamankan Kawasan Konservasi; dan
  5. melaksanakan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam.
- b. pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum:
  1. pengembangan kegiatan pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berbasis potensi sumber daya dan daya dukung lingkungan; dan
  2. pemantauan dan pengendalian kegiatan pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- c. pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu terdiri dari:
  1. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan strategis dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya, dan pelestarian lingkungan;
  2. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis secara produktif, efisien, dan berdaya saing sesuai potensi lokal dan daya dukung lingkungan;
  3. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan strategis; dan
  4. turut serta menjaga pertahanan keamanan kawasan Strategis Negara.
- d. pengelolaan alur laut terdiri dari:
  1. penetapan Alur Pelayaran dan/atau perlintasan;
  2. penetapan pipa/kabel bawah laut; dan
  3. perlindungan migrasi biota laut.

### Bagian Ketiga

#### Strategi Pengelolaan Kawasan Konservasi

##### Paragraf 1

#### Strategi Menambah Luas Kawasan Konservasi

##### Pasal 8

Strategi menambah luas Kawasan Konservasi meliputi:

- a. penambahan luas kawasan;

- b. pengembalian dan peningkatan fungsi Kawasan Konservasi yang telah menurun, dalam rangka mengembalikan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- c. peningkatan upaya-upaya pengamanan Kawasan Konservasi;
- d. pengembangan program penyelamatan Kawasan Konservasi secara terpadu lintas wilayah dan lintas sektor;
- e. rehabilitasi Kawasan Konservasi Perairan, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, cagar alam, pelestarian sumber daya alam dan kawasan keanekaragaman hayati spesifik lokal; dan
- f. pertahanan fungsi konservasi dan pembatasan kegiatan pemanfaatan–kawasan konservasi yang dapat merusak fungsi konservasi di pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### Paragraf 2

##### Strategi Mencegah Alih Fungsi Dalam Kawasan Konservasi

#### Pasal 9

Strategi mencegah alih fungsi dalam Kawasan Konservasi meliputi:

- a. pencegahan terjadinya pemanfaatan kawasan secara liar;
- b. pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi;
- c. pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan;
- d. pengembalian fungsi lindung secara bertahap pada Kawasan Konservasi yang sedang dimanfaatkan untuk kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi sampai izin masa berlakunya habis; dan
- e. peningkatan upaya sosialisasi dan kesadaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi dan masyarakat untuk menghindari alih fungsi Kawasan Konservasi.

#### Paragraf 3

##### Strategi Meminimalisasi Kerusakan Kawasan Konservasi Akibat Kegiatan Manusia dan Alam

#### Pasal 10

Strategi meminimalisasi kerusakan Kawasan Konservasi akibat kegiatan manusia dan alam meliputi:

- a. pelaksanaan upaya-upaya preventif sebelum diambil tindakan administrasi maupun hukum terhadap kegiatan yang berdampak merusak lingkungan;
- b. pengawasan dan penegakan hukum Kawasan Konservasi;
- c. penelitian dan pengembangan Kawasan Konservasi;
- d. pendataan sumber daya hayati;
- e. rehabilitasi pantai yang mengalami abrasi dan akibat sedimentasi muara sungai;
- f. pemulihan fungsi Kawasan Konservasi;
- g. pelayanan pemanfaatan Kawasan Konservasi sesuai dengan

- zonasi, daya dukung, dan daya tampung Kawasan Konservasi;
- h. pembentukan lembaga pengelola Kawasan Konservasi;
- i. penyediaan sarana prasarana pengawasan konservasi; dan
- j. pembentukan kemitraan dan jejaring Kawasan Konservasi.

#### Paragraf 4

### Strategi Mengamankan Kawasan Konservasi

#### Pasal 11

Strategi mengamankan Kawasan Konservasi meliputi:

- a. pengayaan sumber daya hayati;
- b. perbaikan habitat;
- c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; dan
- d. penerapan metode ramah lingkungan.

#### Paragraf 5

### Strategi Melaksanakan Mitigasi dan Adaptasi Kawasan

#### Rawan Bencana Alam

#### Pasal 12

Strategi melaksanakan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam meliputi:

- a. pendataan kawasan rawan bencana alam;
- b. perencanaan aksi pengelolaan kawasan rawan bencana alam;
- c. penataan kawasan rawan bencana alam;
- d. pemanfaatan kawasan rawan bencana alam sesuai kaidah yang berlaku dengan berpegang pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup;
- e. pemanfaatan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalisasi dampak kerusakan pada kawasan rawan bencana alam;
- f. pemanfaatan teknologi tanggap dini kejadian bencana;
- g. pencegahan kegiatan budidaya yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup pada kawasan rawan bencana alam; dan/atau
- h. peningkatan upaya sosialisasi dan kesadaran kepada aparaturnya Pemerintah, masyarakat dan swasta tentang bahaya serta upaya antisipasi terjadinya bencana alam.

#### Bagian Keempat

### Strategi Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum

#### Paragraf 1

Strategi Pengembangan Kegiatan pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Potensi Sumber daya dan Daya Dukung Lingkungan

#### Pasal 13

Strategi pengembangan kegiatan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis potensi sumberdaya dan daya dukung lingkungan meliputi:

- a. penetapan kegiatan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. pengembangan kegiatan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- c. pengembangan kegiatan di luar kawasan konservasi;
- d. pengembangan kegiatan sesuai alokasi ruang yang akan didetailkan menjadi Zona/Sub Zona; dan
- e. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil unggulan Daerah Provinsi.

#### Paragraf 2

### Strategi Pemantauan dan Pengendalian Kegiatan pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

#### Pasal 14

Strategi pemantauan dan pengendalian kegiatan pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:

- a. pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis terhadap kebijakan, rencana dan program yang menimbulkan dampak dan risiko lingkungan;
- b. pelaksanaan proses AMDAL terhadap kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan secara periodik terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan upaya preventif terhadap kegiatan yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan penindakan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan;
- f. pengembangan mekanisme dan prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap kegiatan yang merusak lingkungan;
- g. peningkatan peran serta masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan dampak negatif terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- h. penyediaan sarana prasarana pemantauan dan pengendalian yang memadai.

#### Bagian Kelima

### Strategi Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu

#### Paragraf 1

### Strategi Pelestarian dan Peningkatan Nilai Kawasan Strategis Nasional Tertentu

#### Pasal 15

Strategi pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya dan pelestarian lingkungan hidup meliputi:

- a. pendelinasian Kawasan Strategis Nasional Tertentu;
- b. pencegahan pemanfaatan ruang di Kawasan Strategis Nasional

Tertentu yang berpotensi mengurangi fungsi strategis lindung kawasan;

- c. rehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional tertentu; dan
- d. pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis ekonomi nasional tertentu, sehingga memberikan nilai tambah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

## Paragraf 2

### Strategi Peningkatan Fungsi Kawasan Strategis

#### Pasal 16

Strategi peningkatan fungsi kawasan strategis secara produktif, efisien, dan berdaya saing sesuai potensi lokal dan daya dukung lingkungan meliputi:

- a. penataan ruang kawasan strategis dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesesuaian lokasi;
- b. pengembangan produk unggulan sesuai daya dukung lingkungan;
- c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung sesuai potensi dan daya dukung lingkungan hidup;
- d. pengembangan kawasan berorientasi bisnis yang mengakomodasikan kepentingan hulu dan hilir;
- e. pencegahan pemanfaatan lahan kawasan strategis yang berpotensi menimbulkan bencana alam, kecuali memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kaedah-kaedah pembangunan berkelanjutan;
- f. pelestarian kawasan strategis yang berorientasi mengembalikan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. rehabilitasi kawasan strategis yang berorientasi fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang teridentifikasi mengalami kerusakan;
- h. pengembangan mekanisme substitusi produk dalam maupun antar kawasan strategis; dan/atau
- i. penjagaan kawasan strategis yang berfungsi pertahanan keamanan.

## Paragraf 3

### Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan Strategis

#### Pasal 17

Strategi pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan strategis meliputi:

- a. pengembangan sarana dan prasarana pendukung

- pengembangan kawasan strategis sesuai kebutuhan pengembangan kawasan;
- b. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan strategis; dan/atau
  - c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan strategis secara terpadu dan berkelanjutan.

#### Paragraf 4

### Strategi Pertahanan Keamanan Kawasan Strategis

#### Pasal 18

Strategi pertahanan keamanan kawasan strategis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

### Strategi Pengelolaan Alur Laut

#### Paragraf 1

### Strategi Penetapan Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan

#### Pasal 19

Strategi untuk penetapan Alur Pelayaran dan/atau perlintasan terdiri atas:

- a. meningkatkan keterpaduan Alur Pelayaran dan/atau perlintasan untuk jaringan prasarana transportasi laut;
- b. menempatkan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
- c. memaduserasikan fungsi kegiatan pada Alur Pelayaran dan/atau perlintasan dengan fungsi kegiatan pada kawasan pemanfaatan umum dan/atau kawasan konservasi.

#### Paragraf 2

### Strategi untuk Penetapan Pipa/Kabel Bawah Laut

#### Pasal 20

Strategi untuk penetapan pipa/kabel bawah laut terdiri atas:

- a. meningkatkan keterpaduan laut untuk pipa/kabel bawah laut;
- b. menetapkan koridor pemasangan pipa/kabel bawah laut; dan
- c. memaduserasikan fungsi kegiatan pada pipa/kabel bawah laut dengan fungsi kegiatan pada kawasan pemanfaatan umum dan/atau kawasan konservasi secara optimal.

#### Paragraf 3

### Strategi Perlindungan Migrasi Biota Laut

### Pasal 21

Strategi untuk perlindungan migrasi biota laut terdiri atas:

- a. menetapkan alur yang dilindungi untuk keberlanjutan fungsi migrasi biota laut;
- b. mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum secara selektif yang berada sekitar alur migrasi biota laut untuk menjaga fungsi kelestarian migrasi biota laut;
- c. mempertahankan dan mengelola alur migrasi biota laut guna menjaga kelestarian biota laut yang terancam punah; dan
- d. memaduserasikan fungsi kegiatan pada migrasi biota laut dengan fungsi kegiatan pada Kawasan Pemanfaatan Umum dan/atau Kawasan Konservasi secara optimal.

## BAB III

### RENCANA ALOKASI RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 22

- (1) Rencana Alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K) meliputi:
  - a. Kawasan Pemanfaatan Umum yang selanjutnya disingkat KPU;
  - b. Kawasan Konservasi yang selanjutnya disingkat KK;
  - c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT; dan
  - d. Alur Laut yang selanjutnya disingkat AL.
- (2) Selain Alokasi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan ruang untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) KPU pada rencana Alokasi Ruang WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dibagi ke dalam zona dan/atau sub zona.
- (2) KK pada rencana Alokasi Ruang WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dibagi berdasarkan kategori.
- (3) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri atas pulau-pulau kecil terluar.
- (4) Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, terdiri atas alur pelayaran dan/atau perlintasan, pipa bawah laut, kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
- (5) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terdiri atas kawasan pertahanan keamanan, perkotaan, dan lingkungan hidup.

- (6) Rencana Alokasi Ruang WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dimuat dalam peta dengan skala 1 : 250.000 dan dalam Zona dan sub Zona dengan peta skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Rencana Alokasi Ruang WP-3-K dalam Zona dan sub Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijabarkan dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Kawasan Pemanfaatan Umum

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 24

KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut KPU-W;
- b. Zona Pelabuhan yang selanjutnya disebut KPU-PL;
- c. Zona Pertambangan yang selanjutnya disebut KPU-TB;
- d. Zona Perikanan tangkap yang selanjutnya disebut KPU-PT;
- e. Zona Perikanan budidaya yang selanjutnya disebut KPU-BD;
- f. Zona Pergaraman yang selanjutnya disebut KPU-GR; dan
- g. Zona Energi yang selanjutnya disebut KPU-EN.

#### Paragraf 2

#### Zona Pariwisata

#### Pasal 25

- (1) Zona KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:
  - a. sub Zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K; dan
  - b. sub Zona wisata olahraga air yang selanjutnya disebut KPU-W-OR.
- (2) Sub Zona KPU-W-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di perairan:
  - a. Daerah Kabupaten Bekasi:
    - 1. Pantai Muara Gembong (KPU-W-P3K-01);
    - 2. Pantai Mekar (KPU-W-P3K-02);
    - 3. Pantai Muara Bendera (KPU-W-P3K-03); dan
    - 4. Pantai Muara Beting (KPU-W-P3K-04).
  - b. Daerah Kabupaten Karawang:
    - 1. Pantai Tanjung Pakis (KPU-W-P3K-05);

2. Pantai Sedari (KPU-W-P3K-06);
  3. Pantai Samudera Baru (KPU-W-P3K-07);
  4. Pantai Pelangi (KPU-W-P3K-08);
  5. Pantai Pedes (KPU-W-P3K-09);
  6. Pantai Pisangan (KPU-W-P3K-10);
  7. Pantai Cilebar (KPU-W-P3K-11);
  8. Pantai Tanjung Baru (KPU-W-P3K-12);
  9. Pantai Cilamaya Kulon (KPU-W-P3K-13); dan
  10. Pantai Cilamaya Wetan (KPU-W-P3K-14).
- c. Daerah Kabupaten Subang:
1. Pantai Pondok Bali (KPU-W-P3K-15);
  2. Pantai Blanakan (KPU-W-P3K-16);
  3. Pantai Anggasari (KPU-W-P3K-17);
  4. Pantai Cirewang (KPU-W-P3K-18).
- d. Daerah Kabupaten Indramayu:
1. Pantai Sumur Adem (KPU-W-P3K-19);
  2. Pantai Eretan (KPU-W-P3K-20);
  3. Pulau Biawak (KPU-W-P3K-21)
  4. Pantai Karangsong (KPU-W-P3K-22);
  5. Pantai Lemah Abang (KPU-W-P3K-23);
  6. Pantai Balongan (KPU-W-P3K-24);
  7. Pantai Glayem (KPU-W-P3K-25);
  8. Pantai Tirta Maya (KPU-W-P3K-26); dan
  9. Pantai Juntinyuat (KPU-W-P3K-27).
- e. Daerah Kota Cirebon:
1. Pantai Kesenden (KPU-W-P3K-29); dan
  2. Pantai Kejawanan (KPU-W-P3K-30).
- f. Daerah Kabupaten Cirebon:
1. Pantai Jadimulya (KPU-W-P3K-28) dan
  2. Pantai Gebang (KPU-W-P3K-31);
- g. Daerah Kabupaten Sukabumi:
1. Pantai Cibangban (KPU-W-P3K-32);
  2. Pantai Cisolok (KPU-W-P3K-33);
  3. Pantai Citepus (KPU-W-P3K-34);
  4. Pantai Cimaja (KPU-W-P3K-35);
  5. Pantai Sukawayana (KPU-W-P3K-36);
  6. Pantai Cikembang (KPU-W-P3K-37);
  7. Pantai Palabuhan Ratu (KPU-W-P3K-38);
  8. Pantai Loji (KPU-W-P3K-39);

9. Pantai Sangrawayang (KPU-W-P3K-40);
  10. Pantai Karang Hawu (KPU-W-P3K-41);
  11. Pantai Ciletuh (KPU-W-P3K-42);
  12. Pantai Cibuaya (KPU-W-P3K-43);
  13. Pantai Pangumbahan (KPU-W-P3K-44);
  14. Pantai Ujunggenteng (KPU-W-P3K-45); dan
  15. Pantai Minajaya (KPU-W-P3K-46).
- h. Daerah Kabupaten Cianjur:
1. Pantai Sinarlaut (KPU-W-P3K-47);
  2. Pantai Mekarjati (KPU-W-P3K-48);
  3. Pantai Lugina (KPU-W-P3K-49);
  4. Pantai Karang Potong (KPU-W-P3K-50);
  5. Pantai Apra (KPU-W-P3K-51);
  6. Pantai Ciwidig (KPU-W-P3K-52);
  7. Pantai Jayanti (KPU-W-P3K-53); dan
  8. Pantai Batukukumbung (KPU-W-P3K-54).
- i. Daerah Kabupaten Garut:
1. Pantai Cidora (KPU-W-P3K-55);
  2. Pantai Cisewu (KPU-W-P3K-56);
  3. Pantai Rancabuaya (KPU-W-P3K-57);
  4. Pantai Bungbulang (KPU-W-P3K-58);
  5. Pantai Cicalobak (KPU-W-P3K-59);
  6. Pantai Mekarmukti (KPU-W-P3K-60);
  7. Pantai Cijayana (KPU-W-P3K-61);
  8. Pantai Santolo (KPU-W-P3K-62);
  9. Pantai Sayang Heulang (KPU-W-P3K-63);
  10. Pantai Cilauteureun (KPU-W-P3K-64); dan
  11. Pantai Cijeruk (KPU-W-P3K-65).
- j. Daerah Kabupaten Tasikmalaya:
1. Pantai Karang Tawulan (KPU-W-P3K-66)
  2. Pantai Cipatujah (KPU-W-P3K-67); dan
  3. Pantai Pamayangsari (KPU-W-P3K-68).
- k. Daerah Kabupaten Pangandaran:
1. Pantai Madasari (KPU-W-P3K-69);
  2. Pantai Batu Karas (KPU-W-P3K-70);
  3. Pantai Cijulang (KPU-W-P3K-71);
  4. Pantai Parigi / Batu Hiu (KPU-W-P3K-72);
  5. Pantai Karang Tirta (KPU-W-P3K-73);
  6. Pantai Barat Pangandaran (KPU-W-P3K-74);
  7. Pantai Timur Pangandaran (KPU-W-P3K-75);

8. Pantai Lembah Putri (KPU-W-P3K-76);
  9. Pantai Karang Nini (KPU-W-P3K-77); dan
  10. Pantai Karapyak (KPU-W-P3K-78).
- (3) Sub Zona KPU-W-OR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di perairan:
- a. Daerah Kabupaten Sukabumi: Pantai Cimaja (KPU-W-OR-01); Pantai Palabuhan Ratu (KPU-W-OR-02); dan
  - b. Daerah Kabupaten Pangandaran: Pantai Batu Karas (KPU-W-OR-03).

### Paragraf 3

#### Zona Pelabuhan

#### Pasal 26

- (1) KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
- a. Sub Zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK; dan
  - b. Sub Zona Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-WKOPP.
- (2) Sub Zona DLKr dan DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pelabuhan laut yang melayani angkutan laut;
  - b. Pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan;
  - c. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS); dan
  - d. Terminal Khusus.
- (3) Sub Zona WKOPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Nusantara yang selanjutnya disebut PPN;
  - b. Pelabuhan Perikanan Pantai yang selanjutnya disebut PPP; dan
  - c. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut PPI.

#### Pasal 27

- (1) Pelabuhan laut yang melayani angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Pelabuhan Utama yang selanjutnya disebut PU;
  - b. Pelabuhan Pengumpul yang selanjutnya disebut PP;
  - c. Pelabuhan Pengumpan Regional yang selanjutnya disebut PR; dan
  - d. Pelabuhan Pengumpan Lokal yang selanjutnya disebut PL.
- (2) PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di

- perairan Daerah Kabupaten Subang yaitu Pelabuhan Patimban (KPU-PL-DLK-02).
- (3) PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di perairan Daerah Kota Cirebon yaitu Pelabuhan Cirebon (KPU-PL-DLK-04).
- (4) PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di perairan:
- a. Daerah Kabupaten Sukabumi yaitu Pelabuhan Palabuhan Ratu (KPU-PL-DLK-05); dan
  - b. Daerah Kabupaten Pangandaran yaitu Pelabuhan Bojong Salawe (KPU-PL-DLK-07).
- (5) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di perairan:
- a. Daerah Kabupaten Bekasi: Pelabuhan Tarumajaya (KPU-PL-DLK-01); dan
  - b. Daerah Kabupaten Sukabumi: Pelabuhan Teluk Palangpang (KPU-PL-DLK-06).

#### Pasal 28

- (1) Pelabuhan Laut yang melayani angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b terdapat di perairan:
- a. Daerah Kabupaten Indramayu: Pelabuhan Penyebrangan Tirtamaya (KPU-PL-DLK-03); dan
  - b. Daerah Kabupaten Pangandaran: Pelabuhan Penyebrangan Majingklak (KPU-PL-DLK-08).
- (2) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d terdapat di perairan Daerah Kabupaten Sukabumi (KPU-PL-DLK-09) dan perairan Daerah Kabupaten Cianjur (KPU-PL-DLK-10).

#### Pasal 29

- (1) PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a terdapat di perairan:
- a. Kota Cirebon: PPN Kejawan (KPU-PL-WKO-01); dan
  - b. Kabupaten Sukabumi: PPN Palabuhanratu (KPU-PL-WKO-02).
- (2) PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b terdapat di perairan:
- a. Daerah Kabupaten Indramayu: PPP Eretan Wetan (KPU-PL-WKO-03);
  - b. Daerah Kabupaten Cirebon: PPP Bondet (KPU-PL-WKO-04); dan
  - c. Daerah Kabupaten Garut: PPP Cilauteureun (KPU-PL-WKO - 05).
- (3) PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c terdapat di perairan:
- a. Daerah Kabupaten Bekasi: PPI Paljaya (KPU-PL-WKO-06),

- PPI Muara Bendera (KPU-PL-WKO-07), PPI Muara Jaya (KPU-PL-WKO-08);
- b. Daerah Kabupaten Karawang: PPI Tanjung Pakis (KPU-PL-WKO-09), PPI Sedari (KPU-PL-WKO-10), PPI Cemara (KPU-PL-WKO-11), PPI Sungai Buntu (KPU-PL-WKO-12); PPI Pasir Putih (KPU-PL-WKO-13), PPI Tangkolak (KPU-PL-WKO-14);
  - c. Daerah Kabupaten Subang: PPI Rawameneng (KPU-PL-WKO-15), PPI Mayangan (KPU-PL-WKO-16), PPI Genteng (KPU-PL-WKO-17);
  - d. Daerah Kabupaten Indramayu: PPI Ujung Gebang (KPU-PL-WKO-18), PPI Sukahaji (KPU-PL-WKO-19), PPI Eretan Kulon (KPU-PL-WKO-20), PPI Majakerta (KPU-PL-WKO-21), PPI Lombang (KPU-PL-WKO-22), PPI Glayem (KPU-PL-WKO-23), PPI Limbangan (KPU-PL-WKO-24), PPI Dadap (KPU-PL-WKO-25); PPI Krangsong (KPU-PL-WKO-26)
  - e. Daerah Kabupaten Cirebon: PPI Mundu Pesisir (KPU-PL-WKO-27), PPI Bandengan (KPU-PL-WKO-28), PPI Gebang Mekar (KPU-PL-WKO-31), PPI Ambulu (KPU-PL-WKO-32);
  - f. Daerah Kota Cirebon: PPI Pesisir (KPU-PL-WKO-29), PPI Cangkol (KPU-PL-WKO-30);
  - g. Daerah Kabupaten Sukabumi: PPI Cikembang (KPU-PL-WKO-33), PPI Cibangban (KPU-PL-WKO-34), PPI Cisolok (KPU-PL-WKO-35), PPI Cikembang (KPU-PL-WKO-36), PPI Loji (KPU-PL-WKO-37), PPI Ciwaru (KPU-PL-WKO-38), Kalapa Condong (KPU-PL-WKO-39), PPI Ujung Genteng (KPU-PL-WKO-40), PPI Mina Jaya (KPU-PL-WKO-41);
  - h. Daerah Kabupaten Cianjur: PPI Cikakap (KPU-PL-WKO-42), PPI Jayanti (KPU-PL-WKO-43), PPI Cigebang (KPU-PL-WKO-44);
  - i. Daerah Kabupaten Garut: PPI Rancabuaya (KPU-PL-WKO-45), PPI Cicalobak (KPU-PL-WKO-46), PPI Cimari Muara (KPU-PL-WKO-47), PPI Cijeruk (KPU-PL-WKO-48), PPI Sancang (KPU-PL-WKO-49);
  - j. Daerah Kabupaten Tasikmalaya: PPI Pamayangsari (KPU-PL-WKO-50), PPI Nusa Cimanuk (KPU-PL-WKO-51); dan
  - k. Daerah Kabupaten Pangandaran: PPI Muara Gatah (KPU-PL-WKO-52), PPI Legok Jawa (KPU-PL-WKO-53), PPI Madasari (KPU-PL-WKO-54), PPI Batukaras (KPU-PL-WKO-55), PPI Nusawiru (KPU-PL-WKO-56), PPI Bojong Salawe (KPU-PL-WKO-57), PPI Cikidang (KPU-PL-WKO-58), PPI Palataragung (KPU-PL-WKO-59).

#### Paragraf 4

#### Zona Pertambangan

#### Pasal 30

- (1) Zona KPU-TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c

dijabarkan dalam sub Zona:

- a. sub Zona Pasir Besi yang selanjutnya disebut KPU-TB-PS; dan
  - b. Sub Zona Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut KPU-TB-MG.
- (2) Rencana Alokasi Ruang sub Zona KPU-TB-PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di perairan:
- a. Daerah Kabupaten Sukabumi: Cibitung Tegal Buleud (KPU-TB-PS-01); dan
  - b. Daerah Kabupaten Tasikmalaya: Cipatujah (KPU-TB-PS-02); Cikalong (KPU-TB-PS-03).
- (3) Rencana Alokasi Ruang sub Zona KPU-TB-MG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di perairan:
- a. Daerah Kabupaten Bekasi: (KPU-TB-MG-01); (KPU-TB-MG-02);
  - b. Daerah Kabupaten Karawang: (KPU-TB-MG-03); (KPU-TB-MG-04); (KPU-TB-MG-05); (KPU-TB-MG-06); (KPU-TB-MG-07); (KPU-TB-MG-08); (KPU-TB-MG-09); (KPU-TB-MG-10); (KPU-TB-MG-11); (KPU-TB-MG-12); (KPU-TB-MG-13); (KPU-TB-MG-14); (KPU-TB-MG-15); (KPU-TB-MG-16); (KPU-TB-MG-17); (KPU-TB-MG-18); (KPU-TB-MG-19); (KPU-TB-MG-20); (KPU-TB-MG-21); (KPU-TB-MG-22); (KPU-TB-MG-23); (KPU-TB-MG-24); (KPU-TB-MG-25); (KPU-TB-MG-26); (KPU-TB-MG-27); (KPU-TB-MG-28); (KPU-TB-MG-29); (KPU-TB-MG-30); (KPU-TB-MG-31); (KPU-TB-MG-32);
  - c. Daerah Kabupaten Subang: (KPU-TB-MG-33); (KPU-TB-MG-34); (KPU-TB-MG-35); (KPU-TB-MG-36); (KPU-TB-MG-37); (KPU-TB-MG-38); (KPU-TB-MG-39); (KPU-TB-MG-40); (KPU-TB-MG-41); (KPU-TB-MG-42); (KPU-TB-MG-43); (KPU-TB-MG-44); (KPU-TB-MG-45);
  - d. Daerah Kabupaten Indramayu : (KPU-TB-MG-46); (KPU-TB-MG-47); (KPU-TB-MG-48); (KPU-TB-MG-49); (KPU-TB-MG-50); (KPU-TB-MG-51); (KPU-TB-MG-52); (KPU-TB-MG-53); (KPU-TB-MG-54); (KPU-TB-MG-55); (KPU-TB-MG-56); (KPU-TB-MG-57); (KPU-TB-MG-58); (KPU-TB-MG-59); (KPU-TB-MG-60); (KPU-TB-MG-61); (KPU-TB-MG-62); (KPU-TB-MG-63); (KPU-TB-MG-64); (KPU-TB-MG-65); (KPU-TB-MG-66); (KPU-TB-MG-67); (KPU-TB-MG-68); (KPU-TB-MG-69); (KPU-TB-MG-70); (KPU-TB-MG-71); (KPU-TB-MG-72); (KPU-TB-MG-73); (KPU-TB-MG-74); (KPU-TB-MG-75); (KPU-TB-MG-76); (KPU-TB-MG-77); (KPU-TB-MG-78); (KPU-TB-MG-79); (KPU-TB-MG-80); (KPU-TB-MG-81); (KPU-TB-MG-82); (KPU-TB-MG-83); (KPU-TB-MG-84); (KPU-TB-MG-85); (KPU-TB-MG-86); (KPU-TB-MG-87); (KPU-TB-MG-88); (KPU-TB-MG-89); (KPU-TB-MG-90); (KPU-TB-MG-91); (KPU-TB-MG-92); dan
  - e. Daerah Kota Cirebon: (KPU-TB-MG-93); (KPU-TB-MG-94).
- (4) Rencana Alokasi Ruang sub Zona KPU-TB-MG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan penetapan lokasi atas Wilayah Kerja minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor minyak dan

gas bumi.

- (5) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada tahap eksploitasi.

#### Paragraf 5

#### Zona Perikanan Tangkap

#### Pasal 31

- (1) Zona KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:
- a. sub Zona Pelagis yang selanjutnya disebut KPU-PT-P; dan
  - b. sub Zona Pelagis dan Demersal yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD.
- (2) Rencana Alokasi Ruang Sub Zona KPU-PT-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di perairan:
- a. Daerah Kabupaten Bekasi: (KPU-PT-P-01); (KPU-PT-P-02); (KPU-PT-P-03); (KPU-PT-P-04); (KPU-PT-P-05); (KPU-PT-P-06); (KPU-PT-P-07); (KPU-PT-P-08); (KPU-PT-PD-09);
  - b. Kabupaten Karawang: (KPU-PT-PD-10); (KPU-PT-P-11); (KPU-PT-P-12); (KPU-PT-P-13); (KPU-PT-P-14); (KPU-PT-P-15); (KPU-PT-P-16); (KPU-PT-P-17);
  - c. Daerah Kabupaten Subang: (KPU-PT-P-18); (KPU-PT-P-19);
  - d. Daerah Kabupaten Indramayu: (KPU-PT-P-20); (KPU-PT-P-21);
  - e. Daerah Kabupaten Cirebon: (KPU-PT-P-22); (KPU-PT-P-24);
  - f. Daerah Kota Cirebon: (KPU-PT-P-23);
  - g. Daerah Kabupaten Sukabumi: (KPU-PT-P-25); (KPU-PT-P-26);
  - h. Daerah Kabupaten Cianjur: (KPU-PT-P-27); (KPU-PT-P-28);
  - i. Daerah Kabupaten Garut: (KPU-PT-P-29); (KPU-PT-P-30);
  - j. Daerah Kabupaten Tasikmalaya: (KPU-PT-P-31); dan
  - k. Daerah Kabupaten Pangandaran: (KPU-PT-P-32); (KPU-PT-P-33).
- (3) Rencana Alokasi Ruang Sub Zona KPU-PT-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di perairan:
- a. Daerah Kabupaten Bekasi: (KPU-PT-PD-01); (KPU-PT-PD-02); (KPU-PT-PD-03); (KPU-PT-PD-04);
  - b. Daerah Kabupaten Karawang: (KPU-PT-PD-05); (KPU-PT-PD-06);
  - c. Daerah Kabupaten Subang: (KPU-PT-PD-07);
  - d. Daerah Kabupaten Indramayu: (KPU-PT-PD-08);
  - e. Daerah Kabupaten Cirebon: (KPU-PT-PD-09); (KPU-PT-PD-12)
  - f. Daerah Kota Cirebon: (KPU-PT-PD-10); (KPU-PT-PD-11)
  - g. Daerah Kabupaten Sukabumi: (KPU-PT-PD-13); (KPU-PT-PD-14); (KPU-PT-PD-15);
  - h. Daerah Kabupaten Cianjur: (KPU-PT-PD-16); (KPU-PT-PD-17);
  - i. Daerah Kabupaten Garut: (KPU-PT-PD-18);

- j. Daerah Kabupaten Tasikmalaya: (KPU-PT-PD-19); dan
- k. Daerah Kabupaten Pangandaran: (KPU-PT-PD-20); (KPU-PT-PD-21); (KPU-PT-PD-22).

#### Paragraf 6

#### Zona Perikanan Budidaya

#### Pasal 32

- (1) Zona KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e terdiri atas Sub Zona Budidaya Laut yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL;
- (2) Rencana alokasi ruang sub Zona KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di perairan:
  - a. Daerah Kabupaten Bekasi: Muara Gembong (KPU-BD-BL-01);
  - b. Daerah Kabupaten Subang:
    - 1. Blanakan (KPU-BD-BL-02);
    - 2. Legon Kulon (KPU-BD-BL-03); dan
    - 3. Pusakanegara (KPU-BD-BL-04).
  - c. Daerah Kabupaten Cirebon:
    - 1. Kapetakan, Suranenggala (KPU-BD-BL-05);
    - 2. Gunung Jati (KPU-BD-BL-06); dan
    - 3. Gebang (KPU-BD-BL-07);
  - d. Daerah Kabupaten Sukabumi:
    - 1. Cikakak, Cisolok, Palabuhan Ratu (KPU-BD-BL-08);
    - 2. Simpenan, Ciemas (KPU-BD-BL-09); dan
    - 3. Ciracap (KPU-BD-BL-10).
  - e. Daerah Kabupaten Garut: Cikelet (KPU-BD-BL-11); dan
  - f. Daerah Kabupaten Pangandaran: KJA *Offshore* Pangandaran (KPU-BD-BL-12).

#### Paragraf 7

#### Zona Pergaraman

#### Pasal 33

- (1) Zona KPU-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f terdiri atas sub zona pergaraman yang selanjutnya disebut KPU-GR;
- (2) Rencana alokasi ruang Zona KPU-GR meliputi:
  - a. Daerah Kabupaten Karawang: Cilebar, Tempuran, Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan (KPU-GR-01);
  - b. Daerah Kabupaten Indramayu: Losarang, Kandanghaur, Cantigi (KPU-GR-02);
  - c. Daerah Kabupaten Cirebon: Kapetakan, Suranenggala, Gunung Jati (KPU-GR-03); Astanajapura, (KPU-GR-04); dan
  - d. Daerah Kabupaten Sukabumi: Cibitung dan Tegal Buleud (KPU-GR-05).

Paragraf 8  
Zona Energi  
Pasal 34

- (1) Zona KPU-EN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g meliputi:
  - a. sub Zona Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang selanjutnya disebut KPU-EN-PLTU; dan
  - b. sub Zona Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) yang selanjutnya disebut KPU-EN-PLTGU.
- (2) Rencana Alokasi Ruang KPU-EN-PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di perairan:
  - a. Daerah Kabupaten Indramayu: Sukra (KPU-EN-PLTU-01); Balongan (KPU-EN-PLTU-02);
  - b. Daerah Kabupaten Cirebon: Mundu (KPU-EN-PLTU-03), Astanajapura (KPU-EN-PLTU-04); Pangenan (KPU-EN-PLTU-05); dan
  - c. Daerah Kabupaten Sukabumi: Palabuhanratu, Simpenan (KPU-EN-PLTU-06).
- (3) Rencana alokasi ruang KPU-EN-PLTGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di perairan:
  - a. Daerah Kabupaten Bekasi: Tarumajaya, Babelan (KPU-EN-PLTGU-01); dan
  - b. Daerah Kabupaten Karawang: Cilamaya Wetan (KPU-EN-PLTGU-02).

Bagian Ketiga  
Kawasan Konservasi

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 35

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dikategorikan atas:
  - a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang selanjutnya disebut KK-KKP3K;
  - b. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disebut KK-KKP; dan
  - c. Kawasan Konservasi Maritim, yang selanjutnya disebut KK-KKM.
- (2) Selain kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kawasan Konservasi juga meliputi kawasan lindung lainnya yang selanjutnya disebut KK-KL sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

## Pasal 36

- (1) Rencana Alokasi Ruang KK-KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdapat di perairan:
  - a. Daerah Kabupaten Bekasi: Kawasan Konservasi Mangrove Muara Gembong (KK-KKP3K-01);
  - b. Daerah Kabupaten Sukabumi:
    1. Suaka Pulau Kecil Geopark Ciletuh (KK-KKP3K-02);
    2. Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan (KK-KKP3K-03); dan
  - c. Daerah Kabupaten Tasikmalaya: Suaka Pesisir Pamayang (KK-KKP3K-04).
- (2) Penjabaran Zona dalam KK-KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3

## Kawasan Konservasi Perairan

## Pasal 37

- (1) Rencana Alokasi Ruang KK-KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b terdapat di perairan:
  - a. Daerah Kabupaten Subang: Suaka Alam Perairan Blanakan (KK-KKP-01);
  - b. Daerah Kabupaten Indramayu:
    1. Suaka Alam Perairan Eretan (KK-KKP-02);
    2. Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Indramayu (Pulau Biawak) (KK-KKP-03)
  - c. Daerah Kabupaten Sukabumi:
    1. Kawasan Konservasi Mangrove Ciemas (KK-KKP-04);
    2. Kawasan Konservasi Mangrove Cibitung (KK-KKP-05);
  - d. Daerah Kabupaten Pangandaran: Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pangandaran (KK-KKP-06).
- (2) Penjabaran Zona dalam KK-KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 4

## Kawasan Konservasi Maritim

## Pasal 38

- (1) Rencana Alokasi Ruang KK-KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c terdapat di perairan:
  - a. Daerah Kabupaten Karawang : Karang Temiyang (KK-KKM-01); Karang Sendulang (KK-KKM-02); Karang Kapalán (KK-KKM-03); dan
  - b. Kabupaten Subang: Karang Bui (KK-KKM-04).

- (2) Penjabaran Zona dalam KK-KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Lindung Lainnya

#### Pasal 39

- (1) Rencana Alokasi Ruang KK-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) meliputi:
- a. Daerah Kabupaten Garut: Cagar Alam Laut Leuweung Sancang (KK-KL-01);
  - b. Daerah Kabupaten Pangandaran: Cagar Alam Laut Pangandaran (KK-KL-02); dan
  - c. Daerah Kabupaten Tasikmalaya: Suaka Margasatwa Sindang Kerta (KK-KL-03).
- (2) Penjabaran Zona dalam KK-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Kawasan Strategis Nasional Tertentu

#### Pasal 40

- (1) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri dari Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT).
- (2) PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di perairan Provinsi Jawa Barat, meliputi:
- a. Pulau Batu Kolotok di Kabupaten Tasikmalaya (KSNT-PPKT-01); dan
  - b. Pulau Nusamanuk di Kabupaten Tasikmalaya (KSNT-PPKT-02).
- (3) Arahana pemanfaatan dan pengalokasian ruang sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Kawasan Strategis Nasional

#### Pasal 41

- (1) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), meliputi:
- a. Kawasan Strategis Nasional untuk kepentingan pertahanan negara yang selanjutnya disebut KSN-PK;
  - b. Kawasan Strategis Nasional untuk kepentingan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut KSN-KP; dan
  - c. Kawasan Strategis Nasional untuk kepentingan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut KSN-LH.
- (2) KSN-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

meliputi:

- a. Daerah Kabupaten Indramayu (Eretan): daerah latihan pendaratan militer (KSN-PK-01);
  - b. Daerah Kabupaten Cirebon: Daerah pembuangan amunisi (KSN-PK-02); dan
  - c. Daerah Kabupaten Sukabumi: Daerah Latihan Militer (KSN-PK-03).
- (3) KSN-KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: KSN-KP Jabodetabekpunjur di perairan Daerah Kabupaten Bekasi (KSN-KP-01).
- (4) KSN-LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. KSN Pacangsanak (Pangandaran Kalipucang Sagara Anakan Nusa Kambangan) (KSN-LH-01).

#### Bagian Keenam

Alur Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan yang selanjutnya disebut AL-APP;
- b. Pipa Bawah Laut yang selanjutnya disebut AL-APK-GM;
- c. Kabel Bawah Laut yang selanjutnya disebut AL-APK-KT; dan
- d. Migrasi Biota Laut yang selanjutnya disebut AL-MB.

Paragraf 2

Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan

Pasal 43

AL-APP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:

- a. Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Internasional yang selanjutnya disebut AL-APP-I;
- b. Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Nasional yang selanjutnya disebut AL-APP-N; dan
- c. Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional yang selanjutnya disebut AL-APP-R.

Pasal 44

- (1) AL-APP-I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi:
- a. jaringan pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional; dan
  - b. jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dengan

pelabuhan internasional di negara lain.

- (2) AL-APP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di sepanjang perairan utara Jawa Barat menuju dan keluar Pelabuhan Patimban (AL-APP-I-01).
- (3) AL-APP-N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdapat di:
- a. Utara perairan Daerah Kabupaten Bekasi: (AL-APP-N-01); (AL-APP-N-02); (AL-APP-N-03); (AL-APP-N-04); (AL-APP-N-05); (AL-APP-N-06); (AL-APP-N-07); (AL-APP-N-08); (AL-APP-N-09); (AL-APP-N-10);
  - b. Sepanjang perairan utara Daerah Kabupaten Bekasi hingga Daerah Kabupaten Karawang: (AL-APP-N-11); (AL-APP-N-12); (AL-APP-N-13); (AL-APP-N-14); (AL-APP-N-18); (AL-APP-N-19);
  - c. Pelabuhan Tanjung Pakis, Daerah Kabupaten Karawang: (AL-APP-N-15); (AL-APP-N-16); (AL-APP-N-17);
  - d. Pelabuhan Kejawanon Daerah Kota Cirebon: (AL-APP-N-20); (AL-APP-N-21);
  - e. Pelabuhan Palabuhanratu: (AL-APP-N-22); (AL-APP-N-23);
  - f. Perairan Pangandaran: (AL-APP-N-24); (AL-APP-N-26); dan
  - g. Pelabuhan Bojong Salawe: (AL-APP-N-25).
- (4) AL-APP-R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c terdapat di:
1. Perairan Bekasi: (AL-APP-R-01); (AL-APP-R-02);
  2. PPI Muara, Cilamaya Wetan: (AL-APP-R-03);
  3. PPI Genteng Pusakanagara: (AL-APP-R-04);
  4. Pelabuhan Karangsong: (AL-APP-R-05); (AL-APP-R-06);
  5. PPI Cangkol, Lemahwungkuk: (AL-APP-R-07); (AL-APP-R-08);
  6. Perairan Sukabumi: (AL-APP-R-09); (AL-APP-R-10); (AL-APP-R-11); (AL-APP-R-12); (AL-APP-R-13); (AL-APP-R-14); (AL-APP-R-15); (AL-APP-R-16); (AL-APP-R-17); (AL-APP-R-18); (AL-APP-R-19); (AL-APP-R-20); (AL-APP-R-21); (AL-APP-R-22); (AL-APP-R-23); (AL-APP-R-24); dan
  7. PPI Cikidang Pangandaran: (AL-APP-R-25); dan (AL-APP-R-26).

### Paragraf 3

#### Pipa Bawah Laut

#### Pasal 45

- (1) AL-APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri atas pipa bawah laut untuk minyak bumi dan gas bumi yang selanjutnya disebut AL-APK-GM.
- (2) AL-APK-GM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Daerah Kabupaten Bekasi: (AL-APK-GM-01); (AL-APK-GM-02); (AL-APK-GM-03); (AL-APK-GM-04); (AL-APK-GM-05); (AL-APK-GM-06);
  - b. Daerah Kabupaten Karawang: (AL-APK-GM-07); (AL-APK-GM-08); (AL-APK-GM-09); (AL-APK-GM-10); (AL-APK-GM-11);

- (AL-APK-GM-12);
- c. Daerah Kabupaten Subang: (AL-APK-GM-13); (AL-APK-GM-14); (AL-APK-GM-15); (AL-APK-GM-16);
- d. Daerah Kabupaten Indramayu: (AL-APK-GM-17) (AL-APK-GM-18); (AL-APK-GM-19); (AL-APK-GM-20); dan
- e. Daerah Kota Cirebon: (AL-APK-GM-21).

#### Paragraf 4

#### Kabel Bawah Laut

#### Pasal 46

- (1) AL-APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, meliputi kabel telekomunikasi bawah laut yang selanjutnya disebut AL-APK-KT.
- (2) AL-APK-KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di perairan:
- a. Daerah Kabupaten Bekasi: (AL-APK-KT-01); (AL-APK-KT-02); (AL-APK-KT-03); (AL-APK-KT-04); (AL-APK-KT-06);
  - b. Daerah Kabupaten Karawang: SKKL JASUKA di Tanjung Pakis ke arah Tanjung Pandan (AL-APK-KT-05); (AL-APK-KT-07); (AL-APK-KT-08); (AL-APK-KT-09); (AL-APK-KT-10); (AL-APK-KT-11);
  - c. Daerah Kabupaten Indramayu: (AL-APK-KT-12); (AL-APK-KT-13); dan
  - d. Daerah Kabupaten Cirebon: (AL-APK-KT-14); (AL-APK-KT-15).

#### Paragraf 5

#### Migrasi Biota Laut

#### Pasal 47

- (1) Rencana alokasi ruang AL-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, meliputi:
- a. migrasi mamalia laut yaitu migrasi hiu paus dan parimanta yang selanjutnya disebut AL-MB-M;
  - b. migrasi ikan tertentu yaitu migrasi ikan sidat yang selanjutnya disebut AL-MB-I; dan
  - c. migrasi penyu yang selanjutnya disebut AL-MB-P.
- (2) AL-MB-M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di perairan:
- a. Daerah Kabupaten Karawang: (AL-MB-M-01); dan
  - b. Daerah Kabupaten Indramayu: perairan Pulau Biawak (AL-MB-M-02).
- (3) AL-MB-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di perairan Sukabumi: (AL-MB-I-01); (AL-MB-I-02); (AL-MB-I-03); (AL-MB-I-04); (AL-MB-I-05); (AL-MB-I-06); (AL-MB-I-07); (AL-MB-I-08).
- (4) AL-MB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di perairan:
- a. Daerah Kabupaten Sukabumi: Ciracap dan Pangumbahan Sukabumi (AL-MB-P-01); (AL-MB-P-02);

- b. Daerah Kabupaten Cianjur: (AL-MB-P-03);
- c. Daerah Kabupaten Tasikmalaya: perairan Pamayang (AL-MB-P-04); dan
- d. Daerah Kabupaten Pangandaran: perairan Legok Jawa (AL-MB-P-05); perairan Cimerak (AL-MB-P-06); perairan Batu Hiu (AL-MB-P-07); dan (AL-MB-P-08).

#### BAB IV

#### PENGATURAN PEMANFAATAN RUANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 48

- (1) Pemanfaatan ruang diarahkan untuk:
  - a. meningkatkan pendapatan dan perekonomian Daerah Provinsi;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan; dan
  - c. menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemanfaatan kawasan/Zona/sub Zona terdiri atas:
  - a. penjelasan/deskripsi/definisi Alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan dalam rencana Alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - b. ketentuan umum terhadap:
    - 1. kegiatan yang diperbolehkan;
    - 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
    - 3. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin;
  - c. ketentuan mengenai prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
  - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, berupa Kawasan Konservasi, KSNT, dan KSN.
- (3) Dikecualikan dari rencana Alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap KSNT.
- (4) Kegiatan yang diperbolehkan pada ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan yang tidak mempunyai pengaruh dan dampak, sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.
- (5) Kegiatan yang tidak diperbolehkan pada ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada di sekitarnya.
- (6) Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin pada

ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan yang diizinkan pada suatu ruang, tetapi mempunyai pembatasan.

## Bagian Kedua

### Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pemanfaatan Umum

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 49

- (1) Pemanfaatan ruang pada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:
  - a. pemanfaatan Zona KPU-W;
  - b. pemanfaatan Zona KPU-PL;
  - c. pemanfaatan zona KPU-TB;
  - d. pemanfaatan Zona KPU-PT;
  - e. pemanfaatan Zona KPU-BD;
  - f. pemanfaatan Zona KPU-GR; dan
  - g. pemanfaatan Zona KPU-EN.
- (2) Pemanfaatan pada Zona KPU-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. pemanfaatan ruang pada sub Zona KPU-W-P3K; dan
  - b. pemanfaatan ruang pada sub Zona KPU-W-OR.
- (3) Pemanfaatan pada Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang pada sub Zona KPU-PL-DLK; dan
  - b. pemanfaatan ruang pada sub Zona KPU-PL-WKO.
- (4) Pemanfaatan Zona KPU-TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang pada sub Zona KPU-TB-PS; dan
  - b. pemanfaatan ruang pada sub Zona KPU-TB-MG.
- (5) Pemanfaatan Zona KPU-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang pada sub Zona KPU-PT-P; dan
  - b. pemanfaatan ruang pada sub Zona KPU-PT-PD.
- (6) Pemanfaatan Zona KPU-BD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari pemanfaatan ruang pada sub zona KPU-BD-BL.
- (7) Pemanfaatan Zona KPU-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari pemanfaatan ruang pada sub Zona KPU-GR.
- (8) Pemanfaatan zona KPU-EN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang pada sub Zona KPU-EN-PLTU; dan

- b. pemanfaatan ruang pada sub Zona KPU-EN-PLTGU.

#### Paragraf 2

#### Pemanfaatan Ruang Zona Pariwisata

#### Pasal 50

Pengembangan Zona Pariwisata diarahkan untuk:

- a. pemanfaatan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai kegiatan Pariwisata yang tidak bertentangan dengan budaya dan kearifan tradisional setempat;
- b. pemantapan daya tarik wisata bahari untuk meningkatkan perekonomian wilayah dan menarik investasi sesuai dengan keberlanjutan konservasi perairan;
- c. pengembangan edukasi dan partisipasi untuk wisatawan dan masyarakat setempat dalam pemanfaatan kawasan pesisir sebagai daya tarik wisata;
- d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata bahari dengan aturan intensitas bangunan sesuai syarat; dan
- e. integrasi kegiatan wisata bahari dengan pemanfaatan ruang yang memiliki potensi strategis meliputi konservasi, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan angkutan.

#### Pasal 51

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan pada sub Zona KPU-W-P3K sebagai berikut:
  - a. wisata alam bentang laut;
  - b. wisata alam bawah laut;
  - c. wisata sejarah;
  - d. wisata budaya;
  - e. wisata olahraga air;
  - f. mitigasi bencana, dan kondisi darurat di laut;
  - g. perikanan tangkap tradisional; dan/atau
  - h. pendidikan dan penelitian.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada sub Zona KPU-W-P3K sebagai berikut:
  - a. pertambangan mineral;
  - b. pertambangan pasir laut; dan
  - c. pertambangan minyak dan gas bumi.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin pada sub Zona KPU-W-P3K sebagai berikut:
  - a. pelabuhan perikanan;
  - b. perikanan budidaya laut;
  - c. energi; dan
  - d. pembangunan bangunan pelindung pantai.

- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub Zona KPU-W-P3K sebagai berikut:
- a. transportasi;
  - b. air bersih;
  - c. akomodasi;
  - d. tanda batas zona;
  - e. tambat kapal/perahu;
  - f. tempat makan dan minum;
  - g. tempat belanja; dan
  - h. fasilitas umum lainnya.
- (5) Ketentuan khusus pada sub Zona KPU-W-P3K sebagai berikut:
- a. untuk perairan pantai diutamakan bagi kepentingan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan prasarana umum;
  - b. koefisien pemanfaatan perairan untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang bersifat menetap paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total keseluruhan zona pariwisata; dan
  - c. mitigasi bencana, berupa deteksi ketinggian gelombang air, deteksi tsunami, dan kecepatan angin.

#### Pasal 52

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan pada sub Zona KPU-W-OR sebagai berikut:
- a. wisata snorkling;
  - b. wisata *diving*;
  - c. wisata *surfing*;
  - d. mitigasi bencana, dan kondisi darurat di laut; dan
  - e. pendidikan dan penelitian.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada sub Zona KPU-W-OR sebagai berikut:
- a. perikanan tangkap di Zona Pariwisata;
  - b. pertambangan mineral;
  - c. pertambangan pasir laut;
  - d. alur transportasi;
  - e. pertambangan minyak dan gas bumi; dan
  - f. energi.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin pada sub Zona KPU-W-OR sebagai berikut:
- a. wisata panorama laut; dan
  - b. bangunan pelindung pantai.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub Zona KPU-W-OR sebagai berikut:

- a. transportasi;
  - b. air bersih;
  - c. akomodasi;
  - d. tanda batas zona; dan
  - e. fasilitas umum lainnya.
- (5) Ketentuan khusus pada sub Zona KPU-W-OR sebagai berikut:
- a. untuk perairan pantai diutamakan bagi kepentingan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan prasarana umum;
  - b. koefisien pemanfaatan perairan untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang bersifat menetap sebesar 40% (empat puluh persen) dari total keseluruhan zona pariwisata; dan
  - c. mitigasi bencana, berupa deteksi ketinggian gelombang air, deteksi tsunami, dan kecepatan angin.

### Paragraf 3

Pemanfaatan Ruang sub Zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)  
dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)

### Pasal 53

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan pada sub Zona KPU-PL-DLK sebagai berikut:
- a. penelitian dan pendidikan;
  - b. pengerukan alur pelabuhan;
  - c. pengembangan pelabuhan jangka panjang;
  - d. fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
  - e. pembangunan TUKS/tersus;
  - f. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar TUKS/tersus;
  - g. tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
  - h. tempat kapal mati; dan
  - i. keperluan darurat.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada sub Zona KPU-PL-DLK sebagai berikut:
- a. pertambangan panas bumi;
  - b. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
  - c. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
  - d. perikanan budidaya laut;

- e. pertambangan minyak bumi; dan
  - f. pertambangan gas bumi.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin pada sub Zona KPU-PL-DLK sebagai berikut:
- a. wisata sejarah;
  - b. wisata budaya;
  - c. permukiman;
  - d. wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
  - e. *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
  - f. pengerukan;
  - g. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
  - h. industri pengolahan ikan;
  - i. industri maritim;
  - j. fasilitas umum;
  - k. *dumping area*;
  - l. perdagangan dan jasa;
  - m. *pipetack pom* pelabuhan; dan
  - n. *loading dock*.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub Zona KPU-PL-DLK sebagai berikut:
- a. penahan gelombang (*break water*);
  - b. instalasi pengolahan air limbah;
  - c. desalinasi;
  - d. tembok penahan tanah (turap);
  - e. fasilitas tambat (dermaga dan jetty);
  - f. kolam pelabuhan;
  - g. alur pelayaran kapal perikanan dari dan ke pelabuhan perikanan;
  - h. sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP);
  - i. keperluan darurat;
  - j. kegiatan pemanduan;
  - k. tempat perbaikan kapal (*docking* atau *slipway*); dan
  - l. sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai.
- (5) Ketentuan khusus pada sub Zona KPU-PL-DLK dilaksanakan sebagai berikut:
- a. pembangunan Pelabuhan hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan untuk Pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial,

namun Badan Usaha Pelabuhan dapat juga melakukan kegiatan pembangunan pelabuhan dengan syarat harus berdasarkan konsesi dengan Otoritas Pelabuhan; dan

- b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan dan operasional pelabuhan yang bersangkutan.

#### Pasal 54

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan pada sub Zona KPU-PL-WKO sebagai berikut:
  - a. pendaratan hasil tangkapan perikanan;
  - b. pelaksanaan operasional kapal perikanan;
  - c. tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
  - d. perbekalan dan perbaikan kapal perikanan;
  - e. bongkar muat;
  - f. industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan, dan pengolahan dan pengawetan lainnya);
  - g. industri maritim (pembangunan kapal ikan);
  - h. uji coba kapal;
  - i. penempatan kapal mati; dan
  - j. pemasaran dan distribusi ikan;
  - k. penelitian; dan
  - l. jasa dan perdagangan.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada sub Zona KPU-PL-WKO sebagai berikut:
  - a. wisata olahraga air;
  - b. wisata bawah laut;
  - c. pertambangan panas bumi;
  - d. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
  - e. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan; dan/atau;
  - f. perikanan budidaya laut;
  - g. pertambangan mineral; dan
  - h. pertambangan pasir laut.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin pada sub Zona KPU-PL-WKO sebagai berikut:
  - a. wisata alam bentang laut;
  - b. wisata alam pantai/pesisir;
  - c. wisata sejarah;
  - d. wisata budaya;

- e. permukiman;
  - f. wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
  - g. *salvage* dan pekerjaan bawah air;
  - h. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan
  - i. industri pengolahan ikan;
  - j. industri maritim;
  - k. industri manufaktur;
  - l. energi;
  - m. fasilitas umum;
  - n. perdagangan dan jasa; dan
  - o. bangunan pelindung pantai.
- (4) Prasarana minimum dengan pemanfaatan ruang di sub Zona KPU-PL-WKO sebagai berikut:
- a. penahan gelombang (*break water*);
  - b. instalasi pengolahan air limbah;
  - c. air bersih (desalinasi);
  - d. tembok penahan tanah (turap);
  - e. fasilitas tambat (dermaga dan jetty);
  - f. kolam pelabuhan;
  - g. alur pelayaran kapal perikanan dari dan ke pelabuhan perikanan;
  - h. sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP);
  - i. keperluan darurat;
  - j. kegiatan pemanduan;
  - k. tempat perbaikan kapal (*docking* atau *slipway*); dan
  - l. penempatan kapal mati.
- (5) Ketentuan khusus pada sub Zona KPU-PL-WKO sebagai berikut:
- a. persyaratan pembangunan Pelabuhan, meliputi teknis, kelestarian lingkungan, dan Rencana Induk Kepelabuhanan;
  - b. kegiatan kepelabuhanan perikanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
  - c. kegiatan kepelabuhanan perikanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.

#### Paragraf 4

#### Pemanfaatan Ruang Zona Pertambangan

#### Pasal 55

Pemanfaatan ruang Zona Pertambangan diarahkan untuk:

- a. mendorong peningkatan nilai tambah barang tambang untuk ekspor;

- b. mendorong upaya pengendalian pemanfaatan kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil;
- c. mendorong penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. meningkatkan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan;
- e. mendukung keberlanjutan ekosistem di sekitar kawasan; dan
- f. mengembangkan alih teknologi penambangan bagi masyarakat di sekitar kawasan.

#### Pasal 56

- (1) Pemanfaatan ruang Zona Pertambangan pasir besi sebagai berikut:
  - a. pengembangan Zona Pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan fisik, lingkungan hayati, dan lingkungan sosial ekonomi budaya;
  - b. pengembangan Zona Pertambangan mewajibkan kepada setiap pelaku usaha pertambangan untuk memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Operasi Produksi, serta Izin Lingkungan yang berupa AMDAL atau UKL-UPL;
  - c. penerapan metode pengelolaan limbah hasil pertambangan pasir laut yang tepat guna;
  - d. pengembangan kegiatan penelitian dan teknologi pengolahan mineral tambang dalam rangka peningkatan nilai tambah terhadap produk-produk tambang; dan
  - e. pemantapan kerja sama dalam pengelolaan sumber daya pasir laut antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan pada sub Zona KPU-TB-PS sebagai berikut:
  - a. penelitian dan penyelidikan;
  - b. eksplorasi;
  - c. konstruksi;
  - d. pertambangan mineral;
  - e. perdagangan dan jasa
  - f. pembangunan tersus;
  - g. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar TUKS/tersus; dan; dan
  - h. rehabilitasi pasca tambang.
- (3) Kegiatan yang tidak diperbolehkan di sub Zona KPU-TB-PS sebagai berikut:
  - a. kawasan pelestarian alam;
  - b. kawasan suaka alam;

- c. kawasan konservasi/perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - d. melakukan kegiatan pertambangan di perairan dengan jarak kurang dari atau sama dengan 2 (dua) mil laut;
  - e. melakukan kegiatan pertambangan di perairan dengan kedalaman kurang dari atau sama dengan 10 meter;
  - f. sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP);
  - g. penggelaran pipa bawah laut;
  - h. penggelaran kabel bawah laut; dan
  - i. alur migrasi biota laut.
- (4) Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin pada sub Zona KPU-TB-PS sebagai berikut:
- a. kegiatan pelayaran;
  - b. wisata bahari;
  - c. perikanan tangkap tradisional; dan
  - d. pertambangan minyak bumi dan gas bumi.
- (5) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub Zona KPU-TB-PS sebagai berikut:
- a. memasang alat pantau produksi pada kapal yang telah didaftarkan; dan
  - b. pembangunan fasilitas aksesibilitas, pengelolaan, pelayanan, komunikasi dan informasi.
- (6) Ketentuan khusus pada sub Zona KPU-TB-PS dilaksanakan sebagai berikut:
- a. pada kawasan perikanan tradisional, pengusaha pasir laut wajib memperhatikan kepentingan nelayan tradisional yang memanfaatkan kawasan tersebut sebagai sumber mata pencahariannya;
  - b. wajib menyusun rencana pemeliharaan dan pemulihan lingkungan ekosistem pesisir dan laut;
  - c. melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi penambangan kepada Gubernur dan/atau instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan;
  - d. wajib memelihara kelestarian fungsi ekosistem laut serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan ekosistem laut yang ditimbulkannya; dan
  - e. wajib menyusun rencana pemberdayaan masyarakat pesisir.

#### Pasal 57

- (1) Pemanfaatan ruang Zona Pertambangan minyak bumi dan gas bumi (migas) sebagai berikut:
- a. dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan fisik, lingkungan hayati, dan lingkungan sosial ekonomi budaya;
  - b. mewajibkan kepada setiap pelaku usaha pertambangan migas untuk memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Operasi Produksi, serta Izin Lingkungan

- yang berupa AMDAL atau UKL-UPL;
- c. menerapkan metode pengelolaan limbah hasil pertambangan migas yang tepat guna dan ramah lingkungan;
  - d. mengembangkan kegiatan penelitian dan teknologi pengolahan migas dalam rangka peningkatan nilai tambah terhadap produk-produk migas; dan
  - e. memantapkan kerja sama dalam pengelolaan sumber daya migas antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pemanfaatan sub zona KPU-TB-MG dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Pemanfaatan Ruang Zona Perikanan Tangkap

#### Pasal 58

Pemanfaatan ruang zona Perikanan Tangkap diarahkan untuk:

- a. pengembangan Perikanan Tangkap yang berwawasan lingkungan;
- b. pengembangan Perikanan Tangkap sesuai daya dukung dan daya tampung; dan
- c. pengembangan Perikanan Tangkap dengan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.

#### Pasal 59

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan pada sub Zona KPU-PT-P sebagai berikut:
  - a. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestariannya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB);
  - b. Perikanan Tangkap dengan ukuran armada dibawah 30 *Gross Tone* (GT);
  - c. penggunaan alat tangkap yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
  - d. menangkap ikan ukuran layak tangkap; dan
  - e. menangkap ikan pada saat bukan musim kawin ikan-ikan tertentu.
- (2) Kegiatan yang tidak diperbolehkan di sub Zona KPU-PT-P sebagai berikut:
  - a. menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, potasium dan/atau bahan beracun;
  - b. menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-

- pulau kecil;
  - c. menangkap ikan dengan ukuran kecil (tidak layak tangkap);
  - d. kegiatan pertambangan; dan
  - e. membuang sampah dan limbah.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin pada sub Zona KPU-PT-P sebagai berikut:
- a. penelitian dan pendidikan;
  - b. penempatan alat bantu penangkap ikan;
  - c. bioteknologi dan biofarmakologi;
  - d. pariwisata;
  - e. perikanan budidaya lepas pantai;
  - f. tersus/TUKS;
  - g. energi;
  - h. pembuangan material keruk (dumping area); dan
  - i. pemanfaatan air laut selain energi.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub Zona KPU-PT-P sebagai berikut:
- a. tempat pemasaran ikan;
  - b. alat tangkap ikan pelagis;
  - c. alat bantu penangkap ikan pelagis;
  - d. kapal penangkap ikan pelagis;
  - e. transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); dan
  - f. pangkalan pendaratan ikan/pelabuhan perikanan.
- (5) Ketentuan khusus pada sub Zona KPU-PT-P dilaksanakan sebagai berikut:
- a. menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
  - b. mengisi *log book* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. asangan rumpon harus diatur tempat dan waktunya, tidak boleh mengganggu alur pelayaran, tidak boleh pada saat ikan memijah atau bertelur, tidak boleh dipasang diperairan selat, tidak boleh terkonsentrasi satu tempat menyebabkan ikan tidak tersebar merata, terutama rumpon-rumpon yang dipasang tetap;
  - d. kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan tidak diatur sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); dan
  - e. untuk kapal penangkap ikan dalam satuan armada ditambah persyaratan berupa daftar kapal penangkap ikan, jenis alat penangkapan ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan berupa kapal

lampu.

#### Pasal 60

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan pada sub Zona KPU-PT-PD sebagai berikut:
  - a. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB);
  - b. penggunaan alat tangkap dan ukuran kapal yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
  - c. menangkap ikan ukuran layak tangkap; dan
  - d. menangkap ikan pada saat bukan musim kawin ikan-ikan tertentu.
- (2) Kegiatan yang tidak diperbolehkan di sub Zona KPU-PT-PD sebagai berikut:
  - a. pertambangan mineral; dan
  - b. pertambangan pasir laut.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin pada sub Zona KPU-PT-PD sebagai berikut:
  - a. penelitian dan pendidikan;
  - b. penempatan rumah ikan dan terumbu karang buatan;
  - c. pariwisata;
  - d. pertambangan minyak dan gas bumi;
  - e. industri pengolahan ikan;
  - f. industri maritim;
  - g. industri manufaktur;
  - h. industri biofarmakologi;
  - i. industri bioteknologi;
  - j. jasa/perdagangan;
  - k. energi;
  - l. tersus/TUKS;
  - m. fasilitas umum; dan/atau
  - n. pemanfaatan air laut selain energi.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub Zona KPU-PT-PD sebagai berikut:
  - a. tempat pemasaran ikan;
  - b. alat tangkap ikan pelagis dan demersal;
  - c. alat bantu penangkap ikan pelagis dan demersal;
  - d. kapal penangkap ikan ikan pelagis dan demersal;
  - e. transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); dan
  - f. pangkalan pendaratan ikan/pelabuhan perikanan.
- (5) Ketentuan khusus pada sub Zona KPU-PT-PD dilaksanakan sebagai berikut:

- a. menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- b. mengisi *log book* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemasangan rumpon diatur tempat dan waktunya, tidak mengganggu alur pelayaran, tidak saat ikan memijah atau bertelur, tidak dipasang diperairan selat, tidak terkonsentrasi pada satu tempat yang menyebabkan ikan tidak tersebar merata, terutama rumpon-rumpon yang dipasang tetap; dan
- d. kapal yang digunakan tidak melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*).

#### Paragraf 6

#### Pemanfaatan Ruang Zona Perikanan Budidaya

#### Pasal 61

Pemanfaatan ruang Zona Perikanan Budidaya diarahkan untuk:

- a. pengembangan perikanan budidaya yang berwawasan lingkungan;
- b. pengembangan perikanan budidaya yang mengintegrasikan antar sektor terkait;
- c. pengembangan perikanan budidaya yang berbasis teknologi budidaya; dan
- d. pengembangan perikanan yang mendorong kemandirian ekonomi lokal.

#### Pasal 62

(1) Kegiatan yang diperbolehkan pada sub Zona KPU-BD-BL sebagai berikut:

- a. memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol;
- b. menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- c. budidaya laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya;
- e. kegiatan masyarakat non nelayan yang tidak mempunyai akses untuk mengembangkan budidaya laut (marikultur);
- f. budidaya laut dengan teknologi tradisional, semi intensif, dan intensif; dan
- g. keramba jaring apung lepas pantai (*offshore*).

- (2) Kegiatan yang tidak diperbolehkan di sub Zona KPU-BD-BL sebagai berikut:
- a. menempatkan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
  - b. menangkap ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya laut;
  - c. pertambangan mineral, pasir laut dan migas; dan
  - d. alur pelayaran dan perlintasan.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin pada sub Zona KPU-BD-BL sebagai berikut:
- a. penelitian dan pendidikan;
  - b. usaha pembesaran ikan yang menggunakan teknologi super intensif;
  - c. penempatan rumah ikan dan terumbu karang buatan;
  - d. bioteknologi dan biofarmakologi;
  - e. pariwisata;
  - f. permukiman;
  - g. pelabuhan;
  - h. industri pengolahan ikan;
  - i. industri maritim;
  - j. jasa/perdagangan;
  - k. fasilitas umum; dan/atau
  - l. pemanfaatan air laut selain energi.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona KPU-BD-BL sebagai berikut:
- a. gudang pakan ikan, obat ikan, dan pupuk;
  - b. keramba jaring apung dan keramba jaring tancap;
  - c. perahu;
  - d. aerator; dan
  - e. jalan, pasar, listrik, air tawar dan telekomunikasi.
- (5) Ketentuan khusus pada sub zona KPU-BD-BL dilaksanakan sebagai berikut:
- a. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang;
  - b. koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya laut adalah 80%, dimana terdapat ruang sebesar 20% untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya; dan
  - c. pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit.

#### Paragraf 7

#### Pemanfaatan Ruang Zona Pergaraman

#### Pasal 63

Arahan pemanfaatan ruang Zona pergaraman sebagai berikut:

- a. aktivitas pergaraman dilakukan di wilayah daratan;

- b. di wilayah perairan hanya disediakan inlet yang berfungsi untuk mengalirkan air laut ke lokasi pertambangan garam; dan
- c. lokasi inlet diproteksi dari kegiatan lain yang berpotensi mencemari perairan.

#### Paragraf 8

#### Pemanfaatan Ruang Pada Zona Energi

#### Pasal 64

Arahan pemanfaatan ruang rencana Zona energi sebagai berikut:

- a. pengembangan usaha energi mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memiliki Izin Lingkungan berupa AMDAL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL);
- b. penerapan metode pengelolaan limbah yang tepat guna dan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak pencemaran; dan
- c. pemantapan kerjasama pengelolaan PLTU dan PLTGU antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya.

#### Pasal 65

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan pada sub Zona KPU-EN-PLTU sebagai berikut:
  - a. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus (TUKS/Tersus);
  - b. pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur kapal;
  - c. bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi, dan penunjang;
  - d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan;
  - e. pembangunan tersus;
  - f. pemanfaatan dan pengoperasian TUKS/Tersus; dan
  - g. pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Kegiatan yang tidak diperbolehkan di sub Zona KPU-EN-PLTU sebagai berikut:
  - a. perlindungan dan pelestarian habitat dan jenis ikan;
  - b. perikanan tangkap; dan
  - c. perikanan budidaya laut.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin pada sub Zona KPU-EN-PLTU sebagai berikut:
  - a. menggunakan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum kecuali dalam keadaan tertentu; dan
  - b. pengerukan alur pelayaran, saluran *intake* dan saluran pembuangan.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan

pemanfaatan ruang pada sub Zona KPU-EN-PLTU sebagai berikut:

- a. terminal untuk kepentingan sendiri/terminal khusus (TUKS/Tersus);
  - b. sarana bantu navigasi pelayaran;
  - c. akses masuk ke kawasan industri (jalan/jembatan/alur pelayaran);
  - d. fasilitas air pendingin (saluran/instalasi pengambilan air laut);
  - e. fasilitas desalinasi;
  - f. fasilitas sistem transportasi batu bara;
  
  - g. fasilitas air buangan dari fasilitas *flue gas desulphurization* (FGD) sistem *sea water scrubber* (saluran/instalasi pembuangan air limbah); dan
  - h. instalasi pengolahan air limbah dan persampahan.
- (5) Ketentuan khusus pada sub Zona KPU-EN-PLTU dilaksanakan sebagai berikut:
- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim;
  - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
  - c. memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan;
  - d. pengendalian terhadap pembuangan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal;
  - e. bertanggungjawab sepenuhnya atas operasional dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan; dan
  - f. menyampaikan laporan mengenai pencatatan produksi bulanan senyatanya, hasil analisa laboratorium, kadar parameter, debit air limbah harian, dan beban pencemaran air limbah kepada instansi terkait.

#### Pasal 66

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan pada sub Zona KPU-EN-PLTGU sebagai berikut:
- a. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar TUKS/Tersus;
  - b. pemanduan dan penundaan kapal kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur kapal;
  - c. bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi, dan penunjang;

- d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan;
  - e. pembangunan TUKS/tersus;
  - f. pemanfaatan dan pengoperasian TUKS/Tersus; dan
  - g. pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Kegiatan yang tidak diperbolehkan di sub Zona KPU-EN-PLTGU sebagai berikut:
- a. perlindungan dan pelestarian habitat dan jenis ikan
  - b. perikanan Tangkap; dan
  - c. perikanan Budidaya laut.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin pada sub zona KPU-EN-PLTGU sebagai berikut:
- a. pariwisata;
  - b. pemasangan instalasi bawah air; dan
  - c. menggunakan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum kecuali dalam keadaan tertentu.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub Zona KPU-EN-PLTGU sebagai berikut:
- a. terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS)/terminal khusus (Tersus);
  - b. sarana bantu navigasi pelayaran;
  - c. akses masuk ke kawasan industri (jalan/jembatan/alur pelayaran);
  - d. fasilitas air pendingin (saluran/instalasi pengambilan air laut);
  - e. fasilitas desalinasi;
  - f. fasilitas *Floating Storage and Regasification Unit* (FSRU);
  - g. fasilitas air buangan dari fasilitas *flue gas desulphurization* (FGD) sistem *sea water scrubber* (saluran/instalasi pembuangan air limbah); dan
  - h. instalasi pengolahan air limbah.
- (5) Ketentuan khusus pada sub Zona KPU-EN-PLTGU dilaksanakan sebagai berikut:
- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim;
  - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
  - c. memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan izin

- pembangunan yang diberikan;
- d. melengkapi terminal khusus dengan fasilitas penampungan limbah dan penampungan sampah;
  - e. bertanggungjawab sepenuhnya atas operasional dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan; dan
  - f. melaporkan kegiatan operasional secara rutin dan berkala.

### Bagian Ketiga

#### Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Konservasi

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 67

Pemanfaatan Kawasan Konservasi (KK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KK-KKP3K);
- b. pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan (KK-KKP);
- c. pemanfaatan Kawasan Konservasi Maritim (KK-KKM); dan
- d. pemanfaatan Kawasan Konservasi lainnya (KK-KL).

##### Paragraf 2

#### Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

##### Pasal 68

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan di KK-KKP3K sebagai berikut:
  - a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
  - b. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
  - c. perlindungan situs budaya/adat tradisional; dan
  - d. pembangunan infrastruktur/sarana prasarana.
- (2) Kegiatan yang tidak diperbolehkan di KK-KKP3K sebagai berikut:
  - a. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
  - b. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
  - c. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
  - d. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi

- kawasan;
- e. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - f. semua jenis kegiatan penambangan;
  - g. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
  - h. kegiatan membuang jangkar/berlabuh; dan
  - i. pembuangan sampah dan limbah.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin di KK-KKP3K sebagai berikut:
- a. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
  - b. wisata alam bentang laut;
  - c. wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - d. wisata alam bawah laut;
  - e. wisata budaya;
  - f. penangkapan ikan;
  - g. pembudidayaan ikan;
  - h. energi; dan/atau
  - i. fasilitas umum.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di KK-KKP3K sebagai berikut:
- a. pembangunan fasilitas aksesibilitas;
  - b. sarana dan prasarana pengelolaan;
  - c. sarana dan prasarana pelayanan; dan
  - d. sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.
- (5) Ketentuan khusus di KK-KKP3K dilaksanakan sebagai berikut:
- a. mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif;
  - b. meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan peserta didik tentang konservasi;
  - c. ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di kawasan ini;
  - d. penggunaan kapal berdasarkan ukurannya, jenis alat tangkap serta batasan jumlah pengambilan sumber daya ikan untuk melindungi keberlanjutan keanekaragaman sumber daya ikan; dan
  - e. memperhatikan jenis ikan yang dibudidayakan, jenis pakan, teknologi, jumlah unit serta daya dukung, dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.

## Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Konservasi Perairan

## Pasal 69

- (1) Pengembangan KK-KKP diarahkan untuk:
  - a. perlindungan terhadap habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
  - b. perlindungan ekosistem pesisir unik dan/atau rentan terhadap perubahan; dan
  - c. perlindungan situs budaya atau adat tradisional, penelitian, dan pendidikan.
- (2) Penentuan kegiatan sesuai arahan pengembangan KK-KKP yaitu:
  - a. kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona inti kawasan konservasi perairan adalah kegiatan penelitian dan pendidikan;
  - b. kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona pemanfaatan lainnya adalah kegiatan pariwisata alam perairan dan rekreasi, kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan;
  - c. kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan serta memiliki desain dan tata letak bangunan yang memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata, dan ekonomi;
  - d. kegiatan penelitian yang mendukung upaya pengelolaan KK-KKP yang efektif; dan
  - e. kegiatan pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan peserta didik tentang konservasi.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan di KK-KKP sebagai berikut:
  - a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
  - b. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
  - c. perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya pemulihan dan rehabilitasi ekosistemnya;
  - d. perlindungan situs budaya/adat tradisional;
  - e. kegiatan kepelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah;
  - f. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan; dan
  - g. rehabilitasi ekosistem.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan di KK-KKP sebagai berikut:
  - a. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
  - b. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
  - c. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;

- d. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan;
  - e. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - f. semua jenis kegiatan penambangan;
  - g. kegiatan menambang terumbu karang yang dapat menyebabkan abrasi;
  - h. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
  - i. kegiatan membuang jangkar/berlabuh; dan
  - j. pembuangan sampah dan limbah.
- (5) Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin di KK-KKP sebagai berikut:
- a. wisata alam bentang laut;
  - b. wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. wisata alam bawah laut;
  - d. wisata budaya;
  - e. penangkapan ikan;
  - f. pembudidayaan ikan;
  - g. energi; dan/atau
  - h. fasilitas umum.
- (6) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di KK-KKP sebagai berikut:
- a. sarana dan prasarana pengelolaan;
  - b. sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan;
  - c. sarana dan prasarana penelitian dan pendidikan; dan
  - d. sarana dan prasarana wisata alam.
- (7) Ketentuan khusus di KK-KKP dilaksanakan sebagai berikut:
- a. mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif;
  - b. meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan peserta didik tentang konservasi;
  - c. ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di kawasan ini;
  - d. penggunaan kapal berdasarkan ukurannya, jenis alat tangkap serta batasan jumlah pengambilan sumber daya ikan untuk melindungi keberlanjutan keanekaragaman sumber daya ikan; dan
  - e. memperhatikan jenis ikan yang dibudidayakan, jenis pakan, teknologi, jumlah unit serta daya dukung, dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.

## Paragraf 4

## Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Konservasi Maritim

## Pasal 70

- (1) Pengembangan K K - KKM diarahkan untuk perlindungan:
  - a. daerah adat maritim; dan
  - b. daerah perlindungan budaya maritim.
- (2) Penentuan kegiatan sesuai arahan pengembangan KK-KKM yaitu:
  - a. kegiatan untuk penguatan kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku;
  - b. menjaga aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan;
  - c. kegiatan konservasi dan pengelolaan tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus;
  - d. kegiatan perlindungan situs sejarah kemaritiman yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional; dan
  - e. tempat ritual keagamaan atau adat.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan di KK-KKM sebagai berikut:
  - a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
  - b. perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
  - c. perlindungan situs budaya; dan/atau
  - d. pendidikan.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan di KK-KKM sebagai berikut:
  - a. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
  - b. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
  - c. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
  - d. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan;
  - e. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - f. semua jenis kegiatan penambangan;
  - g. kegiatan menambang terumbu karang yang dapat menyebabkan abrasi;

- h. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
  - i. kegiatan membuang jangkar/berlabuh; dan
  - j. pembuangan sampah dan limbah.
- (5) Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin di KK-KKM sebagai berikut:
- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
  - b. pariwisata dan rekreasi; dan
  - c. penelitian dan pengembangan.
- (6) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di KK-KKM sebagai berikut:
- a. sarana dan prasarana pengelolaan;
  - b. sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan;
  - c. sarana dan prasarana penelitian dan pendidikan; dan
  - d. sarana dan prasarana wisata alam.
- (7) Ketentuan khusus di KK-KKM dilaksanakan sebagai berikut:
- a. mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi maritim yang efektif;
  - b. meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan peserta didik tentang konservasi; dan
  - c. ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di kawasan ini.

#### Bagian Keempat

#### Pemanfaatan Ruang Pada Alur Laut

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 71

Pemanfaatan AL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. pemanfaatan AL-APP;
- b. pemanfaatan AL-APK-GM;
- c. pemanfaatan AL-APK-KT; dan
- d. pemanfaatan AL-MB.

#### Paragraf 2

Pemanfaatan Ruang Pada Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan

## Pasal 72

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan di AL-APP sebagai berikut:
  - a. pelayaran;
  - b. pelintasan; dan
  - c. pengerukan.
  
- (2) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagai berikut:
  - a. permukiman;
  - b. wisata bawah laut;
  - c. wisata olahraga air;
  - d. perikanan budidaya;
  - e. penangkapan ikan dengan alat tangkap menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan;
  - f. penempatan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
  - g. membangun instalasi atau bangunan lainnya; dan
  - h. kegiatannya lainnya yang sifatnya permanen.
  
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sebagai berikut:
  - a. perikanan tangkap ikan pelagis; dan
  - b. perikanan tangkap ikan pelagis demersal.
  
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagai berikut:
  - a. sarana bantu navigasi-pelayaran;
  - b. sarana telekomunikasi pelayaran (*vessel traffic services* dan stasiun radio pantai); dan
  - c. pos pengawasan.
  
- (5) Ketentuan khusus di AL-APP dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Zona terlarang pada area 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar instalasi atau bangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
  - b. pengaturan perlindungan lingkungan maritim;
  - c. penetapan sistem rute (skema pemisah lalu lintas di laut. rute dua arah, garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah yang harus dihindari, daerah lalu lintas pedalaman, dan daerah kewaspadaan);
  - d. pembatasan kecepatan kapal dan/atau penetapan *ship routing system* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan; dan
  - e. setiap kapal-kapal yang melintas transit dilarang membuang benda-benda sisa beracun atau benda berbahaya seperti sampah di perairan Indonesia; setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki-tangki kapal atau mengotori wilayah perairan Indonesia disaat melakukan lintas transit; dan kapal-kapal yang membawa bahan nuklir diharuskan

mempunyai peralatan perlindungan keamanan dan tetap berhubungan dengan TNI-AL, sesuai dengan konvensi perlindungan fisik bahan-bahan nuklir.

### Paragraf 3

#### Pemanfaatan Ruang pada Pipa Bawah Laut

##### Pasal 73

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan untuk AL-APK-GM sebagai berikut:
  - a. transportasi dengan perahu kecil;
  - b. Pariwisata bahari; dan
  - c. Perikanan Tangkap ikan pelagis.
- (2) Kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk AL-APK-GM sebagai berikut:
  - a. pelabuhan;
  - b. pertambangan;
  - c. kegiatan pengkapan ikan demersal dengan alat tangkap ikan yang bergerak atau ditarik; dan
  - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin untuk AL-APK-GM sebagai berikut:
  - a. perikanan budidaya laut; dan
  - b. mendirikan bangunan laut yang merubah struktur dasar laut disekitar kabel/pipa bawah laut.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang untuk AL-APK-GM sebagai berikut: Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).
- (5) Ketentuan khusus untuk AL-APK-GM dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. pemeriksaan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa transmisi, distribusi dan pipa hulu yang terdapat di dasar laut terutama pada lokasi-lokasi yang potensial untuk terjadinya kegagalan struktur pipa, jalur pipa yang melewati lokasi tempat labuh kapal, jalur pipa yang melewati lokasi penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang dan jalur pipa yang melewati lokasi-lokasi di alur pelayaran;
  - b. pemeriksaan dilakukan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa untuk mendeteksi adanya korosi, kebocoran pipa, pipa retak dan *marine growth*; dan
  - c. menjaga kestabilan pipa di dasar laut dan mencegah terjadinya kegagalan struktur pada sistem perpipaan.

### Paragraf 4

#### Pemanfaatan ruang pada Kabel Bawah Laut

## Pasal 74

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan untuk AL-APK-KT sebagai berikut:
  - a. transportasi dengan perahu kecil berupa *sandeq*;
  - b. pariwisata bahari; dan
  - c. perikanan tangkap ikan pelagis.
- (2) Kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk AL-APK-KT sebagai berikut:
  - a. pelabuhan;
  - b. pertambangan;
  - c. kegiatan pengkapan ikan demersal yang bergerak atau ditarik; dan
  - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin untuk AL-APK-KT, sebagai berikut:
  - a. perikanan budidaya laut; dan
  - b. mendirikan bangunan laut yang merubah struktur dasar laut di sekitar kabel/pipa bawah laut.
- (4) Menyediakan prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang untuk AL-APK-KT, seperti penandaan kabel bawah laut di dasar perairan.
- (5) Ketentuan khusus untuk AL-APK-KT, sebaga berikut:
  - a. penempatan, pemendaman, dan penandaan;
  - b. pemendaman kabel bawah laut pada Alur pelayaran mengikuti peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. kegiatan pemasangan kabel bawah laut dengan jarak 50 (lima puluh) meter;
  - d. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran;
  - e. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan;
  - f. memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah laut
  - g. pemutusan/kerusakan oleh pemilik kabel/pipa bawah laut terhadap kabel/pipa bawah laut lainnya;
  - h. pemutusan/kerusakan pada kabel/pipa laut lain, harus menanggung biaya perbaikannya; dan
  - i. ganti rugi untuk mencegah kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut.

## Paragraf 5

## Pemanfaatan Ruang pada Migrasi Biota Laut

## Pasal 75

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan untuk AL-MB, sebagai berikut:
  - a. kegiatan penelitian dan pendidikan yang ekstraktif dan tidak mengganggu keberlangsungan hidup biota laut;
  - b. lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur biota laut;
  - c. kegiatan pariwisata melihat biota laut dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam; dan
  - d. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
- (2) Kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk AL-MB sebagai berikut:
  - a. permukiman;
  - b. perindustrian;
  - c. penambangan pasir;
  - d. pelabuhan;
  - e. kegiatan yang menyebabkan perubahan temperatur;
  - f. perikanan budidaya;
  - g. penangkapan secara tidak sengaja oleh kegiatan perikanan (terjerat alat tangkap) rawai, *trawl*, jaring insang;
  - h. penempatan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
  - i. mengalihfungsikan alur migrasi biota laut untuk kegiatan lain; dan
  - j. energi.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin untuk AL-MB, seperti:
  - a. lalu lintas kapal dengan kecepatan tinggi; dan
  - b. wisata olahraga air.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang untuk AL-MB, meliputi penandaan alur migrasi biota dan pos pengawasan.
- (5) Ketentuan khusus untuk AL-MB sebagai berikut:
  - a. pengaturan perlindungan lingkungan maritim; dan
  - b. penetapan sistem rute (skema pemisah lalu lintas di laut, rute dua arah, garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah yang harus dihindari, daerah lalu lintas pedalaman, dan daerah kewaspadaan).

Bagian Kelima

Izin

Paragraf 1

Umum

Pasal 76

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K, dilakukan mekanisme perizinan, terdiri atas:

- a. Izin Lokasi Perairan Pesisir; dan
- b. Izin Pengelolaan.

#### Pasal 77

Gubernur melakukan fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-Pulau Kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

#### Paragraf 2

##### Izin Lokasi Perairan Pesisir

#### Pasal 78

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan Pesisir.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir; dan
  - b. Izin Lokasi Pulau-pulau Kecil untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian pulau-pulau kecil.
- (3) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
- (4) Izin Lokasi Perairan Pesisir tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

#### Paragraf 3

##### Izin Pengelolaan

#### Pasal 79

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-Pulau Kecil wajib memiliki Izin Pengelolaan untuk kegiatan:
  - a. inlet air laut untuk produksi garam;
  - b. biofarmakologi laut;
  - c. bioteknologi laut;
  - d. pemanfaatan air laut selain energi;
  - e. wisata bahari;
  - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
  - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam,
- (2) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

- (3) Izin Pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 80

Penerbitan Izin Pengelolaan harus memenuhi syarat teknis, administratif, dan operasional yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 81

Dalam memberikan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Gubernur mempertimbangkan:

- a. kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. ketersediaan lokasi dan/atau akses bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional untuk melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil;
- c. nelayan kecil dan nelayan tradisional;
- d. kepentingan nasional; dan
- e. hal lintas damai bagi kapal asing.

### BAB V

#### INDIKASI PROGRAM

#### Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun indikasi program pemanfaatan ruang WP-3-K dengan berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usulan program utama;
  - b. lokasi program;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. institusi pelaksanaan program; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Usulan program utama dan lokasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, ditujukan untuk mewujudkan alokasi ruang yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan pada:
  - a. kawasan pemanfaatan umum;
  - b. kawasan konservasi; dan
  - c. alur laut.
- (4) Jangka waktu indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Pelaksanaan indikasi program sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dibagi ke dalam tahapan 5 (lima) tahunan dan tahunan.

- (6) Rincian indikasi program tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 83

- (1) Penyusunan indikasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah terkait.

### BAB VI

#### MITIGASI BENCANA

#### Pasal 84

Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu, Pemerintah Daerah Provinsi memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.

#### Pasal 85

Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan melibatkan Pemerintahan Daerah dan/atau Masyarakat.

#### Pasal 86

Penyelenggaraan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; serta
- d. lingkup luas wilayah.

#### Pasal 87

- (1) Setiap Orang yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib melaksanakan Mitigasi Bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.

- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai Mitigasi Bencana dan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KELEMBAGAAN

### Pasal 88

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan RZWP-3-K Provinsi maka pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang WP-3-K terintegrasi oleh TKPRD dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Susunan, tugas, dan fungsi keanggotaan dan/atau kelembagaan TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VIII REHABILITASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

### Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan Rehabilitasi WP-3-K.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara:
  - a. pengayaan sumber daya hayati;
  - b. perbaikan habitat;
  - c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; dan
  - d. ramah lingkungan.

### Pasal 90

Setiap Orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari WP-3-K wajib melaksanakan Rehabilitasi WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dan ayat (3).

BAB IX  
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat

Pasal 91

Dalam pengelolaan WP-3-K, masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sudah diberi izin lokasi perairan pesisir dan izin pengelolaan;
- b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
- c. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- g. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya;
- h. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya;
- i. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana alokasi ruang zonasi menimbulkan kerugian; dan
- j. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 92

Dalam pengelolaan WP-3-K, masyarakat wajib:

- a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. memantau pelaksanaan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. menaati rencana alokasi ruang zonasi yang telah ditetapkan;
- f. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan zona; dan
- g. melaksanakan indikasi program rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## BAB X

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 93

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan WP-3-K.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. proses perencanaan ruang;
  - b. pengelolaan ruang;
  - c. pengendalian pengelolaan ruang;
  - d. pengelolaan resiko bencana; dan
  - e. rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan:
  - a. memberikan saran dan pendapat terkait perencanaan dan pengelolaan ruang;
  - b. mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang;
  - c. melaporkan aktivitas atau kegiatan yang terindikasi menyimpang; dan
  - d. terlibat dalam pelaksanaan mitigasi bencana berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

#### Pasal 94

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui instansi terkait.

## BAB XI

### PARTISIPASI DUNIA USAHA

#### Pasal 95

- (1) Partisipasi dunia usaha dapat dilakukan pada
  - a. pengendalian pengelolaan ruang;

- b. pengelolaan resiko bencana; dan
- c. rehabilitasi WP3K.

(2) Partisipasi dunia usaha yang memanfaatkan WP3K memprioritaskan pelaksanaan pertanggungjawaban sosial pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XII

### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan Masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, dan aset ekonomi produktif lainnya; dan
  - b. mendorong kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### SISTEM INFORMASI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

#### Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi membangun sistem informasi RZWP-3-K Daerah Provinsi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
  - a. alokasi ruang WP-3-K;
  - b. arahan pemanfaatan ruang WP-3-K;
  - c. indikasi program;
  - d. data pemanfaatan ruang WP-3-K; dan
  - e. data pemegang izin lokasi perairan pesisir dan izin pengelola.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

BAB XIV  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pertimbangan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian ruang WP-3-K.
- (3) Insentif kepada pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pertimbangan:
  - a. memanfaatkan ruang sesuai peruntukannya;
  - b. melaksanakan arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan;
  - c. melakukan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
  - d. melakukan pengelolaan dampak pemanfaatan ruang.
- (4) Bentuk pemberian insentif kepada pemangku kepentingan dan masyarakat dalam bentuk:
  - a. penghargaan;
  - b. kemudahan pelayanan perizinan;
  - c. penyediaan sarana prasarana; dan
  - d. bentuk insentif lainnya.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 99

Disinsentif diberikan dalam bentuk:

- a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- b. pengenaan kompensasi;
- c. pengenaan penalti;
- d. penambahan persyaratan khusus dalam perizinan; dan
- e. pemberian status tertentu dari Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian WP-3-K untuk menjamin

pengelolaan RZWP-3-K dilaksanakan secara terpadu.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi dan penyuluhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. bimbingan teknis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. supervisi;
  - b. monitoring; dan
  - c. evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Pusat sebagai usulan Pemerintah Daerah Provinsi untuk mengevaluasi implementasi kebijakan nasional di Daerah Provinsi.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan.

#### Pasal 101

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, ditugaskan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. mengadakan patroli/perondaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau wilayah hukumnya; dan
  - b. menerima laporan yang menyangkut perusakan Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, KSNT, dan Alur Laut.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
  - b. pertukaran data dan informasi;
  - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
  - d. pemeriksaan sampel; dan
  - e. kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan pengawasan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB XVI  
LARANGAN  
Pasal 102

Setiap Orang secara langsung atau tidak langsung, dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di Kawasan Konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik WP3-K;
- f. melakukan konservasi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; serta;  
dan
- l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Pasal 103

Setiap Orang dilarang memanfaatkan ruang dari Perairan Pesisir dan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Izin Lokasi yang diberikan.

Pasal 104

Setiap Orang dilarang memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Izin Pengelolaan yang diberikan.

BAB XVII

## PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 105

- (1) Sengketa pemanfaatan ruang dalam RZWP-3-K diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindak pidana RZWP-3-K.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan terhadap bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu guna mencegah atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya RZWP-3-K.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (5) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.
- (6) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII

### GUGATAN PERWAKILAN

#### Pasal 106

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 107

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
  - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
  - b. berbentuk badan hukum;
  - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
  - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

## BAB XIX

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 108

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 103 dan Pasal 104, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penutupan lokasi;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pembatalan izin;
  - f. denda administratif; dan/atau
  - g. sanksi administrasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kepatutan dan keadilan masyarakat.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 109

Setiap Orang yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan pelanggaran terhadap ketentuan RZWP-3-K dan memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan izin, diancam dengan pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang.

## BAB XXI

### PENDANAAN

#### Pasal 110

Pendanaan pengelolaan dan penyelenggaraan RZWP-3-K bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XXII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 111

- (1) Dalam hal terdapat penetapan/pencadangan Kawasan Konservasi oleh Menteri terhadap bagian WP3K Daerah yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana Kawasan Konservasi disesuaikan dengan hasil penetapan/pencadangan Kawasan Konservasi berdasarkan hasil penetapan Menteri.
- (2) Dalam hal penetapan Zona Pelabuhan oleh Menteri terkait, bagian wilayah perairan Daerah Provinsi yang belum disepakati harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (4) Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 112

Pemerintah Daerah Provinsi dapat menyusun Rencana Zonasi Rinci dan/atau Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada lokasi tertentu yang diprioritaskan.

## BAB XXIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 113

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian

berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini untuk dilakukan penertiban dan penyesuaian.

#### Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua izin yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu habis;
- b. semua izin yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini:
  1. untuk yang belum dilaksanakan kegiatan pembangunannya, izin harus disesuaikan dengan fungsi kawasan/zona/sub zona berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan/zona/subzona berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan/Zona/sub Zona, sebagai berikut:
    - a) dalam hal izin yang telah diterbitkan sesuai prosedur yang benar diberikan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian; dan
    - b) dalam hal izin yang telah diterbitkan tidak sesuai prosedur yang benar, izin yang telah diterbitkan dibatalkan.

#### Pasal 115

- (1) Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin:
  - a. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - b. yang sudah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, dilakukan percepatan untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

### BAB XXIV

#### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 151), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Februari 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 25 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (4-40/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Secara geografis wilayah pesisir dan laut Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 2 (dua) wilayah, yaitu wilayah pantai utara (Pantura) dan wilayah pantai selatan (Pansela). Berdasarkan data BIG, panjang garis pantai utara adalah 411,68 km, dan panjang garis pantai selatan adalah 446,35 km, sehingga panjang garis pantai Jawa Barat mencapai 858,03 km.

Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat besar baik berupa sumberdaya hayati, non hayati, sumberdaya buatan dan jasa lingkungan. Berdasarkan data Direktorat Pulau-pulau Kecil, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP-RI, pulau-pulau kecil di Jawa Barat berjumlah 30 buah yang tersebar di wilayah utara dan selatan. Salah satu sumberdaya kelautan yang penting di Jawa Barat adalah perikanan tangkap demersal dan pelagis. Potensi lestari perikanan laut Jawa Barat mencapai 240.000 ton/tahun. Pada tahun 2014, tingkat pemanfaatannya tercatat sebesar 206.156,82 ton dengan nilai produksi sekitar Rp3.357.112.932,21 (tiga miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah dua satu sen) atau sekitar 86% dari potensi lestari (DKP Jabar 2015).

Isu dan permasalahan yang ada yaitu kawasan pesisir Jawa Barat merupakan wilayah yang relatif sudah terdegradasi, hal ini disebabkan oleh:

1. Pemanfaatan Berlebihan (*over exploitation*);
2. Penggunaan teknik dan peralatan penangkap ikan yang merusak lingkungan;
3. Penggunaan bahan peledak beracun yang dapat merusak terumbu karang dan ikan karang;
4. Perusakan fisik dan habitat (penambangan karang, pasir dan reklamasi);
5. Polusi dan sedimentasi;
6. Introduksi species asing;
7. Perubahan iklim/bencana alam (*coral bleaching*);
8. Konversi lahan yang kurang bijaksana; dan
9. Pemahaman hukum dan perundang-undangan yang masih rendah.

Dalam konteks keruangan, terjadinya degradasi lingkungan dan adanya pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak berwawasan lingkungan juga potensial menimbulkan dampak kerusakan ekosistem perairan dan potensi konflik sehingga pada akhirnya akan menurunkan benefit sumberdaya bagi masyarakat yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, perlu adanya Perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K), yang merupakan rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagai peninjauan

kembali Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2029 yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, serta kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

1. menciptakan harmonisasi dan sinergi perencanaan dan pemanfaatan ruang laut antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. menciptakan harmonisasi dan sinergi perencanaan dan pemanfaatan ruang laut dan ruang darat;
3. mewujudkan kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan;
4. mewujudkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
5. menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan kondisi dimaksud, lingkup wilayah RZWP-3-K meliputi:

1. ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan
2. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K Daerah Provinsi meliputi:

1. arahan kebijakan dan strategi RZWP-3-K;
2. penetapan alokasi ruang WP-3-K; dan
3. penetapan arahan pemanfaatan ruang WP-3-K.

Tindak lanjut pengaturan ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkepentingan untuk melaksanakan kegiatan penyusunan RZWP-3-K sebagai landasan operasional untuk melaksanakan berbagai program pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Jawa Barat. Untuk menjamin kebijakan rencana dan program RZWP-3-K Provinsi Jawa Barat ini, maka diterapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan mengedepankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelabuhan Utama” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pelabuhan Pengumpul” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Huruf c

Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Pada Pelabuhan Cirebon (KPU-PL-DLK-04) terdapat Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) untuk doking dan galangan kapal di Kota Cirebon.

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Pada Pelabuhan Tarumajaya (KPU-PL-DLK-01) terdapat Terminal Khusus *Batching Plant* di Kabupaten Bekasi.

## Pasal 28

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 29

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 30

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “sub zona pasir laut” yaitu pertambangan pasir laut terutama di pantai selatan Jawa Barat masih berlaku bagi pengusaha yang masih memiliki izin pemanfaatan tambang hingga habis masa berlaku izin tambang. Selanjutnya, izin tambang tidak lagi diperpanjang dan kawasan pertambangan pasir laut tidak lagi diperbolehkan.

## Huruf b

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

#### Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “sub zona perikanan tangkap pelagis” adalah perikanan tangkap dengan ikan target berupa ikan yang hidup di lapisan permukaan perairan pantai atau di perairan pantai.

Huruf b

Yang dimaksud “sub zona perikanan tangkap pelagis demersal” adalah perikanan tangkap dengan ikan target berupa ikan yang hidup di kolom hingga dasar perairan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 32

Ayat (1)

Jenis usaha budidaya laut yang diterapkan pada Sub Zona Budidaya Laut menyesuaikan dengan species dan teknologi budidaya yang akan diusahakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 33

Ayat (1)

Kegiatan pergaraman dilakukan di wilayah daratan. Sementara di wilayah perairan hanya disediakan inlet yang diproteksi dari pemanfaatan lain yang tidak sesuai untuk mengalirkan air laut ke lokasi pertambangan garam.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kegiatan pada sub zona KPU-EN-PLTU dilengkapi Terminal Khusus (Tersus) terdapat di :

- a. Tersus PLTU 1 Indramayu Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- b. Tersus PLTU 2 Indramayu Desa Sumuradem Kecamatan Sukra, Desa Mekarsari dan Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- c. Tersus PLTU Balongan Kabupaten Indramayu;

- d. Tersus PLTU 1 Kabupaten Cirebon;
- e. Tersus PLTU 2 Kabupaten Cirebon;
- f. Tersus PLTU Tanjungjati Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon;
- g. Tersus PLTU Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi.

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan lindung lainnya yaitu umumnya berupa kawasan yang mempunyai fungsi lindung, ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kabel Telekomunikasi Bawah Laut” yaitu kabel yang diletakkan di bawah laut untuk menghubungkan telekomunikasi antar wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas
- Ayat (7)  
Cukup jelas
- Ayat (8)  
Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 52

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Izin pertambangan pasir laut berlaku hingga habisnya masa berlaku yang diberikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

## Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 58

Cukup jelas

## Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 61

Cukup jelas

## Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

## Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

## Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 73  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 74  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Zona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 83  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)  
Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah Provinsi.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 99

Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 100

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 234

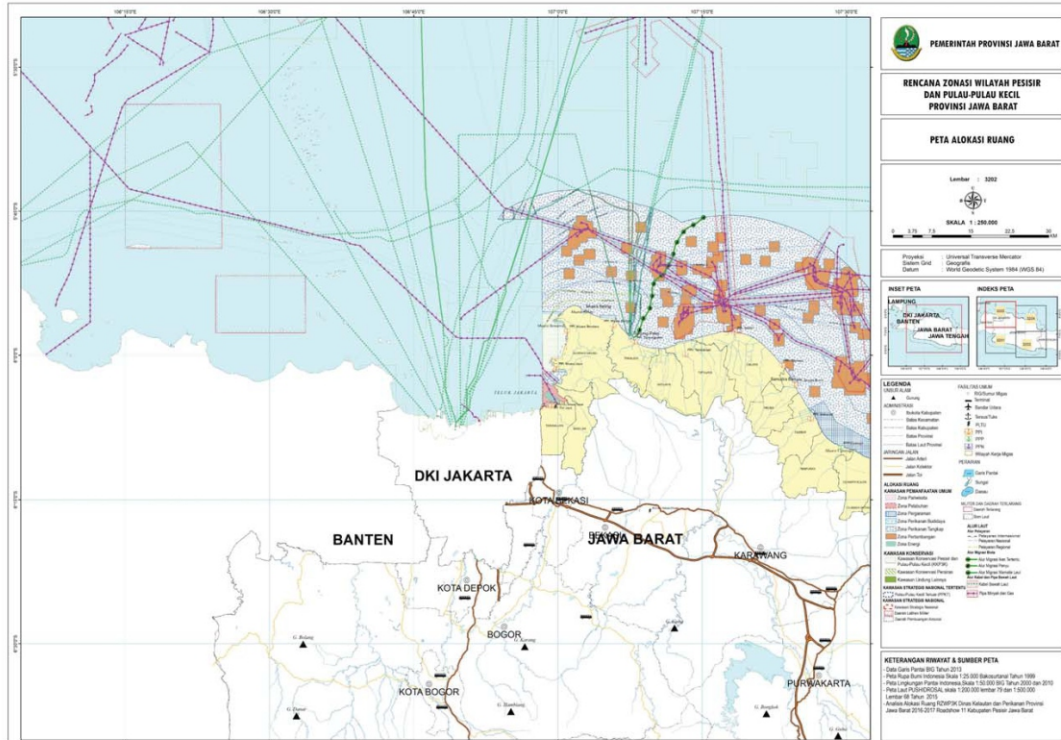
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 - 2039

PETA ALOKASI RUANG SKALA 1 : 250.000 (lembar 01)











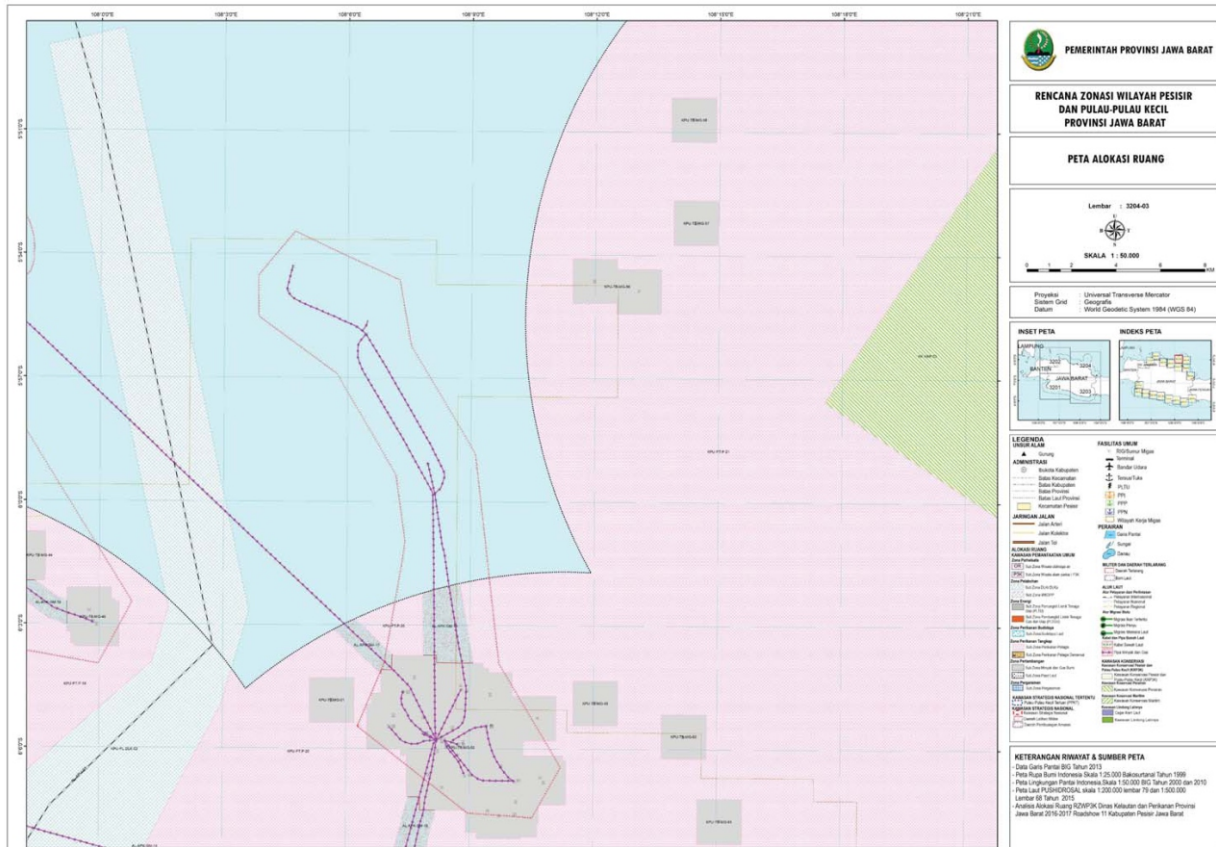








# PETA ALOKASI RUANG SKALA 1 : 50.000 (lembar 06)





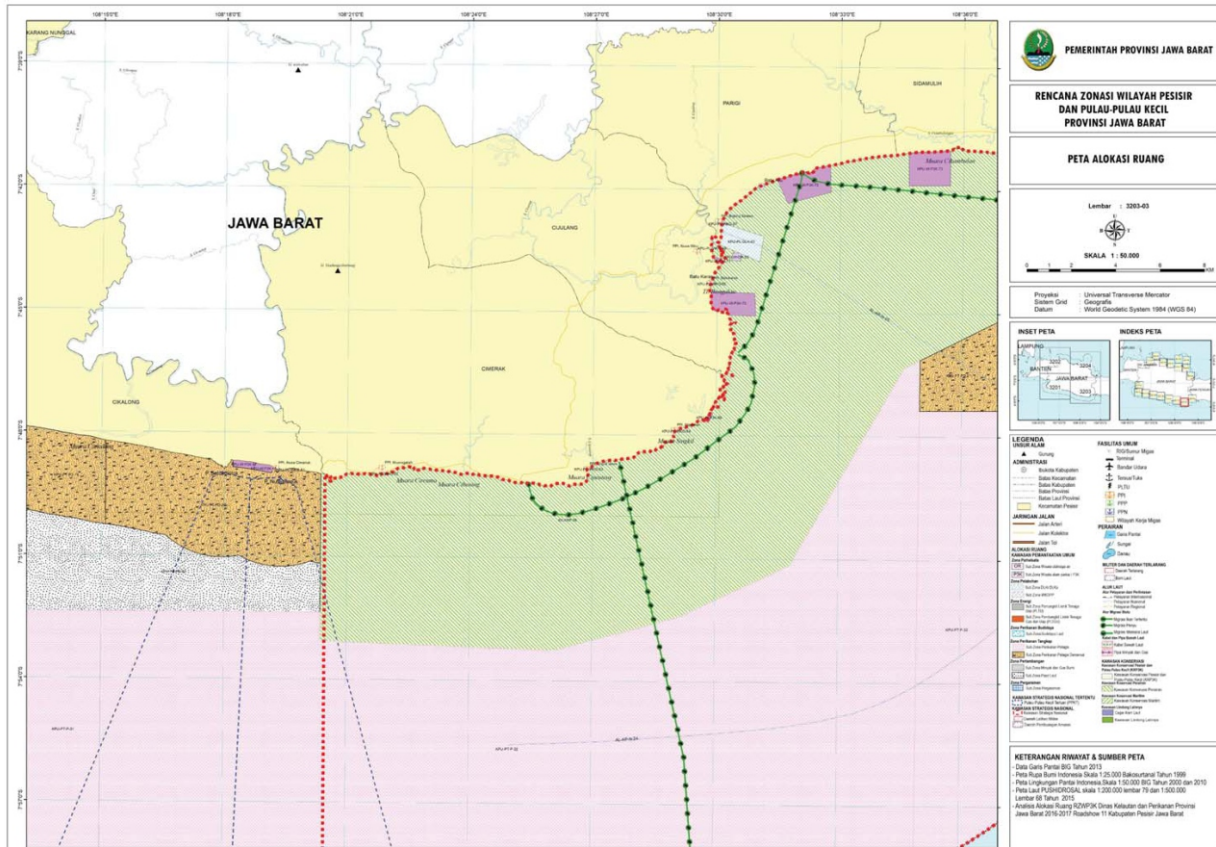


PETA ALOKASI RUANG SKALA 1 : 50.000 (lembar 09)





# PETA ALOKASI RUANG SKALA 1 : 50.000 (lembar 11)

















## LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : ...../TAHUN 2019

TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
(RZWP-3-K) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 – 2039**KOORDINAT DAN LUASAN ZONA PERIKANAN BUDIDAYA**

| <b>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</b> |                     |                   |               |                     |                   |            |                  |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|
| <b>ZONA PERIKANAN BUDIDAYA</b>  |                     |                   |               |                     |                   |            |                  |
| <b>No.</b>                      | <b>KODE SUBZONA</b> | <b>KETERANGAN</b> | <b>LOKASI</b> | <b>KOORDINAT</b>    |                   | <b>NLP</b> | <b>LUAS (HA)</b> |
|                                 |                     |                   |               | <b>X</b>            | <b>Y</b>          |            |                  |
| 1                               | KPU-BD-BL-01        | Bagan Eksisting   | Bekasi        | 106° 58' 44.492" BT | 6° 2' 10.969" LS  | 3202-01    | 71,21            |
| 2                               | KPU-BD-BL-02        | Budidaya          | Subang        | 107° 42' 36.826" BT | 6° 13' 27.047" LS | 3204-01    | 407,93           |
| 3                               | KPU-BD-BL-03        | Budidaya          | Subang        | 107° 45' 51.274" BT | 6° 12' 29.179" LS | 3204-01    | 63,85            |
| 4                               | KPU-BD-BL-04        | Budidaya          | Subang        | 107° 51' 56.933" BT | 6° 12' 35.595" LS | 3204-01    | 39,67            |
| 5                               | KPU-BD-BL-05        | Budidaya Kerang   | Cirebon       | 108° 33' 54,930" BT | 6° 36' 26,462" LS | 3204-06    | 384,42           |
| 6                               | KPU-BD-BL-06        | Budidaya Kerang   | Cirebon       | 108° 34' 21,856" BT | 6° 39' 50,697" LS | 3204-06    | 206,40           |
| 7                               | KPU-BD-BL-07        | Budidaya          | Cirebon       | 108° 45' 22.907" BT | 6° 48' 24.422" LS | 3204-06    | 396,76           |
| 8                               | KPU-BD-BL-08        | Bagan Eksisting   | Sukabumi      | 106° 27' 54.332" BT | 6° 58' 22.991" LS | 3201-02    | 2.316,53         |
| 9                               | KPU-BD-BL-09        | Bagan Eksisting   | Sukabumi      | 106° 30' 49.140" BT | 7° 4' 44.169" LS  | 3201-02    | 714,10           |
| 10                              | KPU-BD-BL-10        | Bagan Eksisting   | Sukabumi      | 106° 23' 2.025" BT  | 7° 13' 53.549" LS | 3201-01    | 142,63           |
| 11                              | KPU-BD-BL-11        | Rumput Laut       | Garut         | 107° 39' 27.238" BT | 7° 37' 33.031" LS | 3203-01    | 619,16           |
| 12                              | KPU-BD-BL-12        | KJA Off Shore     | Pangandaran   | 108° 37' 37.917" BT | 7° 45' 8.981" LS  | 3203-04    | 5,05             |

**KOORDINAT DAN LUASAN ZONA PERIKANAN TANGKAP**

| <b>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</b> |                |               |                     |                   |            |                  |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|
| <b>ZONA PERIKANAN TANGKAP</b>   |                |               |                     |                   |            |                  |
| <b>No.</b>                      | <b>KODE_SZ</b> | <b>LOKASI</b> | <b>KOORDINAT</b>    |                   | <b>NLP</b> | <b>LUAS (HA)</b> |
|                                 |                |               | <b>X</b>            | <b>Y</b>          |            |                  |
| 1                               | KPU-PT-P-01    | Bekasi        | 106° 54' 40.557" BT | 5° 45' 25.571" LS | 3202       | 355,985          |
| 2                               | KPU-PT-P-02    | Bekasi        | 106° 55' 43.013" BT | 5° 44' 23.645" LS | 3202       | 154,650          |
| 3                               | KPU-PT-P-03    | Bekasi        | 106° 56' 40.944" BT | 5° 44' 20.568" LS | 3202       | 430,440          |
| 4                               | KPU-PT-P-04    | Bekasi        | 106° 56' 2.333" BT  | 5° 45' 36.126" LS | 3202       | 159,618          |
| 5                               | KPU-PT-P-05    | Bekasi        | 106° 59' 8.806" BT  | 5° 44' 2.734" LS  | 3202       | 1.666,116        |
| 6                               | KPU-PT-P-06    | Bekasi        | 107° 1' 11.626" BT  | 5° 44' 50.402" LS | 3202       | 4.697,911        |
| 7                               | KPU-PT-P-07    | Bekasi        | 106° 59' 35.120" BT | 5° 47' 41.658" LS | 3202       | 1.881,192        |
| 8                               | KPU-PT-P-08    | Bekasi        | 107° 2' 4.384" BT   | 5° 49' 57.124" LS | 3202       | 4.590,417        |
| 9                               | KPU-PT-P-09    | Bekasi        | 107° 5' 44.028" BT  | 5° 47' 6.635" LS  | 3202-02    | 7.040,028        |
| 10                              | KPU-PT-P-10    | Karawang      | 107° 8' 22.885" BT  | 5° 47' 32.173" LS | 3202-02    | 1.652,959        |
| 11                              | KPU-PT-P-11    | Karawang      | 107° 8' 51.860" BT  | 5° 48' 53.625" LS | 3202-02    | 1.197,949        |
| 12                              | KPU-PT-P-12    | Karawang      | 107° 13' 19.098" BT | 5° 48' 6.856" LS  | 3202-02    | 10.304,584       |
| 13                              | KPU-PT-P-13    | Karawang      | 107° 12' 0.908" BT  | 5° 52' 26.459" LS | 3202-02    | 4.280,470        |
| 14                              | KPU-PT-P-14    | Karawang      | 107° 21' 57.631" BT | 5° 49' 9.684" LS  | 3202-02    | 15.681,922       |
| 15                              | KPU-PT-P-15    | Karawang      | 107° 25' 2.145" BT  | 5° 51' 41.084" LS | 3202       | 2.988,147        |
| 16                              | KPU-PT-P-16    | Karawang      | 107° 29' 1.409" BT  | 5° 56' 58.462" LS | 3202       | 12.736,132       |
| 17                              | KPU-PT-P-17    | Karawang      | 107° 35' 40.676" BT | 6° 2' 54.400" LS  | 3202-03    | 16.834,197       |

| <b>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</b> |                |               |                     |                   |            |                  |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|
| <b>ZONA PERIKANAN TANGKAP</b>   |                |               |                     |                   |            |                  |
| <b>No.</b>                      | <b>KODE_SZ</b> | <b>LOKASI</b> | <b>KOORDINAT</b>    |                   | <b>NLP</b> | <b>LUAS (HA)</b> |
|                                 |                |               | <b>X</b>            | <b>Y</b>          |            |                  |
| 18                              | KPU-PT-P-18    | Subang        | 107° 46' 9.936" BT  | 6° 3' 58.312" LS  | 3204-01    | 19.664,218       |
| 19                              | KPU-PT-P-19    | Subang        | 107° 56' 29.620" BT | 6° 3' 34.113" LS  | 3204-01    | 13.158,303       |
| 20                              | KPU-PT-P-20    | Indramayu     | 108° 3' 42.654" BT  | 6° 8' 24.476" LS  | 3204-03    | 15.975,321       |
| 21                              | KPU-PT-P-21    | Indramayu     | 108° 21' 32.655" BT | 6° 1' 39.429" LS  | 3204       | 160.229,697      |
| 22                              | KPU-PT-P-22    | Cirebon       | 108° 42' 2.325" BT  | 6° 37' 42.089" LS | 3204-04    | 30.496,064       |
| 23                              | KPU-PT-P-22    | Cirebon       | 108° 37' 11.965" BT | 6° 24' 46.168" LS | 3204-06    | 33.993,542       |
| 24                              | KPU-PT-P-23    | Kota Cirebon  | 108° 50' 2.579" BT  | 6° 35' 8.856" LS  | 3204-06    | 8.612,921        |
| 25                              | KPU-PT-P-24    | Cirebon       | 108° 50' 39.034" BT | 6° 38' 32.723" LS | 3204-06    | 19.280,646       |
| 26                              | KPU-PT-P-25    | Sukabumi      | 106° 19' 4.210" BT  | 7° 7' 41.473" LS  | 3201-02    | 21.324,628       |
| 27                              | KPU-PT-P-26    | Sukabumi      | 106° 22' 40.138" BT | 7° 25' 38.521" LS | 3201       | 105.653,928      |
| 28                              | KPU-PT-P-27    | Cianjur       | 106° 46' 55.181" BT | 7° 33' 38.302" LS | 3201-03    | 58.832,072       |
| 29                              | KPU-PT-P-28    | Cianjur       | 107° 6' 1.466" BT   | 7° 35' 39.416" LS | 3201-04    | 53.327,312       |
| 30                              | KPU-PT-P-29    | Garut         | 107° 25' 17.445" BT | 7° 40' 38.170" LS | 3201-05    | 64.541,154       |
| 31                              | KPU-PT-P-30    | Garut         | 107° 44' 51.862" BT | 7° 48' 16.946" LS | 3203-01    | 66.336,431       |
| 32                              | KPU-PT-P-31    | Tasikmalaya   | 108° 4' 58.903" BT  | 7° 54' 28.462" LS | 3203-02    | 55.491,418       |
| 33                              | KPU-PT-P-32    | Pangandaran   | 108° 25' 9.895" BT  | 7° 54' 58.718" LS | 3203-03    | 59.727,887       |
| 34                              | KPU-PT-P-33    | Pangandaran   | 108° 39' 3.876" BT  | 7° 52' 26.780" LS | 3203       | 26.257,915       |

| <b>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</b> |                |               |                     |                   |            |                  |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|
| <b>ZONA PERIKANAN TANGKAP</b>   |                |               |                     |                   |            |                  |
| <b>No.</b>                      | <b>KODE_SZ</b> | <b>LOKASI</b> | <b>KOORDINAT</b>    |                   | <b>NLP</b> | <b>LUAS (HA)</b> |
|                                 |                |               | <b>X</b>            | <b>Y</b>          |            |                  |
| 35                              | KPU-PT-PD-01   | Bekasi        | 106° 59' 53.900" BT | 6° 2' 22.852" LS  | 3202-01    | 455,88           |
| 36                              | KPU-PT-PD-02   | Bekasi        | 107° 2' 35.390" BT  | 5° 53' 55.291" LS | 3202-01    | 10.964,41        |
| 37                              | KPU-PT-PD-03   | Bekasi        | 107° 7' 5.253" BT   | 5° 54' 33.103" LS | 3202-02    | 2.161,44         |
| 38                              | KPU-PT-PD-04   | Bekasi        | 107° 8' 8.284" BT   | 5° 55' 49.653" LS | 3202-02    | 627,52           |
| 39                              | KPU-PT-PD-05   | Karawang      | 107° 12' 19.899" BT | 5° 56' 29.866" LS | 3202-02    | 8.634,37         |
| 40                              | KPU-PT-PD-06   | Karawang      | 107° 28' 46.179" BT | 6° 3' 15.506" LS  | 3202-03    | 22.179,96        |
| 41                              | KPU-PT-PD-07   | Subang        | 107° 47' 55.564" BT | 6° 10' 45.391" LS | 3204-01    | 20.950,64        |
| 42                              | KPU-PT-PD-08   | Indramayu     | 108° 12' 47.334" BT | 6° 15' 0.491" LS  | 3204-02    | 42.484,24        |
| 43                              | KPU-PT-PD-09   | Cirebon       | 108° 31' 26.098" BT | 6° 29' 58.379" LS | 3204-04    | 20.981,04        |
| 44                              | KPU-PT-PD-10   | Kota Cirebon  | 108° 36' 31.181" BT | 6° 45' 15.640" LS | 3204-06    | 754,45           |
| 45                              | KPU-PT-PD-11   | Kota Cirebon  | 108° 40' 4.417" BT  | 6° 43' 43.411" LS | 3204-06    | 2.961,15         |
| 46                              | KPU-PT-PD-12   | Cirebon       | 108° 46' 54.697" BT | 6° 44' 9.835" LS  | 3204-06    | 17.602,09        |
| 47                              | KPU-PT-PD-13   | Sukabumi      | 106° 30' 57.498" BT | 6° 59' 48.528" LS | 3201-02    | 1.515,81         |
| 48                              | KPU-PT-PD-14   | Sukabumi      | 106° 26' 56.054" BT | 7° 14' 20.675" LS | 3201-01    | 53.442,27        |
| 49                              | KPU-PT-PD-15   | Sukabumi      | 106° 47' 15.289" BT | 7° 27' 38.358" LS | 3201-03    | 21.183,67        |
| 50                              | KPU-PT-PD-16   | Cianjur       | 107° 5' 58.437" BT  | 7° 29' 32.936" LS | 3201-04    | 21.583,04        |
| 51                              | KPU-PT-PD-17   | Cianjur       | 107° 25' 8.309" BT  | 7° 33' 21.578" LS | 3201-05    | 25.334,09        |

| <b>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</b> |                |               |                     |                   |            |                  |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|
| <b>ZONA PERIKANAN TANGKAP</b>   |                |               |                     |                   |            |                  |
| <b>No.</b>                      | <b>KODE_SZ</b> | <b>LOKASI</b> | <b>KOORDINAT</b>    |                   | <b>NLP</b> | <b>LUAS (HA)</b> |
|                                 |                |               | <b>X</b>            | <b>Y</b>          |            |                  |
| 52                              | KPU-PT-PD-18   | Garut         | 107° 44' 29.920" BT | 7° 41' 25.813" LS | 3203-01    | 26.474,11        |
| 53                              | KPU-PT-PD-19   | Tasikmalaya   | 108° 4' 55.316" BT  | 7° 47' 22.845" LS | 3203-02    | 18.312,59        |
| 54                              | KPU-PT-PD-20   | Pangandaran   | 108° 17' 45.018" BT | 7° 49' 45.816" LS | 3203-03    | 3.931,60         |
| 55                              | KPU-PT-PD-21   | Pangandaran   | 108° 39' 25.187" BT | 7° 46' 9.823" LS  | 3203-04    | 6.487,00         |
| 56                              | KPU-PT-PD-22   | Pangandaran   | 108° 47' 15.226" BT | 7° 41' 22.114" LS | 3203-04    | 256,18           |

**KOORDINAT DAN LUASAN ZONA PERGARAMAN**

| <b>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</b> |                |               |                     |                   |            |                  |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|
| <b>ZONA PERGARAMAN</b>          |                |               |                     |                   |            |                  |
| <b>No.</b>                      | <b>KODE_SZ</b> | <b>LOKASI</b> | <b>KOORDINAT</b>    |                   | <b>NLP</b> | <b>LUAS (HA)</b> |
|                                 |                |               | <b>X</b>            | <b>Y</b>          |            |                  |
| 1                               | KPU-GR-01      | Karawang      | 107° 31' 11.219" BT | 6° 8' 21.358" LS  | 3202-03    | 6.337,77         |
| 2                               | KPU-GR-02      | Indramayu     | 108° 9' 6.451" BT   | 6° 17' 35.291" LS | 3204-02    | 4.570,97         |
| 3                               | KPU-GR-03      | Cirebon       | 108° 34' 38.540" BT | 6° 35' 38.110" LS | 3204-06    | 9.773,08         |
| 4                               | KPU-GR-04      | Cirebon       | 108° 42' 18.830" BT | 6° 46' 42.815" LS | 3204-06    | 4.337,45         |
| 5                               | KPU-GR-05      | Sukabumi      | 106° 41' 56.793" BT | 7° 26' 11.247" LS | 3201-03    | 1.675,32         |

**KOORDINAT DAN LUASAN ZONA ENERGI**

| <b>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</b> |                 |  |               |                     |                   |            |                  |
|---------------------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|
| <b>ZONA ENERGI</b>              |                 |  |               |                     |                   |            |                  |
| <b>No.</b>                      | <b>KODE_SZ</b>  | <b>KETERANGAN</b>                                | <b>LOKASI</b> | <b>KOORDINAT</b>    |                   | <b>NLP</b> | <b>LUAS (HA)</b> |
|                                 |                 |  |               | <b>X</b>            | <b>Y</b>          |            |                  |
| 1                               | KPU-EN-PLTGU-01 | PLTGU MUARA TAWAR BEKASI                         | Bekasi        | 106° 59' 21.540" BT | 6° 4' 19.851" LS  | 3202-01    | 327,37           |
| 2                               | KPU-EN-PLTGU-02 | FSRU   | Karawang      | 107° 42' 59.744" BT | 6° 9' 32.626" LS  | 3204-01    | 2910,61          |
| 3                               | KPU-EN-PLTU-01  | PLTU Indramayu dan Rencana PLTU Indramayu Unit 4 | Indramayu     | 107° 58' 56.358" BT | 6° 15' 55.965" LS | 3204-01    | 427,49           |
| 4                               | KPU-EN-PLTU-02  | PLTU   | Indramayu     | 108° 24' 46.803" BT | 6° 22' 7.125" LS  | 3204-04    | 523,52           |
| 5                               | KPU-EN-PLTU-03  | PLTU   | Cirebon       | 108° 37' 14.518" BT | 6° 45' 6.225" LS  | 3204-06    | 259,34           |
| 6                               | KPU-EN-PLTU-04  | PLTU Cirebon Ekspansi                            | Cirebon       | 108° 37' 39.400" BT | 6° 45' 35.535" LS | 3204-06    | 104,41           |
| 7                               | KPU-EN-PLTU-05  | PLTU Jawa 3                                      | Cirebon       | 108° 38' 26.874" BT | 6° 44' 9.703" LS  | 3204-06    | 636,85           |
| 8                               | KPU-EN-PLTU-06  | PLTU Pelabuhan Ratu                              | Sukabumi      | 106° 29' 13.394" BT | 7° 0' 9.497" LS   | 3201-02    | 1590,99          |

**KOORDINAT DAN LUASAN ZONA PERTAMBANGAN**

| <b>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</b> |                |                   |               |                     |                   |            |                  |
|---------------------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|
| <b>ZONA PERTAMBANGAN</b>        |                |                   |               |                     |                   |            |                  |
| <b>No.</b>                      | <b>KODE_SZ</b> | <b>KETERANGAN</b> | <b>LOKASI</b> | <b>KOORDINAT</b>    |                   | <b>NLP</b> | <b>LUAS (HA)</b> |
|                                 |                |                   |               | <b>X</b>            | <b>Y</b>          |            |                  |
| 1                               | KPU-TB-MG-01   | Sumur Migas       | Bekasi        | 107° 2' 11.362" BT  | 5° 47' 31.649" LS | 3202       | 2670,18          |
| 2                               | KPU-TB-MG-02   | Sumur Migas       | Bekasi        | 107° 2' 15.110" BT  | 5° 50' 25.113" LS | 3202       | 1234,01          |
| 3                               | KPU-TB-MG-03   | Sumur Migas       | Karawang      | 107° 5' 34.598" BT  | 5° 51' 18.898" LS | 3202-02    | 400,18           |
| 4                               | KPU-TB-MG-04   | Sumur Migas       | Karawang      | 107° 7' 9.973" BT   | 5° 48' 50.308" LS | 3202-02    | 400,20           |
| 5                               | KPU-TB-MG-05   | Sumur Migas       | Karawang      | 107° 8' 39.001" BT  | 5° 46' 39.999" LS | 3202-02    | 400,21           |
| 6                               | KPU-TB-MG-06   | Sumur Migas       | Karawang      | 107° 7' 38.700" BT  | 5° 51' 43.335" LS | 3202-02    | 399,38           |
| 7                               | KPU-TB-MG-07   | Sumur Migas       | Karawang      | 107° 7' 36.808" BT  | 5° 55' 3.164" LS  | 3202-02    | 400,20           |
| 8                               | KPU-TB-MG-08   | Sumur Migas       | Karawang      | 107° 10' 26.514" BT | 5° 50' 44.091" LS | 3202-02    | 1481,23          |
| 9                               | KPU-TB-MG-09   | Sumur Migas       | Karawang      | 107° 11' 19.002" BT | 5° 54' 0.047" LS  | 3202-02    | 731,95           |
| 10                              | KPU-TB-MG-10   | Sumur Migas       | Karawang      | 107° 10' 56.701" BT | 5° 56' 31.998" LS | 3202-02    | 400,23           |
| 11                              | KPU-TB-MG-11   | Sumur Migas       | Karawang      | 107° 13' 15.076" BT | 5° 55' 34.270" LS | 3202-02    | 3041,90          |
| 12                              | KPU-TB-MG-12   | Sumur Migas       | Karawang      | 107° 12' 52.776" BT | 5° 50' 54.779" LS | 3202-02    | 552,17           |
| 13                              | KPU-TB-MG-13   | Sumur Migas       | Karawang      | 107° 13' 52.162" BT | 5° 48' 10.107" LS | 3202-02    | 400,25           |
| 14                              | KPU-TB-MG-14   | Sumur Migas       | Karawang      | 107° 15' 51.539" BT | 5° 49' 42.686" LS | 3202-02    | 2337,29          |

| KAWASAN PEMANFAATAN UMUM |              |             |          |                     |                   |         |           |
|--------------------------|--------------|-------------|----------|---------------------|-------------------|---------|-----------|
| ZONA PERTAMBANGAN        |              |             |          |                     |                   |         |           |
| No.                      | KODE_SZ      | KETERANGAN  | LOKASI   | KOORDINAT           |                   | NLP     | LUAS (HA) |
|                          |              |             |          | X                   | Y                 |         |           |
| 15                       | KPU-TB-MG-15 | Sumur Migas | Karawang | 107° 15' 29.493" BT | 5° 55' 5.583" LS  | 3202-02 | 416,88    |
| 16                       | KPU-TB-MG-16 | Sumur Migas | Karawang | 107° 17' 31.863" BT | 5° 54' 57.075" LS | 3202-02 | 2653,54   |
| 17                       | KPU-TB-MG-17 | Sumur Migas | Karawang | 107° 19' 31.901" BT | 5° 50' 1.722" LS  | 3202-02 | 400,31    |
| 18                       | KPU-TB-MG-18 | Sumur Migas | Karawang | 107° 21' 2.700" BT  | 5° 55' 19.998" LS | 3202-02 | 400,32    |
| 19                       | KPU-TB-MG-19 | Sumur Migas | Karawang | 107° 21' 34.790" BT | 5° 50' 11.614" LS | 3202-02 | 400,33    |
| 20                       | KPU-TB-MG-20 | Sumur Migas | Karawang | 107° 22' 31.112" BT | 5° 48' 40.426" LS | 3202-02 | 400,34    |
| 21                       | KPU-TB-MG-21 | Sumur Migas | Karawang | 107° 22' 32.216" BT | 5° 56' 45.859" LS | 3202-03 | 400,33    |
| 22                       | KPU-TB-MG-22 | Sumur Migas | Karawang | 107° 23' 0.462" BT  | 5° 58' 22.807" LS | 3202-03 | 493,53    |
| 23                       | KPU-TB-MG-23 | Sumur Migas | Karawang | 107° 26' 45.293" BT | 5° 51' 27.140" LS | 3202    | 3134,94   |
| 24                       | KPU-TB-MG-24 | Sumur Migas | Karawang | 107° 26' 21.728" BT | 5° 55' 29.260" LS | 3202    | 920,60    |
| 25                       | KPU-TB-MG-25 | Sumur Migas | Karawang | 107° 23' 58.528" BT | 6° 1' 0.147" LS   | 3202-03 | 344,51    |
| 26                       | KPU-TB-MG-26 | Sumur Migas | Karawang | 107° 26' 42.299" BT | 6° 3' 45.200" LS  | 3202-03 | 400,38    |
| 27                       | KPU-TB-MG-27 | Sumur Migas | Karawang | 107° 30' 2.710" BT  | 5° 53' 27.240" LS | 3202    | 3975,09   |
| 28                       | KPU-TB-MG-28 | Sumur Migas | Karawang | 107° 32' 52.048" BT | 5° 57' 43.726" LS | 3202-03 | 2108,61   |
| 29                       | KPU-TB-MG-29 | Sumur Migas | Karawang | 107° 31' 6.877" BT  | 6° 2' 15.441" LS  | 3202-03 | 4681,68   |
| 30                       | KPU-TB-MG-30 | Sumur Migas | Karawang | 107° 34' 20.512" BT | 6° 6' 1.451" LS   | 3202-03 | 1829,24   |

| KAWASAN PEMANFAATAN UMUM |              |             |          |                     |                   |         |           |
|--------------------------|--------------|-------------|----------|---------------------|-------------------|---------|-----------|
| ZONA PERTAMBANGAN        |              |             |          |                     |                   |         |           |
| No.                      | KODE_SZ      | KETERANGAN  | LOKASI   | KOORDINAT           |                   | NLP     | LUAS (HA) |
|                          |              |             |          | X                   | Y                 |         |           |
| 31                       | KPU-TB-MG-31 | Sumur Migas | Karawang | 107° 33' 43.999" BT | 6° 8' 55.999" LS  | 3202-03 | 400,45    |
| 32                       | KPU-TB-MG-32 | Sumur Migas | Karawang | 107° 36' 52.481" BT | 6° 9' 46.089" LS  | 3202-03 | 400,48    |
| 33                       | KPU-TB-MG-33 | Sumur Migas | Subang   | 107° 38' 52.501" BT | 6° 4' 25.898" LS  | 3202-03 | 400,50    |
| 34                       | KPU-TB-MG-34 | Sumur Migas | Subang   | 107° 40' 19.624" BT | 6° 1' 18.822" LS  | 3202-03 | 1976,65   |
| 35                       | KPU-TB-MG-35 | Sumur Migas | Subang   | 107° 42' 29.417" BT | 6° 5' 39.134" LS  | 3204-01 | 713,07    |
| 36                       | KPU-TB-MG-36 | Sumur Migas | Subang   | 107° 41' 32.302" BT | 6° 9' 45.189" LS  | 3204-01 | 400,53    |
| 37                       | KPU-TB-MG-37 | Sumur Migas | Subang   | 107° 39' 49.248" BT | 6° 12' 24.719" LS | 3202-03 | 971,21    |
| 38                       | KPU-TB-MG-38 | Sumur Migas | Subang   | 107° 48' 45.671" BT | 6° 4' 58.992" LS  | 3204-01 | 6965,21   |
| 39                       | KPU-TB-MG-39 | Sumur Migas | Subang   | 107° 48' 52.420" BT | 6° 0' 57.847" LS  | 3204-01 | 400,61    |
| 40                       | KPU-TB-MG-40 | Sumur Migas | Subang   | 107° 52' 31.593" BT | 6° 0' 10.213" LS  | 3204-01 | 1261,10   |
| 41                       | KPU-TB-MG-41 | Sumur Migas | Subang   | 107° 52' 53.220" BT | 6° 3' 35.858" LS  | 3204-01 | 400,66    |
| 42                       | KPU-TB-MG-42 | Sumur Migas | Subang   | 107° 51' 50.896" BT | 6° 9' 31.426" LS  | 3204-01 | 1091,13   |
| 43                       | KPU-TB-MG-43 | Sumur Migas | Subang   | 107° 55' 17.101" BT | 6° 7' 21.499" LS  | 3204-01 | 400,69    |
| 44                       | KPU-TB-MG-44 | Sumur Migas | Subang   | 107° 56' 50.578" BT | 6° 3' 8.725" LS   | 3204-01 | 3451,49   |
| 45                       | KPU-TB-MG-45 | Sumur Migas | Subang   | 107° 58' 56.915" BT | 6° 12' 51.358" LS | 3204-01 | 198,91    |
| 46                       | KPU-TB-MG-45 | Sumur Migas | Subang   | 107° 59' 50.161" BT | 6° 2' 50.239" LS  | 3204-01 | 588,31    |

| KAWASAN PEMANFAATAN UMUM |              |             |           |                     |                   |         |           |
|--------------------------|--------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------|---------|-----------|
| ZONA PERTAMBANGAN        |              |             |           |                     |                   |         |           |
| No.                      | KODE_SZ      | KETERANGAN  | LOKASI    | KOORDINAT           |                   | NLP     | LUAS (HA) |
|                          |              |             |           | X                   | Y                 |         |           |
| 47                       | KPU-TB-MG-46 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 2' 0.625" BT   | 6° 12' 36.848" LS | 3204-02 | 400,77    |
| 48                       | KPU-TB-MG-47 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 3' 26.333" BT  | 6° 17' 15.103" LS | 3204-02 | 481,11    |
| 49                       | KPU-TB-MG-48 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 4' 20.695" BT  | 6° 13' 54.532" LS | 3204-02 | 2497,40   |
| 50                       | KPU-TB-MG-49 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 7' 7.900" BT   | 6° 16' 17.697" LS | 3204-02 | 400,83    |
| 51                       | KPU-TB-MG-50 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 7' 10.978" BT  | 6° 10' 23.436" LS | 3204-02 | 636,40    |
| 52                       | KPU-TB-MG-51 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 5' 38.602" BT  | 6° 4' 49.899" LS  | 3204-03 | 400,81    |
| 53                       | KPU-TB-MG-52 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 8' 56.589" BT  | 6° 5' 54.815" LS  | 3204-03 | 5073,93   |
| 54                       | KPU-TB-MG-53 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 11' 12.300" BT | 6° 9' 50.607" LS  | 3204-02 | 400,88    |
| 55                       | KPU-TB-MG-54 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 9' 45.000" BT  | 6° 12' 6.997" LS  | 3204-02 | 400,86    |
| 56                       | KPU-TB-MG-55 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 12' 2.700" BT  | 6° 4' 53.258" LS  | 3204-03 | 400,89    |
| 57                       | KPU-TB-MG-56 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 12' 31.213" BT | 5° 54' 45.511" LS | 3204-03 | 796,89    |
| 58                       | KPU-TB-MG-57 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 14' 25.710" BT | 5° 53' 12.709" LS | 3204-03 | 400,93    |
| 59                       | KPU-TB-MG-58 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 14' 22.009" BT | 5° 50' 42.049" LS | 3204-03 | 400,93    |
| 60                       | KPU-TB-MG-59 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 14' 43.840" BT | 5° 46' 50.506" LS | 3204    | 375,37    |
| 61                       | KPU-TB-MG-60 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 14' 11.540" BT | 6° 5' 41.138" LS  | 3204-03 | 400,92    |
| 62                       | KPU-TB-MG-61 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 15' 3.899" BT  | 6° 7' 44.899" LS  | 3204-03 | 400,93    |

| KAWASAN PEMANFAATAN UMUM |              |             |           |                     |                   |         |           |
|--------------------------|--------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------|---------|-----------|
| ZONA PERTAMBANGAN        |              |             |           |                     |                   |         |           |
| No.                      | KODE_SZ      | KETERANGAN  | LOKASI    | KOORDINAT           |                   | NLP     | LUAS (HA) |
|                          |              |             |           | X                   | Y                 |         |           |
| 63                       | KPU-TB-MG-62 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 15' 2.621" BT  | 6° 9' 28.860" LS  | 3204-02 | 400,93    |
| 64                       | KPU-TB-MG-63 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 16' 37.999" BT | 6° 10' 44.128" LS | 3204-02 | 400,96    |
| 65                       | KPU-TB-MG-64 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 20' 23.240" BT | 6° 12' 7.998" LS  | 3204-04 | 401,00    |
| 66                       | KPU-TB-MG-65 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 21' 31.619" BT | 6° 9' 42.900" LS  | 3204-05 | 401,02    |
| 67                       | KPU-TB-MG-66 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 22' 24.488" BT | 6° 8' 19.128" LS  | 3204-05 | 401,03    |
| 68                       | KPU-TB-MG-67 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 23' 44.560" BT | 6° 7' 43.167" LS  | 3204-05 | 401,05    |
| 69                       | KPU-TB-MG-68 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 27' 23.130" BT | 6° 6' 51.000" LS  | 3204-05 | 401,10    |
| 70                       | KPU-TB-MG-69 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 26' 42.000" BT | 6° 10' 10.497" LS | 3204-05 | 401,09    |
| 71                       | KPU-TB-MG-70 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 25' 49.166" BT | 6° 13' 6.692" LS  | 3204-04 | 1063,19   |
| 72                       | KPU-TB-MG-71 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 22' 2.500" BT  | 6° 13' 23.137" LS | 3204-04 | 401,03    |
| 73                       | KPU-TB-MG-72 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 24' 54.512" BT | 6° 15' 50.828" LS | 3204-04 | 1807,47   |
| 74                       | KPU-TB-MG-73 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 27' 40.052" BT | 6° 15' 36.065" LS | 3204-04 | 401,10    |
| 75                       | KPU-TB-MG-74 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 29' 41.741" BT | 6° 12' 47.648" LS | 3204-04 | 401,13    |
| 76                       | KPU-TB-MG-75 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 30' 50.879" BT | 6° 14' 37.347" LS | 3204-04 | 401,15    |
| 77                       | KPU-TB-MG-76 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 28' 47.766" BT | 6° 17' 29.320" LS | 3204-04 | 843,58    |
| 78                       | KPU-TB-MG-77 | Sumur Migas | Indramayu | 108° 27' 1.505" BT  | 6° 18' 37.665" LS | 3204-04 | 401,09    |

| KAWASAN PEMANFAATAN UMUM |              |             |              |                     |                   |         |           |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------|-----------|
| ZONA PERTAMBANGAN        |              |             |              |                     |                   |         |           |
| No.                      | KODE_SZ      | KETERANGAN  | LOKASI       | KOORDINAT           |                   | NLP     | LUAS (HA) |
|                          |              |             |              | X                   | Y                 |         |           |
| 79                       | KPU-TB-MG-78 | Sumur Migas | Indramayu    | 108° 26' 0.330" BT  | 6° 20' 26.794" LS | 3204-04 | 717,99    |
| 80                       | KPU-TB-MG-79 | Sumur Migas | Indramayu    | 108° 30' 43.499" BT | 6° 19' 5.997" LS  | 3204-04 | 401,15    |
| 81                       | KPU-TB-MG-80 | Sumur Migas | Indramayu    | 108° 32' 7.778" BT  | 6° 18' 27.189" LS | 3204-04 | 401,17    |
| 82                       | KPU-TB-MG-81 | Sumur Migas | Indramayu    | 108° 33' 56.593" BT | 6° 16' 56.615" LS | 3204-04 | 1147,21   |
| 83                       | KPU-TB-MG-82 | Sumur Migas | Indramayu    | 108° 37' 46.050" BT | 6° 18' 51.289" LS | 3204-04 | 517,23    |
| 84                       | KPU-TB-MG-83 | Sumur Migas | Indramayu    | 108° 36' 7.592" BT  | 6° 19' 47.300" LS | 3204-04 | 910,38    |
| 85                       | KPU-TB-MG-84 | Sumur Migas | Indramayu    | 108° 33' 53.258" BT | 6° 20' 12.259" LS | 3204-04 | 401,19    |
| 86                       | KPU-TB-MG-85 | Sumur Migas | Indramayu    | 108° 40' 12.377" BT | 6° 20' 24.717" LS | 3204    | 478,39    |
| 87                       | KPU-TB-MG-86 | Sumur Migas | Indramayu    | 108° 38' 22.700" BT | 6° 20' 32.397" LS | 3204-04 | 401,26    |
| 88                       | KPU-TB-MG-87 | Sumur Migas | Indramayu    | 108° 34' 37.171" BT | 6° 23' 57.320" LS | 3204-04 | 401,20    |
| 89                       | KPU-TB-MG-88 | Sumur Migas | Indramayu    | 108° 32' 49.708" BT | 6° 27' 1.766" LS  | 3204-04 | 401,18    |
| 90                       | KPU-TB-MG-89 | Sumur Migas | Indramayu    | 108° 35' 17.401" BT | 6° 29' 16.449" LS | 3204-04 | 401,21    |
| 91                       | KPU-TB-MG-90 | Sumur Migas | Indramayu    | 108° 37' 23.853" BT | 6° 28' 13.008" LS | 3204-04 | 1210,66   |
| 92                       | KPU-TB-MG-91 | Sumur Migas | Indramayu    | 108° 42' 26.791" BT | 6° 27' 46.158" LS | 3204    | 401,32    |
| 93                       | KPU-TB-MG-92 | Sumur Migas | Indramayu    | 108° 38' 21.502" BT | 6° 33' 21.357" LS | 3204-06 | 401,26    |
| 94                       | KPU-TB-MG-93 | Sumur Migas | Kota Cirebon | 108° 40' 17.475" BT | 6° 41' 15.014" LS | 3204-06 | 308,70    |

| KAWASAN PEMANFAATAN UMUM |              |                      |              |                     |                   |         |           |
|--------------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------|-----------|
| ZONA PERTAMBANGAN        |              |                      |              |                     |                   |         |           |
| No.                      | KODE_SZ      | KETERANGAN           | LOKASI       | KOORDINAT           |                   | NLP     | LUAS (HA) |
|                          |              |                      |              | X                   | Y                 |         |           |
| 95                       | KPU-TB-MG-94 | Sumur Migas          | Kota Cirebon | 108° 36' 53.006" BT | 6° 44' 6.051" LS  | 3204-06 | 165,77    |
| 96                       | KPU-TB-PS-01 | Komoditas Pasir Besi | Sukabumi     | 106° 38' 25.598" BT | 7° 27' 20.755" LS | 3201-03 | 1053,93   |
| 97                       | KPU-TB-PS-02 | Komoditas Pasir Besi | Tasikmalaya  | 107° 57' 4.478" BT  | 7° 47' 21.991" LS | 3203-02 | 4762,00   |
| 98                       | KPU-TB-PS-03 | Komoditas Pasir Besi | Tasikmalaya  | 108° 13' 41.740" BT | 7° 50' 56.825" LS | 3203-02 | 9068,97   |

**KOORDINAT DAN LUASAN ZONA PELABUHAN**

| <b>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</b> |                |                                  |               |                    |                  |            |                  |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------|------------------|
| <b>ZONA PELABUHAN</b>           |                |                                  |               |                    |                  |            |                  |
| <b>No.</b>                      | <b>KODE_SZ</b> | <b>KETERANGAN</b>                | <b>LOKASI</b> | <b>KOORDINAT</b>   |                  | <b>NLP</b> | <b>LUAS (HA)</b> |
|                                 |                |                                  |               | <b>X</b>           | <b>Y</b>         |            |                  |
| 1                               | KPU-PL-DLK-01  | Pelabuhan Taruma Jaya            | Bekasi        | 106°59' 24,584" BT | 6°4' 10,103" LS  | 3202-01    | 940,84           |
| 2                               | KPU-PL-DLK-02  | Pelabuhan Patimban               | Subang        | 107°58' 15,693" BT | 6°9' 19,107" LS  | 3204-01    | 16.219,74        |
| 3                               | KPU-PL-DLK-03  | Pelabuhan Penyebrangan Tirtamaya | Indramayu     | 108°23' 58,534" BT | 6°21' 51,820" LS | 3204-04    | 139,44           |
| 4                               | KPU-PL-DLK-04  | Pelabuhan Cirebon                | Kota Cirebon  | 108°37' 13,557" BT | 6°42' 4,430" LS  | 3204-06    | 5.819,32         |
| 5                               | KPU-PL-DLK-05  | Pelabuhan Pelabuhan Ratu         | Sukabumi      | 106°32' 25,734" BT | 6°59' 1,149" LS  | 3201-02    | 6,10             |
| 6                               | KPU-PL-DLK-06  | Pelabuhan Teluk Palangpang       | Sukabumi      | 106°27' 4,823" BT  | 7°10' 47,627" LS | 3201-02    | 2,65             |
| 7                               | KPU-PL-DLK-07  | Pelabuhan Bojong Selawe          | Pangandaran   | 108°30' 31,913" BT | 7°43' 16,964" LS | 3203-03    | 212,08           |
| 8                               | KPU-PL-DLK-08  | Pelabuhan Majingklak             | Pangandaran   | 108°48' 4,238" BT  | 7°40' 36,061" LS | 3203-04    | 8,57             |
| 9                               | KPU-PL-DLK-09  | Tersus PT. Wilton - Sukabumi     | Sukabumi      | 106°32' 29,810" BT | 7°0' 2,168" LS   | 3201-02    | 1,08             |
| 10                              | KPU-PL-DLK-10  | Tersus PT. Mega Top – Cianjur    | Cianjur       | 107°14' 27,006" BT | 7°29' 26,511" LS | 3201-04    | 79,69            |
| 11                              | KPU-PL-WKO-01  | PPN Kejawanan - Lemah Wungkuk    | Kota Cirebon  | 108°34' 59,162" BT | 6°44' 0,467" LS  | 3204-06    | 63,73            |
| 12                              | KPU-PL-WKO-02  | PPN Pelabuhan Ratu               | Sukabumi      | 106°32' 17,426" BT | 6°59' 59,773" LS | 3201-02    | 223,91           |
| 13                              | KPU-PL-WKO-03  | PPP Eretan Wetan - Patrol        | Indramayu     | 108°0' 58,290" BT  | 6°17' 38,754" LS | 3204-02    | 1,99             |
| 14                              | KPU-PL-WKO-04  | PPP Bondet - Gunung Jati         | Cirebon       | 108°33' 54,252" BT | 6°38' 40,218" LS | 3204-06    | 114,36           |
| 15                              | KPU-PL-WKO-05  | PPP Cilauteureun - Cikelet       | Garut         | 107°41' 12,450" BT | 7°39' 45,554" LS | 3203-01    | 2,02             |

| KAWASAN PEMANFAATAN UMUM |               |                                  |           |                    |                  |         |           |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|--------------------|------------------|---------|-----------|
| ZONA PELABUHAN           |               |                                  |           |                    |                  |         |           |
| No.                      | KODE_SZ       | KETERANGAN                       | LOKASI    | KOORDINAT          |                  | NLP     | LUAS (HA) |
|                          |               |                                  |           | X                  | Y                |         |           |
| 16                       | KPU-PL-WKO-06 | PPI Paljaya - Taruma Jaya        | Bekasi    | 106°59' 20,797" BT | 6°5' 12,849" LS  | 3202-01 | 2,00      |
| 17                       | KPU-PL-WKO-07 | PPI Muara Bendera - Muaragembong | Bekasi    | 107°0' 55,816" BT  | 5°57' 28,957" LS | 3202-01 | 2,00      |
| 18                       | KPU-PL-WKO-08 | PPI Muara Jaya - Muaragembong    | Bekasi    | 106°59' 31,801" BT | 6°1' 35,415" LS  | 3202-01 | 2,00      |
| 19                       | KPU-PL-WKO-09 | PPI Tanjung Pakis - Pakisjaya    | Karawang  | 107°8' 1,007" BT   | 5°58' 34,686" LS | 3202-02 | 2,00      |
| 20                       | KPU-PL-WKO-10 | PPI Sedari - Cibuaya             | Karawang  | 107°18' 25,122" BT | 5°57' 29,868" LS | 3202-02 | 2,01      |
| 21                       | KPU-PL-WKO-11 | PPI Cemara - Cibuaya             | Karawang  | 107°23' 19,526" BT | 6°1' 0,142" LS   | 3202-03 | 2,02      |
| 22                       | KPU-PL-WKO-12 | PPI Sungai Buntu - Pedes         | Karawang  | 107°24' 38,150" BT | 6°3' 4,801" LS   | 3202-03 | 6,11      |
| 23                       | KPU-PL-WKO-13 | PPI Pasir Putih - Cilamaya Kuon  | Karawang  | 107°32' 50,571" BT | 6°10' 39,997" LS | 3202-03 | 4,00      |
| 24                       | KPU-PL-WKO-14 | PPI Tengkolak - Cilamaya Wetan   | Karawang  | 107°33' 43,648" BT | 6°10' 48,971" LS | 3202-03 | 1,99      |
| 25                       | KPU-PL-WKO-15 | PPI Rawameneng - Blanakan        | Subang    | 107°38' 43,193" BT | 6°13' 22,421" LS | 3202-03 | 2,04      |
| 26                       | KPU-PL-WKO-16 | PPI Mayangan - Legon Kulon       | Subang    | 107°46' 51,252" BT | 6°12' 17,726" LS | 3204-01 | 2,01      |
| 27                       | KPU-PL-WKO-17 | PPI Genteng - Pusakanagara       | Subang    | 107°53' 51,444" BT | 6°14' 20,199" LS | 3204-01 | 1,99      |
| 28                       | KPU-PL-WKO-18 | PPI Ujung Gebang - Sukra         | Indramayu | 107°55' 12,072" BT | 6°14' 54,503" LS | 3204-01 | 2,02      |
| 29                       | KPU-PL-WKO-19 | PPI Sukahaji - Patrol            | Indramayu | 108°2' 1,914" BT   | 6°18' 13,822" LS | 3204-02 | 13,88     |
| 30                       | KPU-PL-WKO-20 | PPI Eretan Kulon - Kandanghaur   | Indramayu | 108°7' 43,884" BT  | 6°20' 2,444" LS  | 3204-02 | 1,99      |
| 31                       | KPU-PL-WKO-21 | PPI Majakerta - Juntinyuat       | Indramayu | 108°24' 27,258" BT | 6°23' 2,620" LS  | 3204-04 | 5,83      |

| KAWASAN PEMANFAATAN UMUM |               |                             |              |                    |                  |         |           |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------------|------------------|---------|-----------|
| ZONA PELABUHAN           |               |                             |              |                    |                  |         |           |
| No.                      | KODE_SZ       | KETERANGAN                  | LOKASI       | KOORDINAT          |                  | NLP     | LUAS (HA) |
|                          |               |                             |              | X                  | Y                |         |           |
| 32                       | KPU-PL-WKO-22 | PPI Lombang - Juntinyuat    | Indramayu    | 108°25' 14,236" BT | 6°24' 2,836" LS  | 3204-04 | 11,54     |
| 33                       | KPU-PL-WKO-23 | PPI Glayem - Juntinyuat     | Indramayu    | 108°25' 54,547" BT | 6°24' 46,726" LS | 3204-04 | 13,35     |
| 34                       | KPU-PL-WKO-24 | PPI Limbangan - Juntinyuat  | Indramayu    | 108°26' 26,282" BT | 6°25' 18,226" LS | 3204-04 | 2,03      |
| 35                       | KPU-PL-WKO-25 | PPI Dadap - Juntinyuat      | Indramayu    | 108°27' 17,442" BT | 6°26' 4,628" LS  | 3204-04 | 2,00      |
| 36                       | KPU-PL-WKO-26 | PPI Karangsong/Indramayu    | Indramayu    | 108°22' 7,764" BT  | 6°18' 17,810" LS | 3204-04 | 22,86     |
| 37                       | KPU-PL-WKO-27 | PPI Mundu Pasir - Mundu     | Cirebon      | 108°35' 45,076" BT | 6°45' 11,749" LS | 3204-06 | 7,08      |
| 38                       | KPU-PL-WKO-28 | PPI Bandengan - Mundu       | Cirebon      | 108°35' 58,738" BT | 6°45' 33,637" LS | 3204-06 | 2,03      |
| 39                       | KPU-PL-WKO-29 | PPI Pesisir - Lemah Wungkuk | Kota Cirebon | 108°34' 9,020" BT  | 6°42' 20,183" LS | 3204-06 | 7,20      |
| 40                       | KPU-PL-WKO-30 | PPI Cangkol - Lemah Wungkuk | Kota Cirebon | 108°34' 41,633" BT | 6°43' 32,217" LS | 3204-06 | 2,01      |
| 41                       | KPU-PL-WKO-31 | PPI Gebang Mekar - Gebang   | Cirebon      | 108°43' 47,278" BT | 6°48' 24,846" LS | 3204-06 | 32,79     |
| 42                       | KPU-PL-WKO-32 | PPI Ambulu - Losari         | Cirebon      | 108°48' 8,349" BT  | 6°47' 18,274" LS | 3204-06 | 15,50     |
| 43                       | KPU-PL-WKO-33 | PPI Cikembang - Cisolok     | Sukabumi     | 106°24' 54,108" BT | 6°58' 0,552" LS  | 3201-02 | 2,03      |
| 44                       | KPU-PL-WKO-34 | PPI Cibangban - Cisolok     | Sukabumi     | 106°25' 41,292" BT | 6°57' 32,097" LS | 3201-02 | 2,03      |
| 45                       | KPU-PL-WKO-35 | PPI Cisolok - Cisolok       | Sukabumi     | 106°26' 23,203" BT | 6°57' 11,764" LS | 3201-02 | 13,65     |
| 46                       | KPU-PL-WKO-36 | PPI Cikembang               | Sukabumi     | 106°30' 45,953" BT | 6°58' 1,899" LS  | 3201-02 | 6,81      |
| 47                       | KPU-PL-WKO-37 | PPI Loji - Simpenan         | Sukabumi     | 106°32' 34,076" BT | 7°2' 51,047" LS  | 3201-02 | 2,01      |

| KAWASAN PEMANFAATAN UMUM |               |                              |             |                    |                  |         |           |
|--------------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|---------|-----------|
| ZONA PELABUHAN           |               |                              |             |                    |                  |         |           |
| No.                      | KODE_SZ       | KETERANGAN                   | LOKASI      | KOORDINAT          |                  | NLP     | LUAS (HA) |
|                          |               |                              |             | X                  | Y                |         |           |
| 48                       | KPU-PL-WKO-38 | PPI Ciwaru - Ciemas          | Sukabumi    | 106°27' 15,725" BT | 7°11' 8,791" LS  | 3201-02 | 1,99      |
| 49                       | KPU-PL-WKO-39 | PPI Kalapa Condong           | Sukabumi    | 106°23' 55,454" BT | 7°22' 13,033" LS | 3201-01 | 2,70      |
| 50                       | KPU-PL-WKO-40 | PPI Ujung Genteng - Ciracap  | Sukabumi    | 106°24' 19,835" BT | 7°22' 22,638" LS | 3201-01 | 2,02      |
| 51                       | KPU-PL-WKO-41 | PPI Mina Jaya - Surade       | Sukabumi    | 106°30' 48,918" BT | 7°23' 54,590" LS | 3201-01 | 2,02      |
| 52                       | KPU-PL-WKO-42 | PPI Cikakap - Agrabinta      | Cianjur     | 106°56' 48,039" BT | 7°26' 31,340" LS | 3201-04 | 2,02      |
| 53                       | KPU-PL-WKO-43 | PPI Jayanti - Cidaun         | Cianjur     | 107°23' 12,336" BT | 7°29' 59,086" LS | 3201-05 | 3,86      |
| 54                       | KPU-PL-WKO-44 | PPI Cigebang - Cidaun        | Cianjur     | 107°24' 13,201" BT | 7°30' 4,696" LS  | 3201-05 | 2,00      |
| 55                       | KPU-PL-WKO-45 | PPI Rancabuaya - Caringin    | Garut       | 107°28' 47,633" BT | 7°31' 50,045" LS | 3201-05 | 2,00      |
| 56                       | KPU-PL-WKO-46 | PPI Cicalobak - Mekarmukti   | Garut       | 107°31' 39,781" BT | 7°32' 50,269" LS | 3201-05 | 1,45      |
| 57                       | KPU-PL-WKO-47 | PPI Cimari Muara - Pakenjeng | Garut       | 107°37' 0,370" BT  | 7°35' 0,658" LS  | 3203-01 | 2,03      |
| 58                       | KPU-PL-WKO-48 | PPI Cijeruk - Cibalong       | Garut       | 107°50' 4,356" BT  | 7°42' 22,163" LS | 3203-01 | 2,03      |
| 59                       | KPU-PL-WKO-49 | PPI Sancang - Cibalong       | Garut       | 107°51' 9,404" BT  | 7°44' 10,661" LS | 3203-01 | 1,99      |
| 60                       | KPU-PL-WKO-50 | PPI Pamayangsari - Cipatujah | Tasikmalaya | 108°5' 13,240" BT  | 7°46' 20,466" LS | 3203-02 | 4,03      |
| 61                       | KPU-PL-WKO-51 | PPI Nusa Cimanuk Cikalong    | Tasikmalaya | 108°19' 15,614" BT | 7°48' 54,724" LS | 3203-03 | 2,03      |
| 62                       | KPU-PL-WKO-52 | PPI Muara Gatah - Cimerak    | Pangandaran | 108°21' 53,790" BT | 7°48' 59,564" LS | 3203-03 | 2,02      |
| 63                       | KPU-PL-WKO-53 | PPI Legok Jawa - Cimerak     | Pangandaran | 108°26' 53,914" BT | 7°48' 50,360" LS | 3203-03 | 2,02      |

| KAWASAN PEMANFAATAN UMUM |               |                              |             |                    |                  |         |           |
|--------------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|---------|-----------|
| ZONA PELABUHAN           |               |                              |             |                    |                  |         |           |
| No.                      | KODE_SZ       | KETERANGAN                   | LOKASI      | KOORDINAT          |                  | NLP     | LUAS (HA) |
|                          |               |                              |             | X                  | Y                |         |           |
| 64                       | KPU-PL-WKO-54 | PPI Madasari - Cimerak       | Pangandaran | 108°29' 1,487" BT  | 7°47' 54,534" LS | 3203-03 | 2,05      |
| 65                       | KPU-PL-WKO-55 | PPI Batu Karas - Cijulang    | Pangandaran | 108°29' 51,740" BT | 7°44' 18,370" LS | 3203-03 | 2,03      |
| 66                       | KPU-PL-WKO-56 | PPI Nusawiru - Cijulang      | Pangandaran | 108°29' 51,973" BT | 7°43' 26,097" LS | 3203-03 | 2,03      |
| 67                       | KPU-PL-WKO-57 | PPI Bojong Selawe - Parigi   | Pangandaran | 108°30' 7,482" BT  | 7°42' 50,338" LS | 3203-03 | 2,04      |
| 68                       | KPU-PL-WKO-58 | PPI Cikidang - Pangandaran   | Pangandaran | 108°40' 22,298" BT | 7°41' 5,243" LS  | 3203-04 | 22,02     |
| 69                       | KPU-PL-WKO-59 | PPI Plataragung - Kalipucang | Pangandaran | 108°47' 26,402" BT | 7°41' 27,219" LS | 3203-04 | 2,01      |

**KOORDINAT DAN LUASAN ZONA PARIWISATA**

| KAWASAN PEMANFAATAN UMUM |              |  |             |                    |                  |         |           |
|--------------------------|--------------|--|-------------|--------------------|------------------|---------|-----------|
| ZONA PARIWISATA          |              |  |             |                    |                  |         |           |
| No.                      | KODE_SZ      | KETERANGAN                                 | LOKASI      | KOORDINAT          |                  | NLP     | LUAS (HA) |
|                          |              |  |             | X                  | Y                |         |           |
| 1                        | KPU-W-OR-01  | Olahraga Air Cimaja - Cikakak              | Sukabumi    | 106°29' 51,278" BT | 6°58' 26,130" LS | 3201-02 | 145,35    |
| 2                        | KPU-W-OR-02  | Wisata Air Palabuhan Ratu - Palabuhan Ratu | Sukabumi    | 106°30' 45,616" BT | 6°58' 34,191" LS | 3201-02 | 116,36    |
| 3                        | KPU-W-OR-03  | Olahraga Air Batu Karas                    | Pangandaran | 108°30' 27,859" BT | 7°43' 38,633" LS | 3203-03 | 14,17     |
| 4                        | KPU-W-P3K-01 | Pantai Muara Gembong - Muara Gembong       | Bekasi      | 107°0' 54,109" BT  | 5°58' 8,298" LS  | 3202-01 | 18,79     |
| 5                        | KPU-W-P3K-02 | Pantai Mekar - Muara Gembong               | Bekasi      | 107°0' 41,070" BT  | 5°56' 54,808" LS | 3202-01 | 11,41     |
| 6                        | KPU-W-P3K-03 | Pantai Muara Bendera - Muara Gembong       | Bekasi      | 107°0' 10,247" BT  | 5°55' 45,488" LS | 3202-01 | 10,27     |
| 7                        | KPU-W-P3K-04 | Pantai Muara Beting - Muara Gembong        | Bekasi      | 107°3' 0,863" BT   | 5°55' 21,824" LS | 3202-01 | 16,60     |
| 8                        | KPU-W-P3K-05 | Pantai Tanjung Pakis - Pakisjaya           | Karawang    | 107°7' 50,037" BT  | 5°58' 21,521" LS | 3202-02 | 14,08     |
| 9                        | KPU-W-P3K-06 | Pantai Sedari - Cibuaya                    | Karawang    | 107°18' 27,222" BT | 5°57' 22,520" LS | 3202-02 | 35,71     |
| 10                       | KPU-W-P3K-07 | Pantai Samudera Baru- Pedes                | Karawang    | 107°23' 51,351" BT | 6°1' 30,144" LS  | 3202-03 | 46,17     |
| 11                       | KPU-W-P3K-08 | Pantai Pelangi - Pedes                     | Karawang    | 107°24' 20,678" BT | 6°2' 7,958" LS   | 3202-03 | 27,72     |
| 12                       | KPU-W-P3K-09 | Pantai Pedes - Pedes                       | Karawang    | 107°24' 27,901" BT | 6°2' 20,267" LS  | 3202-03 | 28,94     |
| 13                       | KPU-W-P3K-10 | Pantai Pisangan - Pedes                    | Karawang    | 107°24' 47,517" BT | 6°2' 54,617" LS  | 3202-03 | 37,29     |
| 14                       | KPU-W-P3K-11 | Pantai Cilebar - Cibuaya                   | Karawang    | 107°26' 31,192" BT | 6°5' 46,957" LS  | 3202-03 | 34,98     |
| 15                       | KPU-W-P3K-12 | Pantai Tanjung Baru - Cilamaya             | Karawang    | 107°30' 53,789" BT | 6°9' 49,862" LS  | 3202-03 | 14,81     |
| 16                       | KPU-W-P3K-13 | Pantai Cilamaya Kulon - Cilamaya Kulon     | Karawang    | 107°31' 26,482" BT | 6°10' 7,834" LS  | 3202-03 | 11,55     |
| 17                       | KPU-W-P3K-14 | Pantai Cilamaya Wetan - Cilamaya Wetan     | Karawang    | 107°34' 52,501" BT | 6°11' 15,149" LS | 3202-03 | 15,42     |

| KAWASAN PEMANFAATAN UMUM |              |                                  |              |                     |                   |         |           |
|--------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------|-----------|
| ZONA PARIWISATA          |              |                                  |              |                     |                   |         |           |
| No.                      | KODE_SZ      | KETERANGAN                       | LOKASI       | KOORDINAT           |                   | NLP     | LUAS (HA) |
|                          |              |                                  |              | X                   | Y                 |         |           |
| 18                       | KPU-W-P3K-15 | Pantai Pondok Bali - Legon Kulon | Subang       | 107°47' 54,470" BT  | 6°11' 54,647" LS  | 3204-01 | 53,28     |
| 19                       | KPU-W-P3K-16 | Pantai Blanakan                  | Subang       | 107° 40' 18.027" BT | 6° 14' 21.273" LS | 3204-01 | 8,66      |
| 20                       | KPU-W-P3K-17 | Pantai Anggasari                 | Subang       | 107°44' 19,574" BT  | 6°13' 32,762" LS  | 3204-01 | 0,46      |
| 21                       | KPU-W-P3K-18 | Pantai Cirewang                  | Subang       | 107°51' 4,755" BT   | 6°11' 17,088" LS  | 3204-01 | 2,77      |
| 22                       | KPU-W-P3K-19 | Pantai Sumur Adem - Sukra        | Indramayu    | 107°58' 41,812" BT  | 6°16' 19,647" LS  | 3204-01 | 4,76      |
| 23                       | KPU-W-P3K-20 | Pantai Eretan - Kandanghaur      | Indramayu    | 108°6' 12,131" BT   | 6°19' 33,813" LS  | 3204-02 | 21,54     |
| 24                       | KPU-W-P3K-21 | Pulau Biawak                     | Indramayu    | 108°22' 32,060" BT  | 5°55' 54,033" LS  | 3204-05 | 1,60      |
| 25                       | KPU-W-P3K-22 | Pantai Karangsong - Indramayu    | Indramayu    | 108°22' 4,108" BT   | 6°18' 21,359" LS  | 3204-04 | 5,78      |
| 26                       | KPU-W-P3K-23 | Pantai Lemah Abang - Indramayu   | Indramayu    | 108°22' 3,482" BT   | 6°18' 31,224" LS  | 3204-04 | 3,69      |
| 27                       | KPU-W-P3K-24 | Pantai Balongan - Balongan       | Indramayu    | 108°22' 34,853" BT  | 6°20' 9,015" LS   | 3204-04 | 14,72     |
| 28                       | KPU-W-P3K-25 | Pantai Glayem - Juntinyuat       | Indramayu    | 108°24' 25,508" BT  | 6°22' 55,869" LS  | 3204-04 | 12,68     |
| 29                       | KPU-W-P3K-26 | Pantai Tirta Maya - Juntinyuat   | Indramayu    | 108°25' 41,443" BT  | 6°24' 27,215" LS  | 3204-04 | 18,03     |
| 30                       | KPU-W-P3K-27 | Pantai Juntinyuat - Juntinyuat   | Indramayu    | 108°27' 6,744" BT   | 6°25' 54,634" LS  | 3204-04 | 20,01     |
| 31                       | KPU-W-P3K-28 | Pantai Jadimulya - Kejaksan      | Kota Cirebon | 108°34' 0,154" BT   | 6°41' 55,824" LS  | 3204-06 | 8,58      |
| 32                       | KPU-W-P3K-29 | Pantai Kesenden - Kejaksan       | Kota Cirebon | 108°34' 4,139" BT   | 6°42' 7,403" LS   | 3204-06 | 8,46      |
| 33                       | KPU-W-P3K-30 | Pantai Kejawanan - Lemah Wungkuk | Cirebon      | 108°35' 22,578" BT  | 6°44' 33,166" LS  | 3204-06 | 11,67     |
| 34                       | KPU-W-P3K-31 | Pantai Gebang - Gebang           | Cirebon      | 108°44' 1,211" BT   | 6°48' 29,960" LS  | 3204-06 | 4,93      |
| 35                       | KPU-W-P3K-32 | Pantai Cibangban - Cisolok       | Sukabumi     | 106°25' 31,385" BT  | 6°57' 37,106" LS  | 3201-02 | 16,94     |

| KAWASAN PEMANFAATAN UMUM |              |  |          |                    |                  |         |           |
|--------------------------|--------------|--|----------|--------------------|------------------|---------|-----------|
| ZONA PARIWISATA          |              |  |          |                    |                  |         |           |
| No.                      | KODE_SZ      | KETERANGAN                             | LOKASI   | KOORDINAT          |                  | NLP     | LUAS (HA) |
|                          |              |  |          | X                  | Y                |         |           |
| 36                       | KPU-W-P3K-33 | Pantai Cisolok - Cisolok               | Sukabumi | 106°26' 12,047" BT | 6°57' 23,886" LS | 3201-02 | 7,90      |
| 37                       | KPU-W-P3K-34 | Pantai Citepus - Cisolok               | Sukabumi | 106°27' 50,188" BT | 6°57' 26,369" LS | 3201-02 | 13,40     |
| 38                       | KPU-W-P3K-35 | Pantai Cimaja - Cikakak                | Sukabumi | 106°29' 43,322" BT | 6°57' 49,708" LS | 3201-02 | 13,96     |
| 39                       | KPU-W-P3K-36 | Pantai Sukawayana - Cisolok            | Sukabumi | 106°30' 25,197" BT | 6°57' 54,001" LS | 3201-02 | 9,85      |
| 40                       | KPU-W-P3K-37 | Pantai Cikembang - Palabuhan Ratu      | Sukabumi | 106°30' 55,636" BT | 6°58' 6,538" LS  | 3201-02 | 11,65     |
| 41                       | KPU-W-P3K-38 | Pantai Palabuhan Ratu - Palabuhan Ratu | Sukabumi | 106°30' 31,019" BT | 6°58' 12,804" LS | 3201-02 | 248,40    |
| 42                       | KPU-W-P3K-39 | Pantai Loji - Simpenan                 | Sukabumi | 106°32' 30,451" BT | 7°2' 20,056" LS  | 3201-02 | 13,54     |
| 43                       | KPU-W-P3K-40 | Pantai Sangrawayang- Simpenan          | Sukabumi | 106°32' 29,838" BT | 7°2' 30,569" LS  | 3201-02 | 10,14     |
| 44                       | KPU-W-P3K-41 | Pantai Karang Hawu - Simpenan          | Sukabumi | 106°32' 1,503" BT  | 7°3' 37,764" LS  | 3201-02 | 48,53     |
| 45                       | KPU-W-P3K-42 | Pantai Ciletuh - Ciracap               | Sukabumi | 106°22' 37,549" BT | 7°15' 57,808" LS | 3201-01 | 259,48    |
| 46                       | KPU-W-P3K-43 | Pantai Cibuaya - Ciracap               | Sukabumi | 106°24' 2,095" BT  | 7°21' 13,584" LS | 3201-01 | 73,37     |
| 47                       | KPU-W-P3K-44 | Pantai Pangumbahan - Ciracap           | Sukabumi | 106°24' 1,273" BT  | 7°22' 23,458" LS | 3201-01 | 7,82      |
| 48                       | KPU-W-P3K-45 | Pantai Ujung Genteng - Ciracap         | Sukabumi | 106°24' 13,329" BT | 7°22' 53,767" LS | 3201-01 | 49,49     |
| 49                       | KPU-W-P3K-46 | Pantai Minajaya - Surade               | Sukabumi | 106°31' 51,172" BT | 7°24' 39,827" LS | 3201-01 | 49,19     |
| 50                       | KPU-W-P3K-47 | Pantai Sinar Laut - Agrabinta          | Cianjur  | 106°47' 54,863" BT | 7°26' 15,830" LS | 3201-03 | 26,41     |
| 51                       | KPU-W-P3K-48 | Pantai Mekarjati - Agrabinta           | Cianjur  | 106°49' 8,394" BT  | 7°26' 10,832" LS | 3201-03 | 48,77     |
| 52                       | KPU-W-P3K-49 | Pantai Lugina - Agrabinta              | Cianjur  | 106°58' 59,910" BT | 7°26' 54,071" LS | 3201-04 | 98,11     |
| 53                       | KPU-W-P3K-50 | Pantai Karang Potong - Sindang Barang  | Cianjur  | 107°10' 3,875" BT  | 7°28' 20,166" LS | 3201-04 | 34,35     |

| KAWASAN PEMANFAATAN UMUM |              |                                       |             |                    |                  |         |           |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|---------|-----------|
| ZONA PARIWISATA          |              |                                       |             |                    |                  |         |           |
| No.                      | KODE_SZ      | KETERANGAN                            | LOKASI      | KOORDINAT          |                  | NLP     | LUAS (HA) |
|                          |              |                                       |             | X                  | Y                |         |           |
| 54                       | KPU-W-P3K-51 | Pantai Apra - Sindangbarang           | Cianjur     | 107°10' 54,046" BT | 7°28' 32,577" LS | 3201-04 | 28,43     |
| 55                       | KPU-W-P3K-52 | Pantai Ciwidig - Cidaun               | Cianjur     | 107°19' 15,800" BT | 7°29' 56,410" LS | 3201-05 | 148,55    |
| 56                       | KPU-W-P3K-53 | Pantai Jayanti - Cidaun               | Cianjur     | 107°23' 48,107" BT | 7°29' 49,801" LS | 3201-05 | 24,23     |
| 57                       | KPU-W-P3K-54 | Pantai Batu Kukumbung - Cidaun        | Cianjur     | 107°24' 10,155" BT | 7°30' 1,288" LS  | 3201-05 | 3,70      |
| 58                       | KPU-W-P3K-55 | Pantai Cidora - Cisewu                | Garut       | 107°28' 33,976" BT | 7°31' 16,856" LS | 3201-05 | 2,11      |
| 59                       | KPU-W-P3K-56 | Pantai Cisewu - Cisewu                | Garut       | 107°28' 40,705" BT | 7°31' 43,557" LS | 3201-05 | 1,72      |
| 60                       | KPU-W-P3K-57 | Pantai Ranca Buaya - Cisewu           | Garut       | 107°28' 45,360" BT | 7°31' 46,727" LS | 3201-05 | 1,66      |
| 61                       | KPU-W-P3K-58 | Pantai Bungbulang - Bungbulang        | Garut       | 107°29' 55,690" BT | 7°32' 11,443" LS | 3201-05 | 3,72      |
| 62                       | KPU-W-P3K-59 | Pantai Cicalobak - Bungbulang         | Garut       | 107°31' 44,287" BT | 7°32' 51,762" LS | 3201-05 | 1,94      |
| 63                       | KPU-W-P3K-60 | Pantai Mekarmukti - Bungbulang        | Garut       | 107°32' 12,467" BT | 7°33' 11,262" LS | 3201-05 | 0,16      |
| 64                       | KPU-W-P3K-61 | Pantai Cijayana - Cikelet             | Garut       | 107°39' 50,263" BT | 7°37' 14,990" LS | 3203-01 | 27,88     |
| 65                       | KPU-W-P3K-62 | Pantai Santolo - Cikelet              | Garut       | 107°40' 51,772" BT | 7°38' 19,799" LS | 3203-01 | 24,47     |
| 66                       | KPU-W-P3K-63 | Pantai Sayang Heulang - Cikelet       | Garut       | 107°41' 4,528" BT  | 7°38' 53,200" LS | 3203-01 | 17,44     |
| 67                       | KPU-W-P3K-64 | Pantai Cilautereun - Cikelet          | Garut       | 107°41' 14,464" BT | 7°39' 25,261" LS | 3203-01 | 18,54     |
| 68                       | KPU-W-P3K-65 | Pantai Cijeruk - Pamengpeuk           | Garut       | 107°44' 4,979" BT  | 7°40' 14,620" LS | 3203-01 | 6,03      |
| 69                       | KPU-W-P3K-66 | Pantai Karang Tawulan - Karangnunggal | Tasikmalaya | 108°7' 29,900" BT  | 7°46' 47,592" LS | 3203-02 | 38,02     |
| 70                       | KPU-W-P3K-67 | Pantai Cipatujah - Cikalong           | Tasikmalaya | 108°18' 29,347" BT | 7°48' 47,808" LS | 3203-03 | 30,28     |
| 71                       | KPU-W-P3K-68 | Pantai Pamayangsari - Cikalong        | Tasikmalaya | 108°18' 56,981" BT | 7°48' 51,855" LS | 3203-03 | 25,54     |

| KAWASAN PEMANFAATAN UMUM |              |  |             |                    |                  |         |           |
|--------------------------|--------------|--|-------------|--------------------|------------------|---------|-----------|
| ZONA PARIWISATA          |              |  |             |                    |                  |         |           |
| No.                      | KODE_SZ      | KETERANGAN                             | LOKASI      | KOORDINAT          |                  | NLP     | LUAS (HA) |
|                          |              |  |             | X                  | Y                |         |           |
| 72                       | KPU-W-P3K-69 | Pantai Madasari - Cimerak              | Pangandaran | 108°29' 49,217" BT | 7°47' 33,503" LS | 3203-03 | 6,52      |
| 73                       | KPU-W-P3K-70 | Pantai Batu Karas - Cijulang           | Pangandaran | 108°30' 24,062" BT | 7°44' 46,618" LS | 3203-03 | 191,38    |
| 74                       | KPU-W-P3K-71 | Pantai Cijulang Cijulang               | Pangandaran | 108°30' 0,383" BT  | 7°43' 43,497" LS | 3203-03 | 5,59      |
| 75                       | KPU-W-P3K-72 | Pantai Batu Hiu - Parigi               | Pangandaran | 108°32' 8,207" BT  | 7°41' 51,857" LS | 3203-03 | 264,76    |
| 76                       | KPU-W-P3K-73 | Pantai Karang Tirta - Sidamulih        | Pangandaran | 108°35' 10,313" BT | 7°41' 27,084" LS | 3203-04 | 281,69    |
| 77                       | KPU-W-P3K-74 | Pantai Barat Pangandaran - Pangandaran | Pangandaran | 108°38' 47,964" BT | 7°41' 41,554" LS | 3203-04 | 157,17    |
| 78                       | KPU-W-P3K-75 | Pantai Timur Pangandaran - Pangandaran | Pangandaran | 108°40' 8,190" BT  | 7°41' 34,757" LS | 3203-04 | 171,08    |
| 79                       | KPU-W-P3K-76 | Pantai Lembah Putri - Kalipucang       | Pangandaran | 108°42' 13,792" BT | 7°40' 50,503" LS | 3203-04 | 133,77    |
| 80                       | KPU-W-P3K-77 | Pantai Karang Nini - Kalipucang        | Pangandaran | 108°43' 37,172" BT | 7°41' 8,107" LS  | 3203-04 | 150,84    |
| 81                       | KPU-W-P3K-78 | Pantai Karapyak - Kalipucang           | Pangandaran | 108°45' 35,646" BT | 7°41' 47,158" LS | 3203-04 | 15,14     |

**KOORDINAT DAN LUASAN PIPA BAWAH LAUT**

| <b>PIPA BAWAH LAUT</b>                                |                |               |                     |                   |            |                  |
|---|----------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|
| <b>PIPA BAWAH LAUT UNTUK MINYAK BUMI DAN GAS BUMI</b> |                |               |                     |                   |            |                  |
| <b>No.</b>  | <b>KODE_SZ</b> | <b>LOKASI</b> | <b>KOORDINAT</b>    |                   | <b>NLP</b> | <b>LUAS (HA)</b> |
|   |                |               | <b>X</b>            | <b>Y</b>          |            |                  |
| 1   | AL-APK-GM-01   | Bekasi        | 106° 58' 41.324" BT | 6° 2' 31.825" LS  | 3202-01    | 112,19           |
| 2   | AL-APK-GM-02   | Bekasi        | 106° 59' 17.461" BT | 6° 2' 18.520" LS  | 3202-01    | 286,35           |
| 3   | AL-APK-GM-03   | Bekasi        | 106° 59' 42.084" BT | 5° 48' 51.540" LS | 3202       | 612,41           |
| 4   | AL-APK-GM-04   | Bekasi        | 106° 58' 2.210" BT  | 5° 45' 45.520" LS | 3202       | 1251,09          |
| 5   | AL-APK-GM-05   | Bekasi        | 107° 10' 13.087" BT | 5° 49' 42.205" LS | 3202-02    | 1852,60          |
| 6   | AL-APK-GM-06   | Bekasi        | 107° 10' 5.712" BT  | 5° 51' 8.549" LS  | 3202-02    | 1828,16          |
| 7   | AL-APK-GM-07   | Karawang      | 107° 13' 36.397" BT | 5° 52' 17.273" LS | 3202-02    | 1534,74          |
| 8   | AL-APK-GM-08   | Karawang      | 107° 15' 1.424" BT  | 5° 55' 11.865" LS | 3202-02    | 318,79           |
| 9   | AL-APK-GM-09   | Karawang      | 107° 24' 10.605" BT | 5° 52' 48.862" LS | 3202       | 5984,97          |
| 10  | AL-APK-GM-10   | Karawang      | 107° 23' 56.601" BT | 5° 54' 32.698" LS | 3202       | 3752,38          |
| 11  | AL-APK-GM-11   | Karawang      | 107° 25' 20.096" BT | 5° 59' 14.878" LS | 3202-03    | 3311,65          |
| 12  | AL-APK-GM-12   | Karawang      | 107° 34' 15.908" BT | 6° 1' 46.661" LS  | 3202-03    | 3340,90          |
| 13  | AL-APK-GM-13   | Subang        | 107° 40' 59.960" BT | 6° 6' 30.911" LS  | 3202-03    | 4777,66          |
| 14  | AL-APK-GM-14   | Subang        | 107° 53' 25.565" BT | 6° 4' 35.129" LS  | 3204-01    | 4546,41          |
| 15  | AL-APK-GM-15   | Subang        | 107° 51' 35.405" BT | 6° 2' 50.195" LS  | 3204-01    | 716,69           |
| 16  | AL-APK-GM-16   | Subang        | 107° 57' 33.558" BT | 6° 1' 10.956" LS  | 3204-01    | 580,26           |
| 17  | AL-APK-GM-17   | Indramayu     | 108° 6' 26.618" BT  | 6° 3' 30.466" LS  | 3204-03    | 273,47           |

| PIPA BAWAH LAUT                                |              |              |                     |                   |         |           |
|--|--------------|--------------|---------------------|-------------------|---------|-----------|
| PIPA BAWAH LAUT UNTUK MINYAK BUMI DAN GAS BUMI |              |              |                     |                   |         |           |
| No.  | KODE_SZ      | LOKASI       | KOORDINAT           |                   | NLP     | LUAS (HA) |
|  |              |              | X                   | Y                 |         |           |
| 18   | AL-APK-GM-18 | Indramayu    | 108° 6' 39.297" BT  | 6° 8' 37.309" LS  | 3204-02 | 1797,49   |
| 19   | AL-APK-GM-19 | Indramayu    | 108° 24' 56.541" BT | 6° 18' 47.602" LS | 3204-04 | 2406,04   |
| 20   | AL-APK-GM-20 | Indramayu    | 108° 32' 4.458" BT  | 6° 22' 5.204" LS  | 3204-04 | 5458,20   |
| 21   | AL-APK-GM-21 | Kota Cirebon | 108° 35' 49.969" BT | 6° 44' 7.481" LS  | 3204-06 | 222,67    |

**KOORDINAT DAN LUASAN KABEL BAWAH LAUT**

| PIPA KABEL BAWAH LAUT           |              |                                 |           |                     |                   |         |           |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------|-----------|
| KABEL TELEKOMUNIKASI BAWAH LAUT |              |                                 |           |                     |                   |         |           |
| No.                             | KODE_SZ      | KETERANGAN                      | LOKASI    | KOORDINAT           |                   | NLP     | LUAS (HA) |
|                                 |              |                                 |           | X                   | Y                 |         |           |
| 1                               | AL-APK-KT-01 | NAP INFO LINTAS NUSA            | Bekasi    | 106° 55' 51.629" BT | 5° 44' 50.489" LS | 3202    | 29,95     |
| 2                               | AL-APK-KT-02 | Indonesia Global Gateway System | Bekasi    | 106° 57' 10.860" BT | 5° 44' 30.105" LS | 3202    | 23,79     |
| 3                               | AL-APK-KT-03 | XL AXIATA                       | Bekasi    | 106° 57' 9.990" BT  | 5° 44' 32.391" LS | 3202    | 34,43     |
| 4                               | AL-APK-KT-04 | INDOSAT                         | Bekasi    | 106° 59' 36.553" BT | 5° 44' 10.290" LS | 3202    | 96,76     |
| 5                               | AL-APK-KT-05 | PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA    | Karawang  | 107° 5' 53.615" BT  | 5° 49' 28.920" LS | 3202-02 | 284,04    |
| 6                               | AL-APK-KT-06 | Jasuka PT TELKOM INDONESIA      | Bekasi    | 107° 5' 16.864" BT  | 5° 50' 24.059" LS | 3202-02 | 240,92    |
| 7                               | AL-APK-KT-07 | Jakabare INDOSAT                | Karawang  | 107° 7' 23.442" BT  | 5° 50' 58.426" LS | 3202-02 | 174,70    |
| 8                               | AL-APK-KT-08 | Jasuka PT TELKOM INDONESIA      | Karawang  | 107° 7' 38.788" BT  | 5° 50' 50.896" LS | 3202-02 | 162,67    |
| 9                               | AL-APK-KT-09 | Kabel Telekomunikasi            | Karawang  | 107° 8' 25.543" BT  | 5° 51' 22.920" LS | 3202-02 | 149,20    |
| 10                              | AL-APK-KT-10 | Jakabare INDOSAT                | Karawang  | 107° 8' 38.434" BT  | 5° 51' 33.174" LS | 3202-02 | 227,07    |
| 11                              | AL-APK-KT-11 | Jasuka PT TELKOM INDONESIA      | Karawang  | 107° 8' 54.423" BT  | 5° 50' 30.221" LS | 3202-02 | 190,14    |
| 12                              | AL-APK-KT-12 | Kabel Telekomunikasi            | Indramayu | 108° 21' 1.636" BT  | 5° 47' 38.067" LS | 3204    | 198,37    |
| 13                              | AL-APK-KT-13 | INDOSAT                         | Indramayu | 108° 22' 45.623" BT | 5° 44' 37.232" LS | 3204    | 162,82    |
| 14                              | AL-APK-KT-14 | Kabel Telekomunikasi            | Cirebon   | 108° 44' 24.622" BT | 6° 39' 1.967" LS  | 3204-06 | 297,73    |
| 15                              | AL-APK-KT-15 | Kabel Telekomunikasi            | Cirebon   | 108° 50' 13.498" BT | 6° 36' 24.346" LS | 3204-06 | 199,20    |

**KOORDINAT DAN PANJANG MIGRASI BIOTA LAUT**

| <b>MIGRASI BIOTA LAUT</b> |                |               |                     |                   |            |                     |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|
| <b>No.</b>                | <b>KODE_SZ</b> | <b>LOKASI</b> | <b>KOORDINAT</b>    |                   | <b>NLP</b> | <b>PANJANG (KM)</b> |
|                           |                |               | <b>X</b>            | <b>Y</b>          |            |                     |
| 1                         | AL-MB-I-01     | Sukabumi      | 106° 26' 47,758" BT | 6° 57' 10,050" LS | 3201       | 53.945,01           |
| 2                         | AL-MB-I-02     | Sukabumi      | 106° 29' 2,758" BT  | 6° 57' 32,490" LS | 3201       | 12.344,32           |
| 3                         | AL-MB-I-03     | Sukabumi      | 106° 33' 5,018" BT  | 7° 1' 40,128" LS  | 3201       | 262.003,25          |
| 4                         | AL-MB-I-04     | Sukabumi      | 106° 27' 26,714" BT | 7° 11' 7,690" LS  | 3201       | 28.421,62           |
| 5                         | AL-MB-I-05     | Sukabumi      | 106° 23' 6,693" BT  | 7° 19' 10,251" LS | 3201       | 26.735,47           |
| 6                         | AL-MB-I-06     | Sukabumi      | 106° 29' 19,155" BT | 7° 22' 27,023" LS | 3201       | 28.383,57           |
| 7                         | AL-MB-I-07     | Sukabumi      | 106° 39' 7,130" BT  | 7° 25' 13,343" LS | 3201       | 53.064,13           |
| 8                         | AL-MB-I-08     | Sukabumi      | 106° 53' 57,977" BT | 7° 26' 11,533" LS | 3201       | 23.509,78           |
| 9                         | AL-MB-M-01     | Karawang      | 107° 7' 36,466" BT  | 5° 58' 14,405" LS | 3202       | 28.591,60           |
| 10                        | AL-MB-M-02     | Indramayu     | 108° 23' 2,145" BT  | 5° 59' 27,728" LS | 3204       | 221.115,75          |
| 11                        | AL-MB-P-01     | Sukabumi      | 106° 25' 53,551" BT | 7° 21' 33,973" LS | 3202       | 2.155.306,55        |
| 12                        | AL-MB-P-02     | Sukabumi      | 124° 7' 46,872" BT  | 12° 4' 36,939" LS | 3202       | 4.464.644,33        |
| 13                        | AL-MB-P-03     | Sukabumi      | 106° 53' 57,977" BT | 7° 26' 11,533" LS | 3202       | 52.654,16           |
| 14                        | AL-MB-P-04     | Tasikmalaya   | 108° 3' 23,868" BT  | 7° 45' 51,192" LS | 3203       | 34.661,99           |
| 15                        | AL-MB-P-05     | Pangandaran   | 108° 32' 27,573" BT | 8° 12' 44,401" LS | 3203       | 45.361,37           |
| 16                        | AL-MB-P-06     | Pangandaran   | 108° 25' 25,551" BT | 7° 49' 12,845" LS | 3203       | 14.903,80           |

| MIGRASI BIOTA LAUT |            |             |                    |                   |      |              |
|--------------------|------------|-------------|--------------------|-------------------|------|--------------|
| No.                | KODE_SZ    | LOKASI      | KOORDINAT          |                   | NLP  | PANJANG (KM) |
|                    |            |             | X                  | Y                 |      |              |
| 17                 | AL-MB-P-07 | Pangandaran | 108° 32' 2,607" BT | 7° 41' 34,675" LS | 3203 | 8.653,23     |
| 18                 | AL-MB-P-08 | Pangandaran | 108° 32' 2,607" BT | 7° 41' 34,675" LS | 3203 | 12.886,91    |

**KOORDINAT DAN PANJANG ALUR PELAYARAN DAN/ATAU PERLINTASAN**

| <b>ALUR PELAYARAN DAN/ATAU PERLINTASAN</b> |                |               |                     |                   |            |                     |
|--|----------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|
| <b>No.</b>                                 | <b>KODE_SZ</b> | <b>LOKASI</b> | <b>KOORDINAT</b>    |                   | <b>NLP</b> | <b>PANJANG (KM)</b> |
|  |                |               | <b>X</b>            | <b>Y</b>          |            |                     |
| 1  | AL-APP-I-01    | Subang        | 108° 2' 6,440" BT   | 6° 0' 32,584" LS  | 3204       | 63.110,96           |
| 2  | AL-APP-N-01    | Bekasi        | 106° 54' 0,727" BT  | 5° 45' 38,416" LS | 3202       | 694,58              |
| 3  | AL-APP-N-02    | Bekasi        | 106° 54' 11,704" BT | 5° 45' 30,766" LS | 3202       | 1.163,83            |
| 4  | AL-APP-N-03    | Bekasi        | 106° 54' 20,904" BT | 5° 45' 23,656" LS | 3202       | 1.603,63            |
| 5  | AL-APP-N-04    | Bekasi        | 106° 55' 20,921" BT | 5° 45' 8,132" LS  | 3202       | 2.569,82            |
| 6  | AL-APP-N-05    | Bekasi        | 106° 56' 27,102" BT | 5° 44' 46,345" LS | 3202       | 4.142,61            |
| 7  | AL-APP-N-06    | Bekasi        | 106° 57' 28,726" BT | 5° 44' 43,131" LS | 3202       | 4.295,49            |
| 8  | AL-APP-N-07    | Indramayu     | 108° 25' 42,572" BT | 5° 44' 42,165" LS | 3204       | 31.909,09           |
| 9  | AL-APP-N-08    | Karawang      | 107° 1' 5,990" BT   | 5° 44' 44,034" LS | 3202       | 14.588,21           |
| 10   | AL-APP-N-09    | Karawang      | 107° 2' 17,037" BT  | 5° 45' 29,611" LS | 3202       | 18.312,63           |
| 11   | AL-APP-N-10    | Karawang      | 107° 3' 11,565" BT  | 5° 45' 54,921" LS | 3202       | 21.345,89           |
| 12   | AL-APP-N-11    | Karawang      | 107° 14' 23,049" BT | 5° 50' 35,154" LS | 3202       | 60.100,27           |
| 13   | AL-APP-N-12    | Karawang      | 107° 20' 33,032" BT | 5° 54' 56,975" LS | 3202       | 83.974,38           |
| 14   | AL-APP-N-13    | Karawang      | 107° 16' 28,895" BT | 5° 52' 44,550" LS | 3202       | 68.380,02           |
| 15   | AL-APP-N-14    | Karawang      | 107° 12' 32,941" BT | 5° 49' 46,956" LS | 3202       | 55.891,32           |
| 16   | AL-APP-N-15    | Karawang      | 107° 8' 38,722" BT  | 5° 51' 17,734" LS | 3202       | 24.894,44           |

| ALUR PELAYARAN DAN/ATAU PERLINTASAN |             |             |                     |                   |      |              |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|------|--------------|
| No.                                 | KODE_SZ     | LOKASI      | KOORDINAT           |                   | NLP  | PANJANG (KM) |
|                                     |             |             | X                   | Y                 |      |              |
| 17                                  | AL-APP-N-16 | Karawang    | 107° 7' 30,880" BT  | 5° 58' 2,942" LS  | 3202 | 50.596,77    |
| 18                                  | AL-APP-N-17 | Karawang    | 107° 7' 56,261" BT  | 5° 51' 23,278" LS | 3202 | 26.704,78    |
| 19                                  | AL-APP-N-18 | Karawang    | 107° 21' 40,210" BT | 5° 54' 42,679" LS | 3202 | 50.006,41    |
| 20                                  | AL-APP-N-19 | Karawang    | 107° 21' 55,406" BT | 5° 55' 46,179" LS | 3202 | 50.024,24    |
| 21                                  | AL-APP-N-20 | Cirebon     | 108° 40' 5,776" BT  | 6° 36' 50,685" LS | 3204 | 32.628,20    |
| 22                                  | AL-APP-N-21 | Cirebon     | 108° 42' 3,653" BT  | 6° 38' 42,205" LS | 3204 | 34.654,33    |
| 23                                  | AL-APP-N-22 | Sukabumi    | 106° 30' 24,950" BT | 7° 0' 7,646" LS   | 3201 | 8.293,62     |
| 24                                  | AL-APP-N-23 | Sukabumi    | 106° 30' 27,408" BT | 7° 0' 11,721" LS  | 3201 | 8.363,39     |
| 25                                  | AL-APP-N-24 | Pangandaran | 108° 33' 51,753" BT | 7° 54' 34,471" LS | 3203 | 33.142,24    |
| 26                                  | AL-APP-N-25 | Pangandaran | 108° 34' 51,830" BT | 7° 45' 33,526" LS | 3203 | 19.984,36    |
| 27                                  | AL-APP-N-26 | Pangandaran | 108° 41' 28,308" BT | 7° 48' 57,079" LS | 3203 | 7.488,09     |
| 28                                  | AL-APP-R-01 | Bekasi      | 107° 2' 21,862" BT  | 5° 54' 14,292" LS | 3202 | 20.310,49    |
| 29                                  | AL-APP-R-02 | Karawang    | 107° 3' 2,118" BT   | 5° 53' 26,702" LS | 3202 | 19.415,53    |
| 30                                  | AL-APP-R-03 | Karawang    | 107° 38' 12,016" BT | 6° 9' 20,879" LS  | 3202 | 8.066,20     |
| 31                                  | AL-APP-R-04 | Subang      | 107° 54' 42,086" BT | 6° 6' 27,066" LS  | 3203 | 29.961,14    |
| 32                                  | AL-APP-R-05 | Indramayu   | 108° 28' 25,953" BT | 6° 6' 16,809" LS  | 3203 | 51.919,12    |
| 33                                  | AL-APP-R-06 | Indramayu   | 108° 28' 0,000" BT  | 6° 16' 11,400" LS | 3203 | 23.682,12    |

| ALUR PELAYARAN DAN/ATAU PERLINTASAN |             |          |                     |                   |      |              |
|-------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-------------------|------|--------------|
| No.                                 | KODE_SZ     | LOKASI   | KOORDINAT           |                   | NLP  | PANJANG (KM) |
|                                     |             |          | X                   | Y                 |      |              |
| 34                                  | AL-APP-R-07 | Cirebon  | 108° 40' 0,789" BT  | 6° 36' 45,353" LS | 3203 | 32.477,66    |
| 35                                  | AL-APP-R-08 | Cirebon  | 108° 41' 25,662" BT | 6° 37' 35,014" LS | 3203 | 33.634,43    |
| 36                                  | AL-APP-R-09 | Sukabumi | 106° 25' 32,799" BT | 6° 58' 27,241" LS | 3201 | 4.200,70     |
| 37                                  | AL-APP-R-10 | Sukabumi | 106° 26' 5,919" BT  | 6° 57' 34,927" LS | 3201 | 2.114,06     |
| 38                                  | AL-APP-R-11 | Sukabumi | 106° 26' 33,343" BT | 6° 58' 27,015" LS | 3201 | 4.580,27     |
| 39                                  | AL-APP-R-12 | Sukabumi | 106° 29' 11,319" BT | 6° 58' 43,818" LS | 3201 | 10.152,42    |
| 40                                  | AL-APP-R-13 | Sukabumi | 106° 31' 34,891" BT | 7° 0' 25,134" LS  | 3201 | 3.382,50     |
| 41                                  | AL-APP-R-14 | Sukabumi | 106° 31' 52,456" BT | 7° 1' 17,660" LS  | 3201 | 2.328,30     |
| 42                                  | AL-APP-R-15 | Sukabumi | 106° 28' 1,262" BT  | 7° 5' 43,936" LS  | 3201 | 20.592,13    |
| 43                                  | AL-APP-R-16 | Sukabumi | 106° 26' 13,377" BT | 7° 9' 58,851" LS  | 3201 | 5.927,78     |
| 44                                  | AL-APP-R-17 | Sukabumi | 106° 25' 23,815" BT | 7° 10' 5,363" LS  | 3201 | 5.116,00     |
| 45                                  | AL-APP-R-18 | Sukabumi | 106° 20' 52,919" BT | 7° 16' 33,239" LS | 3201 | 29.664,53    |
| 46                                  | AL-APP-R-19 | Sukabumi | 106° 23' 36,737" BT | 7° 23' 21,088" LS | 3201 | 4.184,81     |
| 47                                  | AL-APP-R-20 | Sukabumi | 106° 26' 55,083" BT | 7° 24' 12,379" LS | 3201 | 12.634,71    |
| 48                                  | AL-APP-R-21 | Sukabumi | 106° 30' 8,042" BT  | 7° 25' 24,664" LS | 3201 | 6.162,91     |
| 49                                  | AL-APP-R-22 | Sukabumi | 106° 35' 25,650" BT | 7° 26' 22,447" LS | 3201 | 19.718,97    |
| 50                                  | AL-APP-R-23 | Sukabumi | 106° 40' 48,079" BT | 7° 26' 14,245" LS | 3201 | 3.121,37     |

| ALUR PELAYARAN DAN/ATAU PERLINTASAN |             |             |                     |                   |      |              |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|------|--------------|
| No.                                 | KODE_SZ     | LOKASI      | KOORDINAT           |                   | NLP  | PANJANG (KM) |
|                                     |             |             | X                   | Y                 |      |              |
| 51                                  | AL-APP-R-24 | Sukabumi    | 106° 41' 19,517" BT | 7° 26' 19,982" LS | 3201 | 3.502,94     |
| 52                                  | AL-APP-R-25 | Pangandaran | 108° 42' 37,582" BT | 7° 42' 24,883" LS | 3204 | 9.835,62     |
| 53                                  | AL-APP-R-26 | Pangandaran | 108° 44' 7,008" BT  | 7° 42' 16,570" LS | 3204 | 9.925,42     |

**KOORDINAT DAN LUASAN KAWASAN KONSERVASI**

| KAWASAN KONSERVASI |             |  |             |                               |                        |                   |         |           |
|--------------------|-------------|--|-------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|---------|-----------|
| No.                | KODE_SZ     | KETERANGAN   | LOKASI      | DASAR HUKUM                   | KOORDINAT              |                   | NLP     | LUAS (HA) |
|                    |             |  |             |                               | X                      | Y                 |         |           |
| 1                  | KK-KKM-01   | Karang Temiyang  | Karawang    |                               | 107° 35' 17.348"<br>BT | 6° 8' 52.732" LS  | 3202-03 | 100,10    |
| 2                  | KK-KKM-02   | Karang Sendulang   | Karawang    |                               | 107° 34' 58.641"<br>BT | 6° 8' 2.037" LS   | 3202-03 | 100,10    |
| 3                  | KK-KKM-03   | Karang Kapalan   | Karawang    |                               | 107° 35' 28.575"<br>BT | 6° 7' 21.062" LS  | 3202-03 | 100,10    |
| 4                  | KK-KKM-04   | Karang Bui   | Subang      |                               | 107° 52' 46.190"<br>BT | 6° 0' 46.399" LS  | 3204-01 | 100,15    |
| 5                  | KK-KKP-01   | Suaka Alam Perairan Blanakan                                   | Subang      |                               | 107° 40' 18.027"<br>BT | 6° 14' 21.273" LS | 3202-03 | 375,83    |
| 6                  | KK-KKP-02   | Suaka Alam Perairan Eretan                                     | Indramayu   |                               | 108° 4' 31.163" BT     | 6° 18' 56.694" LS | 3204-02 | 151,09    |
| 7                  | KK-KKP-03   | Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Indramayu (Pulau Biawak) | Indramayu   | No.556/Kep.528 Diskanla /2004 | 108° 25' 36.448"<br>BT | 5° 53' 34.109" LS | 3204-05 | 54847,49  |
| 8                  | KK-KKP-04   | Kawasan Konservasi Mangrove Ciemas                             | Sukabumi    |                               | 106° 27' 43.647"<br>BT | 7° 10' 35.542" LS | 3201-02 | 87,13     |
| 9                  | KK-KKP-05   | Kawasan Konservasi Mangrove Cibitung                           | Sukabumi    |                               | 106° 39' 14.064"<br>BT | 7° 25' 38.394" LS | 3201-03 | 301,33    |
| 10                 | KK-KKP-06   | Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pangandaran                   | Pangandaran |                               | 108° 32' 53.816"<br>BT | 7° 46' 52.002" LS | 3203-03 | 38854,67  |
| 11                 | KK-KKP3K-01 | Kawasan Konservasi Mangrove Muara Gembong                      | Bekasi      |                               | 107° 0' 54.226" BT     | 5° 58' 27.296" LS | 3202-01 | 4319,32   |
| 12                 | KK-KKP3K-02 | Suaka Pulau Kecil Geopark Ciletuh                              | Sukabumi    |                               | 106° 26' 40.380"<br>BT | 7° 10' 53.771" LS | 3201-02 | 64,74     |

| KAWASAN KONSERVASI |             |  |             |  |                     |                   |         |           |
|--------------------|-------------|--|-------------|--|---------------------|-------------------|---------|-----------|
| No.                | KODE_SZ     | KETERANGAN                             | LOKASI      | DASAR HUKUM                                | KOORDINAT           |                   | NLP     | LUAS (HA) |
|                    |             |  |             |  | X                   | Y                 |         |           |
| 13                 | KK-KKP3K-03 | Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan | Sukabumi    | Kepmen KP.05/Kepmen-KP/2016                | 106° 22' 9.537" BT  | 7° 20' 59.300" LS | 3201-01 | 2597,04   |
| 14                 | KK-KKP3K-04 | Suaka Pesisir Pamayang                 | Tasikmalaya |  | 108° 4' 4.183" BT   | 7° 46' 8.639" LS  | 3203-02 | 104,895   |
| 15                 | KK-KL-01    | Cagar Alam Laut Leweung Sancang        | Garut       | SK Menteri Kehutanan No. 682/Kpts-II/1990  | 107° 50' 59.716" BT | 7° 43' 23.794" LS | 3203-01 | 1923,66   |
| 16                 | KK-KL-02    | Cagar Alam Laut Pangandaran            | Pangandaran | SK Menteri Kehutanan No. 225/Kpts-II/1990  | 108° 39' 41.136" BT | 7° 43' 4.383" LS  | 3203-04 | 487,07    |
| 17                 | KK-KL-03    | Suaka Margasatwa Sindangkerta          | Tasikmalaya | SK Menteri Kehutanan No. 6949/Kpts-II/2002 | 108° 4' 21.033" BT  | 7° 46' 9.971" LS  | 3203-02 | 53,17     |

**KOORDINAT DAN LUASAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU**

| <b>KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU</b> |                |                          |               |                     |                   |            |                  |
|---|----------------|--------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|
| <b>No.</b>  | <b>KODE_SZ</b> | <b>KETERANGAN</b>        | <b>LOKASI</b> | <b>KOORDINAT</b>    |                   | <b>NLP</b> | <b>LUAS (HA)</b> |
|   |                |                          |               | <b>X</b>            | <b>Y</b>          |            |                  |
| 1   | KSN-LH-01      | KSN PACANGSANAK          | Pangandaran   | 106° 59' 43,603" BT | 6° 0' 40,931" LS  | 3202       | 595,51           |
| 2   | KSN-KP-01      | KSN<br>JABODETABEKPUNJUR | Bekasi        | 107° 0' 59,286" BT  | 5° 58' 16,129" LS | 3202       | 833.797,57       |
| 3   | KSNT-PPKT-01   | KSNT Batu Kolotok        | Tasikmalaya   | 108° 16' 15,629" BT | 7° 55' 39,939" LS | 3204       | 12.161,26        |
| 4   | KSNT-PPKT-02   | KSNT Nusa Manuk          | Tasikmalaya   | 108° 20' 16,508" BT | 7° 55' 47,831" LS | 3204       | 12.115,23        |

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL





| No       | Program Utama   | Lokasi  | Luas (Ha) | Instansi Pelaksana   | Tahapan             |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | Sumber Dana   |      |   |  |   |   |
|----------|---|---|-----------|--|---------------------|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|---------------|------|---|--|---|---|
|          |   |   |           |  | Tahap I (Tahun ke-) |   |   |   |   | Tahap II (Tahun ke-) |   |   |   |   | Tahap III (Tahun ke-) |   |   |   |   | Tahap IV (Tahun ke-) |   |   |   |   | APBD Provinsi | APBN |   |  |   |   |
|          |   |   |           |  | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 |               |      |   |  |   |   |
| <b>5</b> | <b>Pariwisata/Wisata Bahari</b>   |   |           |  |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   |  |   |   |
|          | Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata berstandar   | Kabupaten Pangandaran , Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kabupaten Bekasi | 3.616,91  | DKP, DISBUDPAR, PU, DISPERKIM, DBMPR, DINAS KOPERASI DAN UKM |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      | √ |  |   |   |
|          | Pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri Jawa Barat   |   |           |  |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   |  |   | √ |
|          | Pemasaran wisata dalam konsep tourism, trade dan investmen (TTI)  |   |           |  |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   |  |   | √ |
|          | Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata   |   |           |  |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   |  |   | √ |
|          | Program pengembangan edukasi dan partisipasi untuk wisatawan dan masyarakat setempat dalam pemanfaatan kawasan pesisir sebagai daya tarik wisata  |   |           |  |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   |  |   | √ |
|          | Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata bahari dengan aturan intensitas bangunan sesuai syarat  |   |           |  |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   |  |   | √ |
|          | Integrasi kegiatan wisata bahari dengan pemanfaatan ruang yang memiliki potensi strategis meliputi konservasi, perikanan budidaya, perikanan tangkap dan angkutan   |   |           |  |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   |  |   | √ |
| <b>6</b> | <b>Pelabuhan Umum</b>   |   |           |  |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   |  |   |   |
|          | Kegiatan rutin penyelenggaraan pelabuhan  | Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran , Kabupaten Bekasi, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon   | 23.429,51 | DISHUB   |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      | √ |  |   |   |
|          | Kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi |   |           |  |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   |  | √ |   |
|          | Program penelitian atau pengkajian pengembangan pelabuhan   |   |           |  |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   |  | √ |   |
|          | Program pengerukan alur pelabuhan secara rutin  |   |           |  |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   |  | √ |   |
|          | Program pengembangan pelabuhan jangka panjang   |   |           |  |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   |  | √ |   |

| No       | Program Utama  | Lokasi                          | Luas (Ha)  | Instansi Pelaksana | Tahapan             |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | Sumber Dana  |      |
|----------|--|---------------------------------|------------|--------------------|---------------------|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|--------------|------|
|          |  |                                 |            |                    | Tahap I (Tahun ke-) |   |   |   |   | Tahap II (Tahun ke-) |   |   |   |   | Tahap III (Tahun ke-) |   |   |   |   | Tahap IV (Tahun ke-) |   |   |   |   | APBD Provisi | APBN |
|          |  |                                 |            |                    | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 |              |      |
|          | Pembangunan fasilitas konstruksi dan pemeliharaan kapal  |                                 |            |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   | √ |              |      |
|          | Program pembangunan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar)   |                                 |            |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   | √ |              |      |
| <b>7</b> | <b>Pelabuhan Perikanan</b>   |                                 |            |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |              |      |
|          | Pendaratan hasil tangkapan perikanan   | PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat | 611,55     | DKP                |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   | √ | √ |              |      |
|          | Pelaksanaan operasional kapal perikanan  |                                 |            |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √            | √    |
|          | Tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawasan perikanan  |                                 |            |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √            | √    |
|          | Penyediaan perbekalan dan perbaikan kapal perikanan  |                                 |            |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √            | √    |
|          | Kegiatan bongkar muat  |                                 |            |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √            | √    |
|          | Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman/pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan; dan pengolahan dan pengawetan lainnya) |                                 |            |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √            | √    |
|          | Pembangunan dan pengembangan industri maritim (pengembangan kapal ikan)  |                                 |            |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √            |      |
|          | Program uji coba kapal   |                                 |            |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √            |      |
|          | Penyediaan ruang penempatan kapal mati   |                                 |            |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √            |      |
|          | Pelaksanaan kegiatan pemasaran dan distribusi ikan   |                                 |            |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √            | √    |
|          | Pengembangan kegiatan jasa dan perdagangan di pelabuhan perikanan  |                                 |            |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √            | √    |
| <b>8</b> | <b>Pertambangan</b>  |                                 |            |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |              |      |
|          | Pemetaan kawasan potensial pertambangan dan migas  | Kabupaten Indramayu,            | 104.580,96 | ESDM               |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   | √ |              |      |
|          | Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya tambang dan migas   | Kabupaten Sukabumi,             |            |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √            |      |
|          | Pengendalian pemanfaatan sumberdaya tambang dan migas  | Kabupaten Karawang, Kabupaten   |            |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √            |      |



| No        | Program Utama  | Lokasi   | Luas (Ha)     | Instansi Pelaksana   | Tahapan             |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | Sumber Dana   |      |   |   |
|-----------|--|--|---------------|----------------------|---------------------|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|---------------|------|---|---|
|           |  |  |               |                      | Tahap I (Tahun ke-) |   |   |   |   | Tahap II (Tahun ke-) |   |   |   |   | Tahap III (Tahun ke-) |   |   |   |   | Tahap IV (Tahun ke-) |   |   |   |   | APBD Provinsi | APBN |   |   |
|           |  |  |               |                      | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 |               |      |   |   |
|           | Pelibatan partisipasi stakeholder dalam melestarikan lingkungan perairan laut  |  |               |                      |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   | √ | √             |      |   |   |
| <b>11</b> | <b>Pergaraman</b>  |  |               |                      |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   |   |
|           | Pemetaan lokasi intake air laut untuk budidaya garam   | Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Sukabumi | 26.66<br>3,80 | DKP                  |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   | √ | √             |      |   |   |
|           | Program perlindungan kawasan intake air laut untuk budidaya garam  |  |               |                      |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   |   |
| <b>12</b> | <b>PLTU</b>  |  |               |                      |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   |   |
|           | Melakukan kajian AMDAL dan penerapan RKL RPL   | Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Sukabumi                     | 3.542<br>,59  | DINAS ESDM, DINAS LH |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   | √ |               |      |   |   |
|           | Kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar TUKS/tersus   |  |               |                      |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      | √ |   |
|           | Pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur kapal   |  |               |                      |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      | √ |   |
|           | Bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi, dan penunjang  |  |               |                      |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      | √ |   |
|           | Pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan  |  |               |                      |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      | √ |   |
|           | Pemanfaatan dan pengoperasian TUKS/Tersus  |  |               |                      |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      | √ |   |
|           | Pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik |  |               |                      |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   | √ |
| <b>13</b> | <b>PLTGU</b>   |  |               |                      |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   |   |
|           | Melakukan kajian AMDAL dan penerapan RKL RPL   | Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi  | 3.237<br>,99  | DINAS ESDM           |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   | √ |               |      |   |   |
|           | Kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar TUKS/tersus   |  |               |                      |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               | √    |   |   |
|           | Pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur kapal   |  |               |                      |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      | √ |   |



| No | Program Utama  | Lokasi | Luas (Ha) | Instansi Pelaksana | Tahapan             |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | Sumber Dana   |      |
|----|--|--------|-----------|--------------------|---------------------|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|---------------|------|
|    |  |        |           |                    | Tahap I (Tahun ke-) |   |   |   |   | Tahap II (Tahun ke-) |   |   |   |   | Tahap III (Tahun ke-) |   |   |   |   | Tahap IV (Tahun ke-) |   |   |   |   | APBD Provinsi | APBN |
|    |  |        |           |                    | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 |               |      |
|    | <b>Tahap Tanggap Darurat</b>   |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |
|    | Peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan terkait penanganan bencana          |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √             | √    |
|    | Peningkatan sarana dan prasarana tanggap darurat penanggulangan bencana              |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √             | √    |
|    | Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana  |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √             |      |
|    | Peningkatan pengelolaan tanggap darurat penanggulangan bencana                       |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √             |      |
|    | <b>Tahap Pemulihan</b>   |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |
|    | Peningkatan pengelolaan penanganan pasca bencana                                     |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √             |      |
|    | Penyediaan sarana prasarana darurat sementara  |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √             |      |
|    | Pembangunan kembali sarana prasarana terdampak bencana                               |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √             | √    |
|    | <b>Mitigasi Bencana Berdasarkan Jenis Bencana</b>                                    |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |
|    | <b>Gempa bumi dan tsunami</b>  |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |
|    | Penyusunan mikrozonasi rawan bencana gempa bumi dan tsunami                          |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √             |      |
|    | Penetapan zona evakuasi dan lokasi pengungsian                                       |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √             |      |
|    | Penyusunan rencana tata ruang daerah rawan gempa dan tsunami                         |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √             |      |
|    | <b>Abrasi/erosi</b>  |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |
|    | Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup di pesisir dan laut |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √             | √    |
|    | Pengamanan pantai  |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | √             | √    |
|    | <b>Akresi</b>  |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |

| No        | Program Utama   | Lokasi | Luas (Ha) | Instansi Pelaksana | Tahapan             |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   | Sumber Dana   |      |   |
|-----------|---|--------|-----------|--------------------|---------------------|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|---------------|------|---|
|           |   |        |           |                    | Tahap I (Tahun ke-) |   |   |   |   | Tahap II (Tahun ke-) |   |   |   |   | Tahap III (Tahun ke-) |   |   |   |   | Tahap IV (Tahun ke-) |   |   |   |   | APBD Provinsi | APBN |   |
|           |   |        |           |                    | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 |               |      |   |
|           | Pemetaan lokasi dan luas wilayah akresi   |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   |
|           | Penggunaan rambu larangan penggunaan lahan akresi                               |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   |
|           | Penetapan status kepemilikan tanah akresi                                       |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   |
|           | <b>Pencemaran</b>   |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   |
|           | Peningkatan monitoring dan evaluasi pencemaran di lokasi industri               |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               | √    | √ |
|           | Penegakan hukum   |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               | √    | √ |
|           | Pengembangan kinerja Pengelolaan air limbah                                     |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               | √    | √ |
|           | Peningkatan penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan                      |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               | √    | √ |
| <b>15</b> | <b>Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</b>                        |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               |      |   |
|           | Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               | √    | √ |
|           | Sistem Informasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil                          |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               | √    | √ |
|           | Sosialisasi Perda RZWP3K  |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               | √    | √ |
|           | Penyusunan Peraturan Gubernur   |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               | √    | √ |
|           | Fasilitasi Perizinan bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional                      |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               | √    | √ |
|           | Riset / Penelitian / Identifikasi   |        |           |                    |                     |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |   |   |   |   |               | √    | √ |

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL